

KONFLIK DAN PERDAMAIAN

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

KONFLIK DAN PERDAMAIAN

Penulis:

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

Ilustrasi Sampul: Thinkstock

Cetakan I: Juli 2019

ISBN: 978-602-5758-66-9

Penerbit

CV Saga Jawadwipa

PUSTAKA SAGA

Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima, no 4A. Kenjeran, Surabaya

Email: saga.penerbit@gmail.com, HP: +62 856 5539 6657

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Konflik dan perdamaian ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada konflik yang tidak dibarengi upaya perdamaian, dan sebaliknya upaya perdamaian tidak otomatis bebas dari konflik. Buku ini mencoba memahami konflik dan perdamaian dari perspektif ilmu sosial.

Pada bagian awal, buku ini membahas konflik dan perdamaian sebagai suatu proses sosial, definisi konflik dan pelbagai jenis konflik (ekonomi, politik, budaya, agama, etnik), indikator konflik, serta fungsi konflik. Selanjutnya dibahas perdamaian (resolusi konflik) dari perspektif Durkheim Weber, Derrida, Armstrong, Girard, dll. Resitasi berdasar tulisan Schwager, Gandhi, King. Jr, Hooks, Suu Kyi, dan Sharp dicantumkan untuk mempertajam perspektif memahami konflik dan perdamaian.

Semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca dan merupakan awal bagi diskusi lanjutan tentang konflik dan perdamaian.

Surabaya, 10 Juli 2019

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | iii

Daftar Isi | iv

1. Proses Sosial : Konflik dan Perdamaian | 1
2. Konflik | 7
3. Perdamaian | 21
4. Agama Sebagai Fondasi Etika Untuk Mengatasi Konflik/Kekerasan |25
5. Ahimsa : Jangkauan dan Kekuasaan Nir-Kekerasan Suatu Kutipan Tulisan Mahatma Gandhi | 44
6. Cinta Kasih, Hukum dan Ketidaktaatan Masyarakat |66
7. Beloved Community (Masyarakat Tercinta) : Sebuah Dunia Tanpa Rasisme |80
8. Bebas Dari Rasa Takut | 94
9. Di Balik Perang Berkeadilan dan Paham Perdamaian : Perjuangan Tanpa Kekerasan Menuju Keadilan, Kebebasan dan Perdamaian | 102

Daftar Pustaka | 143

Riwayat Hidup | 147

Proses Sosial : Konflik dan Perdamaian

1. Proses Sosial

Setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu hingga dapat menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku disebut proses sosial. Mengetahui struktur masyarakat hanya mengetahui segi statis masyarakat, akan tetapi mengetahui proses sosial memungkinkan memahami segi-segi dinamis masyarakat.

Ada dua tipe proses sosial yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif terjadi apabila proses ini mengindikasikan adanya gerak pendekatan penyatuan. Sedangkan proses sosial disosiatif terjadi apabila mengindikasikan adanya gerak pembentukan atau perpecahan. Proses sosial asosiatif mengintegrasikan masyarakat (memperdamaikan) sedang proses sosial disosiatif berupa pertentangan sosial (konflik).

2. Konflik

Proses sosial disosiatif berupa pertentangan sosial mencakup kompetisi dan konflik. Kompetisi dan konflik memegang peranan dalam mencapai status (*achieved status*).

a. Kompetisi

Merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Ada dua tipe kompetisi yaitu kompetisi personal / rivalita dan kompetisi impersonal.

Kompetisi atau persaingan terjadi dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan.

Akibat persaingan bisa positif atau negatif.

Positif :

1. Menyalurkan keinginan/kepentingan
2. Merealisasi keinginan/kepentingan, memberikan kedudukan/peranan sosial yang tepat
3. Terdapat pembagian kerja yang efektif
4. Mematangkan kepribadian
5. Memperluas pandangan/pengertian
6. Mendorong kerja keras untuk mencapai kemajuan

Negatif :

1. Timbul disorganisasi dalam struktur sosial
2. Perubahan yang terlalu cepat sukar diikuti oleh seluruh masyarakat
3. Bila timbul emosi, rasa benci dan marah bisa mengakibatkan konflik

b. Konflik

Proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Dapat dibedakan antara konflik *overt* (terang-terangan) dan konflik *latent* (tersembunyi). George Simmel membedakan empat jenis konflik yaitu :

1. Perang antar kelompok
2. *Fend* (pembalasan dendam) dan perjuangan antara dua aliran
3. Konflik dalam bidang hukum untuk mempertahankan hak-hak kekayaan

4. Konflik cita-cita

Faktor penyebab :

1. Perbedaan pendirian / keyakinan
2. Perbedaan kebudayaan
3. Perubahan sosial

Bentuk konflik :

1. Pertentangan pribadi
2. Pertentangan rasial
3. Pertentangan antara kelas sosial
4. Pertentangan politik
5. Pertentangan internasional

Akibat konflik :

1. Memperbesar solidaritas kelompok
2. Menggoyahkan persatuan
3. Merubah kepribadian
4. Kehancuran
5. Dominasi
6. Akomodasi (kesepakatan)

3. Perdamaian

Proses sosial asosiatif yang mengintegrasikan (memperdamaikan) masyarakat dapat dilihat dalam bentuk

:

- a. Kooperasi / kerjasama
- b. Akomodasi
- c. Asimilasi
- d. Amalgamasi

a. Kooperasi

Kooperasi ialah perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerjasama dalam suatu kesepahaman. Motifnya sering tertuju untuk kepentingan diri pribadi.

Bentuk-bentuk kooperasi ialah :

1. *Bargaining* (tawar menawar) : pencapaian kesepakatan untuk pertukaran barang atau jasa
2. *Cooptation* : kerjasama untuk menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk
3. *Coalition* : kerjasama dua organisasi yang berbeda struktur untuk tujuan yang sama
4. *Joint venture* : usaha kerjasama demi keuntungan bersama dengan saling mengisi kekurangan masing-masing

b. Akomodasi

Proses tercapainya kesepakatan yang bersifat sementara yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Akomodasi tidak dapat menyelesaikan secara tuntas untuk selamanya (hanya sekedar mengendalikan konflik). Dalam proses akomodasi kedua belah pihak tetap memegang teguh pendapatnya (kesepakatan untuk saling tidak sepakat).

Tujuan :

1. Mengurangi pertentangan yang timbul antara perorangan atau kelompok
2. Mencegah pertentangan untuk sementara

3. Untuk memungkinkan kerjasama antar kelompok yang terpisah dalam masyarakat
4. Mengusahakan peleburan antar kelompok yang terpisah dalam masyarakat
5. Mengusahakan peleburan kelompok-kelompok sosial melalui asimilasi

Bentuk akomodasi :

1. *Coercion*, dengan cara paksaan dan mengancam sanksi
2. *Compromise*, dengan cara mengusahakan pendekatan
3. *Mediation*, mengusahakan pendekatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral
4. *Arbitrasi*, dengan mempergunakan pihak ketiga sebagai penengah yang membuat keputusan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Pihak ketiga berhak memutuskan
5. *Adjudication*, dengan mempergunakan pihak ketiga yang berwenang
6. *Toleration*, akomodasi tanpa menghasilkan persetujuan formal
7. *Stalemate*, pertentangan berhenti karena kekuatannya seimbang dan mengalami kemacetan

c. Asimilasi

Merupakan proses peleburan kebudayaan menjadi kebudayaan tunggal.

Proses asimilasi muncul :

1. Bila ada perbedaan kebudayaan
2. Bila kelompok yang berbeda selalu bergaul secara intensif
3. Masing-masing pihak saling menyesuaikan kebudayaannya

Faktor penunjang asimilasi :

1. Sikap dan kesediaan menenggang
2. Sikap menghadapi orang asing beserta kebudayaannya
3. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang
4. Sikap terbuka golongan penguasa/tidak diskriminasi
5. Kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan
6. Perkawinan campuran
7. Musuh bersama dari luar

Faktor penghambat :

1. Terisolasinya kebudayaan
2. Kurangnya pengetahuan
3. Perasaan takut kepada kekuatan kebudayaan lain
4. Perasaan superior
5. Perbedaan ciri badaniah antar kelompok
6. Adanya perasaan *in group* yang kuat
7. Adanya gangguan-gangguan diskriminatif
8. Perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi antar warga dan antar kelompok

d. Amalgamasi

1. Proses sosial yang melebur dua kelompok budaya
2. Dapat menghasilkan sesuatu yang baru
3. Melenyapkan pertentangan di dalam kelompok

2

Konflik

1. Definisi

Konflik adalah proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Sebagai proses sosial, maka konflik merupakan gejala yang serba hadir. Artinya, selama ada manusia pastilah ada konflik.

2. Jenis-Jenis Konflik

Konflik bisa dibedakan berdasarkan jenisnya :

a. Konflik internal dan eksternal

Konflik internal terjadi di dalam suatu komunitas, dan konflik eksternal terjadi apabila melibatkan beberapa komunitas.

b. Konflik overt dan latent

Konflik bisa terjadi secara terbuka (overt) maupun tersembunyi (latent)

c. Konflik horizontal dan vertikal

Konflik horizontal dipahami sebagai pertentangan yang bertalian dengan suku, etnik, dan agama. Konflik vertikal melibatkan perbedaan ekonomi dan politik

d. Konflik juga bisa dibedakan berdasarkan bidangnya, seperti konflik ekonomi, konflik politik, konflik budaya, konflik agama, konflik etnik, konflik pendidikan, dst.

3. Konflik Ekonomi

Konflik ekonomi menurut Karl Marx, terjadi ketika ada pertentangan antara kelas yang memiliki (borjuis) dengan kelas yang tidak memiliki (proletar). Konflik berakar dari persoalan ekonomi sebagai sub-struktur atau basis ekonomi. Basis ekonomi ini meliputi hubungan produksi (tuan tanah - buruh tani, tuan-hamba, pemilik pabrik-buruh, dst) serta sarana dan prasarana produksi (tanah, budak, mesin, dst). Basis ekonomi inilah yang menentukan super-struktur seperti hukum, pendidikan, agama, dst yang non-ekonomi. Sub-struktur mempengaruhi super-struktur.

Menurut Marx, sejarah kehidupan manusia dimulai dengan konflik dan diakhiri dengan konflik. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan bersifat bipolar. Selama ada manusia selalu ada konflik.

4. Konflik Politik

Menurut Dahrendorf, konflik bertalian dengan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya bertindak sesuai dengan keinginannya. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah atau ada legitimasi. Itulah konflik politik.

Konflik politik tidak pernah tunggal (*super imposed*) dan terjadi akumulasi. Berbagai kelompok (semu maupun nyata) dengan pelbagai kepentingan bisa terlibat dalam suatu konflik politik.

5. Konflik Budaya

Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi pikiran manusia, sehingga orang itu tidak sadar sedang dikuasai. Antonio Gramsci dalam *Prison Notebook* menyebutnya dengan istilah hegemoni atau dominasi budaya.

Konflik budaya terjadi ketika nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan nilai lama yang dianut oleh sebagian masyarakat lainnya. Tulisan Ivan Illich “Bebas dari sekolah”, Paolo Freire “Pendidikan bagi orang yang tertindas” adalah contoh dari konflik budaya.

6. Konflik Agama

Emile Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life* membahas masyarakat primitif yang homogen dan percaya kepada banyak Tuhan. Pada masyarakat primitif, konflik terjadi diantara Tuhan-Tuhan tersebut. Sebaliknya pada masyarakat modern yang heterogen dan percaya kepada satu Tuhan, pelaku konflik adalah masyarakat itu sendiri, yang memperebutkan satu Tuhan. Penyebab konflik adalah karena penganut agama tidak pernah belajar langsung kepada Tuhannya, melainkan melalui perantara / broker agama.

Max Weber dalam *Sociology of Religion* membedakan dua komponen agama yaitu *ethics* atau perintah Tuhan dan *magics / politics* berupa manipulasi perintah Tuhan untuk kepentingan manusia. Konflik agama lebih banyak pada persoalan *magics / politics* dibanding *ethics*.

7. Konflik Etnik

Konflik etnik bertalian dengan perbedaan asal-usul suatu ras (yang bersifat biologik) lalu berlanjut ke persoalan etnik (yang bersifat kultural). Contoh orang Madura di Pulau Madura menyebut dirinya orang Madura asli (Kelas I), dan lebih utama dibanding orang Madura yang merantau (pendalungan). Sebaliknya orang Madura yang merantau merasa lebih beradab, sehingga muncullah sebutan toron dan onggah. Toron atau turun, ketika mereka kembali dari perantauan ke Pulau Madura. Onggah atau naik, ketika mereka berangkat dari Pulau Madura ke daerah perantauan.

Persoalan etnik Tionghoa di Indonesia cerminan dari konflik etnik. Asal usul, kebiasaan, bahasa, dst yang berbeda secara etnik acapkali meruak jadi konflik etnik.

8. Indikator Konflik

Ada beberapa indikator konflik yaitu :

a. Demonstrasi

Demonstrasi adalah menyampaikan protes / ketidaksetujuan sebagai reaksi terhadap kebijakan publik. Demonstrasi sebagai bentuk pernyataan pendapat adalah hak asasi manusia.

Demonstrasi bukanlah berasal dari masyarakat barat, karena masyarakat tradisional di Indonesia pun mengenal demonstrasi. Misalnya budaya pepe di Jawa Tengah sebagai pernyataan pendapat atas kebijakan sultan. Hal serupa juga terjadi di kesultanan Buton, ketika masyarakat menyatakan pendapat untuk mengangkat dan atau keberatan terhadap sultan.

b. Riot / kerusuhan

Demonstrasi acap kali berubah menjadi kerusuhan. Penyebabnya, masyarakat butuh akses terhadap penguasa namun saluran hukum untuk akses tersebut buntu. Masyarakat menggunakan kerusuhan untuk berkomunikasi dengan penguasa. Juga tidak ada mekanisme penyelesaian konflik antar elit. Kerusuhan sebagai produk dari reproduksi kekerasan penguasa yang eksekutif.

c. Kekerasan

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi jika realisasi aktual berada di bawah realisasi potensial. Kita mempunyai kemampuan tertentu yang bisa direalisasikan. Namun pada kenyataannya kita tidak bisa merealisasikannya.

9. Fungsi Konflik

Lewis Coser dalam *The Function of Social Conflicts* menyebutkan konflik memiliki fungsi yaitu :

- a. Sebagai katup penyelamat untuk membersihkan kekacauan
- b. Indikator kekuatan dan stabilitas hubungan
- c. Memperkuat kohesi internal
- d. Tidak selalu berakhir dengan permusuhan
- e. Terakumulasi dalam interaksi lainnya

10. Masalah Integral Nasional : Empat Bidang Konflik

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (1988) dewasa ini disamping berita-berita tentang usaha-usaha dan keberhasilan-keberhasilan usaha membina kesatuan dan

persatuan bangsa, surat-surat kabar di Indonesia banyak pula dipenuhi oleh berbagai berita tentang masalah yang diperkirakan akan mungkin mengganggu kesatuan dan persatuan itu. Masalah-masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori ialah :

1. Masalah suku dan ras. Masalah suku dan ras pada dasarnya lebih merupakan masalah kultural daripada merupakan masalah biologik yang bersifat alami itu. Sekalipun sejak awal-mula kenyataan menunjukkan bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu telah menghadapkan orang pada pilihan untuk segera melupakan identitas dirinya sebagai anggota suku atau anggota ras namun masalah suku dan ras ini (karena berakar pada persoalan kultur) tidaklah akan lenyap begitu saja. Di Indonesia masalah ras dalam kerangka integrasi nasionalpun sering dipersulit oleh permasalahan yang pada dasarnya bersifat ekonomik.
2. Masalah daerah dan antar daerah, meliputi pula masalah hubungan antara kota dan desa. Masalah daerah dan kedaerahan semula berbaur dengan permasalahan suku tetapi sekarang lebih menampakkan diri sebagai permasalahan ekonomi. Masalah daerah lalu berkembang juga secara politis sebagai masalah dalam hal pembagian pendapatan atau imbalan ekonomik.
3. Masalah integrasi fungsional antara berbagai sektor kegiatan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya bisa pula dikembalikan pada persoalan persaingan dalam hal pembagian imbalan ekonomik, tetapi lebih terlihat sebagai kesatuan okupasional daripada kesatuan-

kesatuan teritorial. Masalah ini dapat pula berkembang menjadi masalah yang gawat yang (apabila menimbulkan situasi disfungsional di dalam sistem) akan pula bisa memecah kesatuan bangsa.

4. Masalah konflik antar golongan kaya dan golongan miskin. Sebagai akibat masalah 2 dan 3. Di Indonesia masalah ini seringkali diwarnai pula oleh warna-warna rasial khususnya apabila masalah itu timbul dalam persoalan hubungan antara sektor-sektor kegiatan ekonomik. Berbeda dengan masalah konflik antar daerah dan konflik antar kelompok okupasi ketegangan dan konflik yang terjadi antara si kaya dan si miskin itu sebenarnya merupakan konflik antar kelompok-kelompok yang tak berorganisasi. Dengan demikian konflik-konflik itu jarang bersifat terbuka dan hanya terpendam bagai api dalam sekam (untuk sekali-kali menyala keluar). Akan tetapi justru karena itulah konflik-konflik tersebut (apabila sampai terjadi) akan sulit untuk segera dapat dideteksi, diidentifikasi dan dikendalikan.

11. Konflik Horizontal Di Jawa Timur

- a. **Konflik horizontal** dipahami sebagai pertentangan yang bertalian dengan suku, etnik, dan agama. Di Jawa Timur konflik horizontal telah terjadi berulang kali, misalnya Peristiwa 9696 (kerusuhan Surabaya Utara, 9 Juni 1996), dan peristiwa 1010 (kerusuhan Situbondo, 10 Oktober 1996), dan pembantaian dukun santet.

Berbeda dengan konflik vertikal yang menggunakan parameter kuantitatif, seperti ekonomi,

yang lebih mudah dikompromikan; maka konflik horizontal dengan parameter kualitatif seperti suku, etnik, dan agama, lebih sulit untuk dikompromikan. Persoalan ekonomi lebih memungkinkan untuk dicari titik-temu lewat proses tawar-menawar, karena ukurannya kuantitatif dan jelas. Sedangkan persoalan suku, etnik, dan agama, sulit dicari titik-temu, karena *public good* bagi satu komunitas artinya menjadi *public bad* bagi komunitas lainnya. Konflik horizontal ini yang acapkali muncul karena para pihak merasa terancam seperti bola salju yang bergulir, semakin lama semakin besar dan sulit dihentikan.

- b. Konflik horizontal secara fisik ataupun simbolik bisa terjadi **inter dan antar masyarakat**. Contoh konflik horizontal inter masyarakat adalah ketika orang Madura di Pulau Madura menyebut orang Madura di daerah tapal kuda dengan sebutan *pendalungan*, dan sebaliknya, ketika orang Madura dari daerah tapal kuda menyebut pulau ke Pulau Madura dengan istilah *toron*. Sebutan tersebut terasa menyakitkan bagi yang memahaminya.

Konflik horizontal antar masyarakat seperti terjadi di Situbondo, disamping ada persoalan politik, juga karena terjadi segregasi sosial. Orang Tionghoa, pedagang, beragama Kristen : terpisah dari orang Madura, petani/nelayan, beragama Islam (NU); terpisah dari orang Jawa, pegawai negeri, beragama Islam (Muhammadiyah). Tidak ada *cross-cutting affiliation*.

Kenyataan berbeda terjadi di Sumenep. Pengalaman sejarah, ikatan kultural, jaringan perekonomian telah mempertautkan orang Madura dan orang Tionghoa di Sumenep.

- c. Beberapa laporan penelitian (Santoso, 2002; Inpedham - LIN, 2003) membedakan konflik horizontal di Jawa Timur berdasar segmentasi sosio-kultur dan wilayah geografis : a. Perkotaan (misal: Surabaya), b. Mataraman (misal: Madiun, Ngawi, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Blitar), c. Tapal kuda (misal: Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Jember). Kesimpulannya, konflik horizontal lebih sering terjadi di daerah tapal kuda.

Dari penelusuran sejarah tampak bahwa daerah **tapal kuda** merupakan ajang konflik horizontal. Misalnya, ketika Islam masuk Pulau Jawa lewat Demak (1293) “hanya membutuhkan waktu 30 tahun” untuk menyebarkan ajarannya di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur. Daerah tapal kuda membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi Islam. Selama berabad-abad daerah tapal kuda (Pasuruan, Panarukan, Situbondo) tercatat dalam sejarah menjadi ajang konflik horizontal. Sejarah juga menunjukkan bahwa masyarakat tapal kuda adalah komunitas yang sangat fanatik terhadap agama yang dianutnya, sekaligus memiliki kecenderungan nativis, yakni enggan menerima pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya mereka yang terbentuk oleh latar sejarah mereka yang penuh diwarnai pertentangan

inter dan antar agama serta rekayasa politik. Konflik horizontal tampaknya begitu menyebar dan mengakar dalam kehidupan masyarakat daerah tapal kuda.

- d. Konflik horizontal juga tidak lepas dari peran negara. Masyarakat butuh akses untuk mempengaruhi kebijakan negara, karena nasibnya ditentukan negara. Seandainya akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka tersedia, maka masyarakat akan menempuh mekanisme tersebut. Namun sistem politik Indonesia tidak seperti itu. Akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka nyaris tidak ada, oleh karena itu masyarakat berupaya cari akses tersebut walaupun inkonstitusional, ilegal sporadik dan tertutup. Reformasi yang digulirkan mahasiswa ternyata hanya mengubah mekanisme yang tertutup - *hidden transcript* - menjadi terbuka, tetapi tetap sulit memproses lewat jalur konstitusional, legal, dan institusional. Jadi kekerasan bukan berakar dari massa saja atau negara saja, tetapi ada proses dialogis antara negara dan massa.

Negara adalah satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan lewat aparaturnya, seperti militer, polisi, dan peradilan. Kekerasan dilegitimasi negara untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti dinyatakan Arendt, kekerasan akan muncul bilamana kekuasaan sedang ada dalam bahaya, yang berarti bahwa meskipun kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan, namun kekerasan tidak mampu menciptakan kekuasaan. Pada awalnya kekerasan tersebut langsung

dilakukan oleh negara. Namun dengan merebaknya isu hak asasi manusia, maka negara (rezim) tidak cukup menggunakan aparaturnya sebagai pemaksa, tetapi juga melibatkan masyarakat. Benih kekerasan telah merebak di masyarakat lewat pengorganisasian kriminal, bukan organisasi kriminal. Negara telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan kekerasan.

Sistem politik demokrasi mengenal mekanisme penyelesaian konflik yang jelas lewat dukungan suara. Di Indonesia, mekanisme tersebut digunakan pada saat pemilihan umum. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ada pelembagaan politik yang mampu mengelola konflik antar elit dan belum ada kriteria yang jelas tentang konflik elit. Salah satu akibat dari konflik antar elit adalah merebaknya kekerasan yang melibatkan para pendukung. Kekerasan akan semakin intens dan sulit dikelola apabila pihak yang terlibat konflik mempolitisir ideologi dan atau agama.

- e. Ada empat hal yang mempertautkan konflik horizontal, kekerasan, politik dan agama. **Pertama**, agama semestinya tidak menimbulkan konflik horizontal dan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan konflik horizontal dan kekerasan apabila berhubungan dengan faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama prophetis (nabi), seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan

kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama prophetis cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasi merupakan salah satu alasan yang mendasari konflik horizontal dan kekerasan. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Kekerasan telah dibingkai “agama” sebagai ekspresi keinginan untuk menetralsir dosa. **Kedua**, agama telah mengalami simplifikasi, politisasi, mobilisasi, dan dibuat transenden sehingga terjadilah komunalisasi politik-agama : “agama bernilai lebih tinggi dibanding agama lain dan hukum nasional/internasional”. **Ketiga**, orang beragama punya afiliasi agama dan juga kepentingan politik, sehingga bisa terjadi pertentangan dengan komunitas agama lain di wilayah geografis yang sama. **Keempat**, ambivalensi agamawan sebagai *peacemaker* sekaligus *violencemaker*.

- f. Konflik horizontal merupakan **tragedi kemanusiaan**. Lihat saja Peristiwa 9696, Peristiwa 1010, pembantaian dukun santet, dan sejenisnya. Korbannya - biasanya dari kalangan minoritas - acapkali orang-orang dari lapisan bawah, tidak berdosa, atau sama sekali tidak tahu menahu dengan persoalan yang diperjuangkan oleh para pihak yang berkonflik.

Pertautannya dengan manusia dan kemanusiaan menyebabkan konflik horizontal harus

dikaji secara holistik. Dari jumlah pelaku, misalnya, konflik horizontal bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok yang terorganisir. Dilihat dari pendanaan, bisa saja konflik horizontal dibiayai oleh para pihak sendiri atau melalui aliran dana bank dari pihak lain, dari dalam atau luar komunitas yang bersangkutan.

Bertumpu pada gagasan di muka,antisipasi terhadap konflik horizontal haruslah dilakukan lewat kerjasama yang baik dari semua elemen manusia. Agama bisa saja menjadi sentra kerjasama tersebut. Namun perlu dicatat bahwa agama akan berhasil menyelesaikan konflik eksternal dengan resolusi non-kekerasan, jika konflik internal agama diselesaikan dengan cara yang non-kekerasan pula. Pada kenyataannya agama cenderung melakukan paksaan dan kekerasan terhadap para pembangkangnya. Sejarah telah membuktikan bahwa agama belum lulus dalam resolusi non-kekerasan menghadapi pembangkangnya sendiri.

Ambivalensi adalah kata kunci untuk memahami konflik horizontal. Ambivalensi telah terjadi dalam pemahaman kehidupan suku, etnik, dan agama. Pemahaman agama yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian kenyataannya berhadapan dengan pemahaman agama yang menjadi sumber kekerasan. Perilaku agamawan yang memiliki wajah ganda, yaitu di satu sisi bertindak selaku *peacemaker*, namun pada sisi lain berubah menjadi *violencemaker* perlu dikikis. Ambivalensi para pelaku kekerasan terhadap nilai internal dan eksternal dan saling

keterkaitannya dengan konflik horizontal dalam ranah ketidakmenentuan antara hukum dan kekerasan. Yang mengganggu perasaan serta menjadi landasan pemikiran menggunakan cara kekerasan adalah parsialitas mereka terhadap komunitas mereka sendiri, dan ketidakpedulian mereka terhadap perasaan komunitas lain.

Sudah saatnya agama yang satu bekerjasama dengan agama lain yang memiliki komitmen sama terhadap keadilan, kebebasan, dan perdamaian, serta kesediaan untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan prinsip moral dan martabat manusia. Setiap agama memiliki tanggungjawab yang sama untuk memerangi konflik horizontal.

Dalam ikhwal konflik horizontal, ada pihak dianggap sebagai penyerang. Mereka sangat terlatih dalam praktek kekerasan, yang selalu siaga untuk menggunakan kekerasan, dan dianggap sebagai pahlawan oleh komunitasnya. Oleh karena itu langgengnya konflik horizontal dan kekerasan bukanlah konflik alami dan terelakkan. Kita bisa menyeleksi tempat dimana konflik horizontal serta kekerasan terjadi dan tidak terjadi di masa lalu, membandingkannya berdasarkan berbagai kriteria demografis dan ekologis, dan kemudian membuat hipotesis atau sekumpulan hipotesis untuk memperkirakan mengapa konflik horizontal serta kekerasan terjadi di beberapa tempat tetapi tidak ditempat lain.

3

Perdamaian

Perdamaian atau resolusi konflik dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Tidak ada suatu cara yang dapat menyelesaikan semua konflik. Setiap konflik punya keunikan tersendiri.

Resolusi konflik yang lazim dilakukan ialah :

1. Emil Durkheim menyatakan masyarakat yang terikat secara tali temali (*Cross-Cutting Affiliation*) cenderung damai dan punya daya tahan terhadap konflik. Sedangkan masyarakat yang tidak ada *cross-cutting affiliation* cenderung terlibat dari suatu konflik ke konflik lainnya. Contoh, masyarakat Sumenep dan Situbondo yang mayoritas suku Madura. Di Sumenep hampir tidak terjadi konflik, karena ada ikatan tali temali antara orang Madura dan orang Tionghoa. Secara historis, nenek moyang mereka campuran Madura dan Tionghoa. Putri Koneng, ibu dari Jokotole, adalah orang Tionghoa. Di Keraton Sumenep sampai sekarang masih bisa dilihat ukiran naga dan burung phoenix, artinya ada pertalian budaya Madura dan Tionghoa. Sebaliknya di Situbondo acapkali terjadi konflik (pembangunan jalan Anyer-Panarukan, Perang Blambangan, kerusuhan 10 Oktober 1996, dsb). Hal ini disebabkan Situbondo tidak ada *cross-cutting affiliation*. Ada orang Madura, Islam NU, petani atau nelayan. Ada orang Jawa, Islam Muhammadiyah, pegawai negeri. Ada orang

Tionghoa, Kristen, pedagang. Jadi ada segregasi etnis/suku, agama, dan mata pencaharian.

Menurut Durkheim, masyarakat yang memiliki *cross-cutting affiliation* akan berlanjut pada *cross-cutting loyalties*. Pada gilirannya masyarakat seperti ini akan berada dalam situasi damai.

2. Menurut Max Weber, agama seharusnya menjadi sentra / pusat perdamaian. Namun di dalam agama terdapat unsur yang disebut *magics / politics* yang memanipulasi perintah Tuhan untuk kepentingan manusia. Agama menjadi salah satu sumber konflik, karena semua agama hanya belajar dari “broker” agama, bukan langsung dari Tuhan. Agama sebenarnya telah gagal menyelesaikan konflik. Agama hanya akan bisa menciptakan perdamaian apabila agama tersebut bisa meredam konflik dalam agamanya sendiri tanpa kekerasan. Bahkan pemuka agama yang seharusnya menjadi *peacemaker*, malah menjadi *violencemaker*. Agama bisa menjadi resolusi jika agama berbicara tentang hubungan horizontal. Misalnya integritas, demokrasi, hak asasi manusia, dst. Agama dalam batas-batas tertentu bisa membuat jejaring untuk perdamaian.
3. Apabila terlibat dalam konflik, kita cenderung menyalahkan pihak lain / *the others*. Padahal menurut Jacques Derrida, konflik sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri / *the self*. Jadi perdamaian harus bermula dari diri kita sendiri. Ada kecenderungan dalam suatu konflik tingkat rasionalitas para pihak menurun. *The self* dan *the others* sama-sama kurang rasional.

4. Karl Armstrong menyatakan perdamaian berkaitan dengan *compassion*. Kita harus belajar berbelas kasih sejak dini. Kita harus menepi diri kita, apa yang membuat diri kita sakit, jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Resolusi konflik atau perdamaian dimulai dari diri kita sendiri.
5. Perdamaian dalam perspektif Rene Girard dapat diciptakan lewat kultur tanpa dendam (sikap tidak menyimpan dendam), tanpa kambing hitam (menyalahkan pihak lain), tanpa ketakutan, dan tanpa ancaman kekerasan. Perspektif ini diterapkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Mandela yang pernah di tahan puluhan tahun oleh lawan politiknya, namun ketika bebas dan terpilih jadi pimpinan / Presiden di Afrika Selatan, Mandela tidak membalas dendam kepada lawan politiknya. Mandela bisa menyelesaikan konflik di Afrika Selatan dengan kultur tanpa dendam. Adalah hal yang pantas Mandela memperoleh Nobel Perdamaian.
6. Dalam *social capital*, perdamaian di masyarakat dapat tercipta lewat memperkuat modal sosial berupa kepercayaan, jaringan dan norma sosial. Menurut Francis Fukuyama, masyarakat yang dibangun atas dasar kepercayaan (seperti Italia Utara) lebih mudah membangun perdamaian, pemerintah yang bersih, dan partisipasi sosial yang tinggi. Sebaliknya masyarakat yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan (seperti Italia Selatan) sarat dengan konflik, pemerintahan korup, dan partisipasi sosial yang rendah.

Robert Putnam dalam buku *Bowling Alone* menjelaskan pentingnya jaringan pengikatan (*bonding social capital*) dan jaringan pen jembatanan (*bridging social capital*). Jaringan pengikatan berupa ikatan primordial seperti kesamaan suku, etnis dan agama. Sedangkan jaringan pen jembatanan berupa hubungan antar komunitas yang berbeda. Memperkuat jaringan-jaringan sosial ini diyakini akan mempermudah perdamaian.

Akhirnya, norma sosial juga bisa memperkuat modal sosial. Norma sosial yang mendukung perdamaian haruslah dipertahankan, dan sebaliknya norma sosial yang mengarah kepada perpecahan harus dihindari bahkan ditiadakan.

Agama Sebagai Fondasi Etika untuk Mengatasi Kekerasan^{*)}

Dunia agama sangat bervariasi dan berhubungan dengan fenomena kekerasan dalam banyak cara. Karena itu, tidak ada jawaban sederhana atas pertanyaan bagaimana agama bisa menjadi dasar etika untuk mengatasi kekerasan. Bahkan ada pertanyaan sebelumnya: apakah agama-agama ingin mengatasi kekerasan? Tuhan, *deities* atau dewa seringkali tampak sebagai kekuatan yang membinasakan atau menghancurkan dan mereka sering kali menghasut umatnya untuk membunuh orang lain. Sehingga Yahweh memerintahkan orang-orangnya yang dia keluarkan ke Mesir agar membunuh tujuh orang di Palestina (Deut 7.1-26), dan dalam Bhagavadgita, batara guru Krishna memerintahkan Arjuna dengan tegas, yang sebenarnya tidak ingin melawan kaum kerabatnya sendiri, agar berperang: 'Jika kamu kalah, kamu akan memenangkan langit. Tetapi jika kamu menang, kamu akan memperoleh bumi. Karena itu, wahai anak Kunti, berperanglah dengan gagah' (II, 37). Dalam prakteknya, ada banyak perang 'suci' dalam semua agama, dan gagasan-gagasan serupa mempengaruhi dunia Barat belakangan ini. Apakah agama-agama yang para pemeluknya menemukan kepercayaan

^{*)} Resitasi berdasar tulisan Raymond Schwager, *Religion as the Foundation of an Ethic of Overcoming Violence*, dalam Wim Beuken and Karl - Josef Kuschel, *Religion as a source of Violence*, London, SCM Press, 1997, P.P.119-128

spiritual tertinggi pada saat yang sama mendorong agar umatnya melakukan kekerasan?

1. Tatanan Publik/Ketertiban Masyarakat

Apakah agama-agama dianggap sebagai kekuatan untuk mengadakan perdamaian atau sebagai kekuatan yang agresif umumnya bergantung pada bagaimana anda memperkirakan kemampuan manusia untuk hidup bersama secara damai. Jika anda percaya kemampuan ini cukup besar, maka anda spontan akan mengkaitkan banyak tindak kekerasan dan peperangan dengan kekuatan gelap yang dengan kekuatan ini pria dan wanita yang suka perdamaian disesatkan. Dalam hal ini, agama-agama memiliki kekuatan besar yang mengancam. Pandangan demikian mengilhami Pencerahan Eropa. Setelah terjadi pengalaman yang amat pahit akibat peperangan agama, orang-orang kemudian berpikir bahwa kiranya sangat penting untuk menekan agama-agama dari kehidupan publik agar terbit suatu perdamaian. Banyak bentuk nasionalisme berlangsung dalam agama, dan sejak itu kekejaman demi kekejaman dilakukan atas nama alasan (*in the name of reason*), atas nama nasionalisme rasis atau atas nama Komunisme ateistik yang melampaui kekejian agama sebelumnya.

Lama sebelum Pencerahan berlangsung, ada permulaan cara berpikir masyarakat yang tidak lagi ingin mendasarkan tatanan publik (*public order*) pada agama. Christoph Meier meneliti asal-usul pemikiran ini di Yunani Kuno; dia menunjukkan bagaimana pada waktu itu sudah ada wawasan-wawasan di Aeschylus yang berhubungan erat dengan berbagai peristiwa politik pada masa itu dan karena itu

lebih realistik daripada teori politiknya Plato atau Aristoteles. Akan tetapi, dalam tragedi, dewa-dewi yang jiwanya dipenuhi rasa dendam menjadi damai dengan kondisi berikut:

Persahabatan (*philia*) di rumah dan bermusuhan di luar. Reprositas persahabatan dimaksudkan untuk menggantikan repositas pembunuhan. Tidak ada lagi musuh di rumah, tetapi terjadi permusuhan dengan orang luar (*outsiders*): pembagian baru antara kawan dan lawan terjadi berkenaan dengan polis (kota), suatu pergeseran dalam konstelasi kawan-lawan. Bagaimana polis ini menyatukan lawan dan kawan ini agar tidak menjadi bermusuhan.

Pandangan ini tidak sejalan dengan pengalaman Yunani kuno; pengalaman Yunani sedikit berubah bahkan pada sekarang ini. Tatanan pada masyarakat manusia tidak pernah *taken for granted*. Negara-negara selalu menjaga ketertiban dengan monopoli kekerasan-melalui para prajuritnya/tentara, sistem peradilan dan polisi-dan dalam situasi yang kritis, negara-negara itu mengadakan perang pada musuhnya atau membujuk musuhnya agar mau bersatu dengan penduduknya yang lebih baik. Karena itu, pengalaman setelah Pencerahan bahwa penekanan/ pengekangan agama dari kehidupan masyarakat tidak menghasilkan perdamaian yang lebih baik tidaklah mengejutkan. Masalahnya terletak di wilayah yang lebih dalam. Tetapi peran apa yang bisa dimainkan agama-agama dalam menghadapi fakta politik ini? Apakah pengaruh agama terbatas untuk memperkuat motif tindakan manusia yang tidak bergantung pada agama,

menurut arah agresivitas atau upaya untuk mewujudkan perdamaian?

2. Penahanan Kekerasan Agama

Mengenai latar belakang pengalaman panjang bahwa persatuan di antara umat manusia dapat diwujudkan dengan paling mudah dengan memberi mereka musuh bersama (*common enemy*), Rene Girard mengembangkan sebuah teori yang tepat tentang hubungan antara agama dan kekerasan. Menurut pandangan ini, agama masyarakat dan tatanan sosial menjadi milik bersama masyarakat suku kuno (sebelum terbentuknya negara). Karena manusia adalah makhluk bernalafsu, kekerasan tidak bisa diatasi dengan alasan/nalar semata. Tetapi kekerasan itu biasanya berkurang dengan sendirinya ~ dan inilah poin penting untuk Girard. Gangguan-gangguan dan agresi kolektif bisa berubah menjadi tindakan bersama untuk melawan satu kekuatan, dan perdamaian bisa diperoleh kembali dengan memakan korban (mekanisme kambing hitam). Proses ini berlangsung tidak kentara karena ketika timbul kekerasan, orang-orang kehilangan dirinya dalam proyeksi yang membingungkan dan ekstasi. Menurut cara inilah negara yang sakral muncul. Semua agresi kolektif terhadap satu korban dikumpulkan bersama, dan kemudian semua proyeksi tentang korban dikonsentrasikan. Karena itu, korban tampak bagi massa yang sedang dipenuhi euforia sebagai inkarnasi/perwujudan semua kejahatan, tetapi pada saat yang sama tampak sebagai pembawa penyelamatan yang 'ajaib', karena melalui pembunuhan terhadap satu korban yang tentu saja sangat sulit dijelaskan kepada mereka yang terlibat di dalamnya, maka agresi resiprokal menjadi sirna dan bahaya

dapat dihindari. Pengalaman massa yang saling berlawanan ~ kekerasan ekstatik dan perdamaian yang tiba-tiba ~ mentransformasi korban dan membuat korban tampak terkutuk dan pada saat yang sama memperoleh keuntungan, yaitu sakral/ suci.

Menurut pandangan ini, di masyarakat pra-negara (sebelum ada negara), agama masyarakat tidak berfungsi untuk mengatasi kekerasan tetapi untuk menahan kekerasan itu. Masyarakat didamaikan melalui pengalihan agresi keluar dan melalui pembagian antara yang sakral dan duniawi (*profane*). Teror sakral yang mensyaratkan adanya peringatan kembali akan bahaya masa lalu dimaksudkan untuk mencegah *inner sphere* (lingkungan sendiri) dari kembalinya ke ancaman dan untuk menjaga kesakralan, yaitu mengekang agresivitas yang keliru, melalui regulasi tabu. Disamping itu, dalam pengorbanan ritual, euforia (*original excitement*) dan pelepasannya dibangkitkan kembali secara teratur dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga bisa memiliki efek murninya.

Penahanan kekerasan agama (melalui mekanisme kambing-hitam, sakralisasi, regulasi tabu dan pengorbanan ritual) sangat penting artinya dalam masyarakat pra-negara. Hanya melalui cara inilah masyarakat yang belum memiliki otoritas dengan monopoli kekerasan dapat dicegah dari kehancuran. Tetapi dengan 'ditemukannya' negara, terjadi perubahan yang pasti, meskipun sebagian besar perubahan ini berlangsung secara *step-by-step*. Tanggung jawab atas ketertiban masyarakat sekarang diemban oleh otoritas/penguasa sentral, yang dapat menggunakan kekuatan menurut cara yang sah dan

harus menekan semua bentuk kekerasan. Meskipun oposisi antara kekerasan sakral dan kekerasan profan punya kedudukan sangat penting di masyarakat pra-negara, namun bagi negara, perbedaan etika dan politik antara kekuatan yang *legitimate* dan *illegitimate* menjadi paling signifikan. Menurut cara ini, agama-agama dibebaskan dari urusan ketertiban masyarakat secara langsung dan karena itu ~ dengan memanfaatkan pengalaman dari sifat ketuhanan ~ mampu berkembang secara mandiri. Pada saat yang sama, agama-agama umumnya menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan aura sakral kepada otoritas negara, yang memperkuat perbedaan antara kekerasan yang sah dan kekerasan yang tidak sah dan karena itu memerlukan tindakan kekerasan yang sah.

Meskipun Krishna menyuruh Arjuna berperang, Bhagawatgita tidak menyerukan berperang. Sebaliknya, masalah yang baru saja digambarkan ini menemukan ekspresi klasik di dalamnya. Bhagawatgita mengajak agar orang-orang bersatu dengan dunia ilahiah dan mencapai perdamaian yang sejati. Tetapi Bhagawatgita menganggap perang sebagai sesuatu yang tidak bisa dielakkan demi ketertiban masyarakat dan untuk menghukum orang-orang yang berbuat salah, dan karena itu kitab ini mengharapkan panglima perang (dan prajuritnya) melakukan pembedaan kedalam secara ekstrim (*inward distinction*). Mereka berperang untuk menjalankan tugas sosialnya, tetapi pada saat yang sama untuk membebaskan diri dari semua nafsu angkara. Mereka harus mengatasi hasrat yang bergolak dengan hebat demi mengharap kemenangan dan demi perasaan benci dan permusuhannya kepada para lawan dalam hati mereka. Perbedaan yang halus

antara tugas sosial dan tugas spiritual ini menghasilkan tuntutan yang tinggi dan superhuman, tetapi perbedaan demikian ditemukan dalam semua agama yang lebih universal. Misalnya, Israel sering diperingatkan dengan keras oleh para nabi agar mengharapkan penyelamatannya (*salvation*) bukan dari kekuatan militer tetapi hanya dari keyakinan mutlak kepada Yahweh (Yahudi), dan agar berperang dengan gagah berani. Akan tetapi, perbedaan antara tugas sosial dan tugas spiritual bisa saja menyesatkan dan menyebabkan banyak kesalahan. Bukannya mengatasi rasa benci dan permusuhan, dalam kasus tersebut, inspirasi agama cenderung menaikkan perasaan kebencian dan permusuhan ini, bahkan lebih tinggi. Karena itu, agama harus senantiasa menugaskan diri sendiri bagaimana ia mampu memerangi diri sendiri terhadap godaan-godaan tersebut dan perilaku yang bagaimana yang hendak ia serukan kepada para pemeluknya dalam situasi yang serba sulit dan kritis.

3. Memberikan Rasa Kasih-sayang dan Penanganan Kekerasan

Apakah agama-agama hanya berfungsi untuk membendung wabah kekerasan yang berbahaya sejauh mungkin melalui mekanisme sakral dan melalui pembedaan etika dan politik, atau adakah di dalamnya suatu kekuatan yang benar-benar membantu mengatasi kekuasaan yang destruktif? Ketika agresi punya pengaruh yang sangat besar pada emosi manusia dan pada saat yang sama berkaitan dengan perasaan beragama dan perjuangan seksual, masalah mengatasi kekerasan bahkan terus berlanjut ke wilayah tengah agama. Sehingga renungan berikut harus meninggalkan

sejarah dari perspektif agama dan secara khusus menuju ke pandangan agama Kristen.

Jesus sangat aktif dalam tradisi Yahudi, karena dengan adanya Yesus, tradisi Yahudi menjadi cukup menentukan bagi semua permusuhan yang kuat kepada Tuhan yang harus diatasi. Keyakinan kepada Yahudi mengenal dua cara dalam mencapai hal ini: penghancuran musuh dan/atau konversinya (cf. Zeph. 3.9f. Mal.1.11; Isa.60.1-5). Wawasan mendalam mengenai konversi ini diberikan dengan nyanyian Hamba (*Servant songs*), yang melalui berbagai peran dramatis menggambarkan bagaimana Tuhan mengilhami semua rakyat Israel atau seorang Nabi untuk berperilaku lain dalam menghadapi bahaya yang mengancam dan memulai proses yang melibatkan lainnya. Dalam nyanyian yang pertama, Tuhan berfirman/bersabda sendiri dan menyatakan bahwa Dia memberikan semangat kepada abadinya, sehingga dia bekerja tanpa lelah, tidak menangis, tidak merasa sakit dan tidak mengeluh (Isa. 42.1-4). Kemudian, hamba berkata pada diri sendiri dan mengakui bahwa Tuhan maha berdiri sendiri dan maha mendengar segala sesuatu sehingga hamba tidak mampu mempertahankan diri dan menyerahkan diri kepada musuh (Isa.50.4-6), Akhirnya, orang-orang berbicara siapa yang mengamati hamba dan mengalami perubahan. Pertama mereka berpikir bahwa Tuhan sendiri mencintai hambanya yang putus asa (Isa 53.4). Tetapi kemudian mereka menyaksikan perilaku aneh hamba, yang bisu seperti domba yang disembelih, dan melalui konversi mereka memperoleh perspektif yang benar-benar baru. Sekarang mereka menemukan bahwa kekerasan terhadap hamba/abdi bukan berasal dari Tuhan tetapi berasal dari umat manusia sendiri

(Isa.53.5-7). Mata mereka ~ seperti mata kawan Job ~ mula-mula dibutakan oleh teologi suci lama yang menurutnya kekerasan terhadap korban yang melanggar ketertiban masyarakat merupakan kekerasan ilahiah (*divine violence*). Akan tetapi, setelah konversi mereka, akhirnya mereka mengakui bahwa segala sesuatunya sangat berbeda. Mereka menyerahkan dosanya kepada Tuhan dan memikirkan kekerasan ilahiah bilamana mereka dan lainnya melakukan agresinya. Bagi mereka, konversi bukan semata soal etika tetapi menyebabkan mereka mengubah seluruh pandangan dunianya.

Jesus menjalani nasib/takdir yang memiliki persamaan dengan nasib hamba yang terpilih dan disayangi. Seperti hamba itu, yang paling penting bagi dia, telinganya, seluruh kesadarannya terbuka pada hal baru; dia merasakan aura napas lahiah dan mendengar kata-kata cinta yang menganggap dia sebagai anak laki-laki (Mark.1.9-11). Berkat pengalaman ini, dia menjadi mampu menyembuhkan dan membebaskan orang-orang yang dipenjara oleh kekuasaan yang penuh kekerasan (Mark 5.1.-17; 9.14-29). Dia menyatakan begitu dekatnya Tuhan yang mengampuni musuhnya, para pendosa, dengan mengasihi mereka dulu, dan mengundang mereka ke jamuan bersama. Menurut keterangan ilahiah ini, dia menyeruhkan para pendengarnya agar membalas kejahatan dengan kebaikan: mencintai para musuhnya dan berbuat baik kepada mereka, sebagaimana Tuhan telah menerbitkan sinar terang demi kebaikan (*good*) dan kejahatan (*evil*) (Matt.5.43-48). Mereka harus menetralkan dan menguasai semua pendekatan pada kejahatan dengan tindakan-tindakan yang menakjudkan: 'Tetapi jika seorang

memukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu; dan jika seorang menuntut kamu dan meminta bajumu, biarkan dia mengambil jasmu' (Matt.5.39). Bilamana perilaku demikian diperluas, kekerasan akan teratasi sampai ke akar-akarnya, dan masyarakat yang damai dan berkeadilan, kerajaan Tuhan di muka bumi, akan mulai berkembang dengan baik.

Akan tetapi, meskipun ada kekuatan penyembuhan dan pembebasan, kegiatan Jesus menimbulkan perlawanan. Pertama, semua lawan-lawannya berusaha memasang banyak jebakan untuknya (masalah pajak, para wanita yang berzina, dll). Dengan imajinasi kreatifnya, Jesus menemukan jalan keluar yang mengejutkan untuk mengatasi situasi kritis, dan dia mampu membuat berbagai masalah membahayakan yang semua menimpa dirinya sekarang mendera para musuhnya dalam bentuk peringatan. Meski demikian, reaksi superior dan kreatif Jesus justru memperkeras perlawanan, dan hal ini menyebabkan dia membalas lawan-lawannya dengan pernyataan keputusan (*proclamation of judgement*). Dia menunjukkan betapa hebat kekuatan kebohongan dan kekerasan menimpa orang-orang dan memperlihatkan akibatnya. Tetapi dalam melakukan hal ini pada saat yang sama pernyataan keputusan tersebut menjadi tidak jelas. Apakah pesan Jesus perihal kebajikan sebelumnya sebagai salah satu sisi dari dua citra Tuhan, sebagaimana citra yang diperlihatkan oleh perumpamaan keputusannya, atau apakah dia memahami keputusan menurut cara yang sangat berbeda, sebagaimana diperlihatkan oleh banyak keterangan yang halus, yaitu pengungkapan proses yang dengan proses ini orang-orang menilai orang lainnya dan sehingga melanjutkan spiral kekerasan tiada akhir?

Pernyataan keputusan ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan, karena ia tidak menghasut orang-orang tetapi menghasilkan konflik tanpa akhir. Pernyataan keputusan itu memprovokasi lawan-lawan Yesus untuk membuka kekerasan dan memaksa Yesus agar mengambil pendapat yang tegas: apakah dia akan meminta Tuhan agar menghukum para musuhnya dengan kekuatan atau apakah dia mengikuti jalannya keputusan tersebut hingga akhir. Dia memberikan jawaban dengan sedikit kata-kata dan dengan lebih banyak tindakan. Dia tidak membalas kekerasan itu, atau juga tidak meminta agar Tuhan membalas kekerasan tersebut, sebagaimana yang diminta oleh Jeremia dalam situasi serupa (Jer.15.15). Dalam doanya kepada Tuhan dan dalam perjuangannya dengan derita yang mendalam atas kematiannya sendiri, dia meradikalisasi atau memperkeras pesannya perihal keunggulan kebajikan sehingga pesan itu menjadi dipraktekkan dalam wujud non-kekerasan tanpa syarat: di palang salib dia berdoa untuk musuh-musuhnya dan kemudian mentransformasi agresi mematikan yang menyimpannya menjadi cinta-kasih. Dalam melakukan hal ini, dia mentransformasikan semua gagasan pengorbanan kuno menjadi pengorbanan yang benar-benar baru. Dia mampu melakukan hal ini karena Tuhan telah membisiki telinganya setiap hari dan karena dia telah mengalami hal ini sebagaimana Tuhan kehidupan dan kematian dapat membangkitkan kehidupan yang baru.

'Mengorbankan' kehidupan seseorang dalam memerangi dan membenci musuh tidak memerlukan begitu banyak kekuatan manusia, sebagaimana yang terjadi pada peperangan. Tetapi apakah kita sebagai manusia punya

kekuatan untuk mengambil jalan cinta-kasih dalam menghadapi kekerasan langsung? Para pengikut Yesus mengupayakan jalan cinta-kasih ini dan pada mulanya gagal. Meskipun mereka dekat dengan Yesus, ada banyak hal yang belum mereka pahami pada diri Yesus, dan pada saat yang kritis, mereka merasa sangat takut dengan manusia lain, yaitu sesama umat Yesus. Dunia kegelisahan/ketakutan dan mekanisme kekerasan yang cepat menular lebih kuat dibanding kemauan kebajikan mereka dan mendorong mereka menjadi penghianat. Perilaku yang sangat berbeda dari perilaku Yesus menimbulkan banyak kerugian, tetapi pada saat yang sama menyebabkan mereka mencurahkan air mata kesedihan (cf. Matt.26.75). Mereka dibebaskan dari perasaan frustrasi dan putus asa ini dengan kebangkitan Yesus. Perdamaian *Easter* dan pengampunan atas kurang kuatnya iman mereka dijanjikan kepada semua orang yang telah gagal.

Tuhan yang menyingkapkan wujud dirinya dalam bentuk Yesus dan para muridnya menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang membalas kejahatan (*evil*) dengan kebajikan (*good*). Bahkan dalam menghadapi kekerasan yang amat menyakitkan, Dia mengilhami Yesus untuk bertindak tanpa kekerasan, dan dalam menghadapi penghianatan yang terang-terangan, dia mengampuni para murid Yesus dan memberikan kedamaian kepadanya melalui kebangkitan Yesus. Pada saat yang sama, hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa penyelesaian kekerasan bukan terletak pada besarnya kekuatan manusia. Yesus mampu menempuh jalan ini hanya dengan mendengar dan mendengar firman Tuhan Bapanya, dan para muridnya menyaksikan bagaimana ancaman kekerasan dan ketakutan jauh lebih kuat dibanding perbuatan baik mereka dan hanya

pengampunan Tuhan-lah yang membuka masa depan mereka. Karena itu, dari perspektif agama Kristen ini, tidak ada etika untuk mengatasi kekerasan yang dapat menunjukkan subjek yang otonom. Hanya dengan cahaya dan dalam kekuasaan ruh Pantekosta, yang dimaksudkan untuk membuka telinga kita dan hati kita setiap hari, kita akan mampu mengatasi kekuatan/kekerasan yang destruktif. Di sini kita harus dibimbing dengan jalan Yesus dan pengalaman para muridnya. Kedua jalan ini ~ teladan Yesus dan gambaran kelemahan kita ~ dapat menunjukkan kepada kita bagaimana dalam kekuasaan ruh ilahiah, dunia kekerasan yang hebat dengan kekuatannya, yang tidak saja menakutkan tetapi menyeramkan, dapat diterangkan dan dikuasai dengan baik. Untuk itu, kita memerlukan jalan di masyarakat yang orang-orangnya ingin mencapai tujuan yang sama, dan dengan cinta-kasih dan pengampunan, kita akan memiliki pengalaman konkrit berupa cinta-kasih ilahiah. Apakah cinta-kasih dan ruh Pantekosta ini betul-betul efektif di masyarakat dapat dilihat dari apakah orang-orang dikumpulkan dan disatukan melalui pemberian maaf dan penyesalan/tobat dan tidak lagi melalui polarisasi atau pembentukan kubu-kubu diantara musuh. Jika hal ini terjadi, maka pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan gelap kekerasan kolektif akan diungkapkan yang selama ini disembunyikan di bawah tudung sakral sejak permulaan umat manusia (cf. Matt 13.35), dan kelompok anusia mampu bertahan hidup melalui polarisasi di antara para lawan.

4. Etika Untuk Mereduksi Kekerasan

Jika menurut pandangan agama Kristen, kekerasan dapat diatasi hanya dengan bimbingan ruh ilahiah (*divine spirit*)

di sebuah masyarakat yang penduduknya beriman, maka muncul pertanyaan lebih lanjut apakah setidaknya ada suatu etika yang universal untuk mereduksi kekerasan di lingkungan publik dan politik. Merenungkan sejarah dapat melempangkan jawaban atas pertanyaan ini.

Jesus tidak pernah mengklaim punya kekuasaan politik, dan dia tampaknya menganggap politik sebagai hal yang *taken for granted*, yaitu para penguasa menindas rakyat mereka dan yang kuat kuat menyalahgunakan kekuasaannya (Matt.20.25). Menurut *Gospel of John*, dia menjelaskan kepada Pilate bagaimana kerajaan yang ingin dia dirikan sangat berbeda sifatnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak punya abdi untuk memperjuangkan dirinya (John 18.36). Tetapi pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa Pilate punya kekuasaan dari atas.

Masyarakat setelah *Easter* senantiasa mengikuti jalan ini. Masyarakat menahan diri dari kekuasaan politik tetapi mengakui bahwa otoritas negara merupakan pengabdian kepada Tuhan (Rom.13.1-7) - walaupun caranya tentu sangat berbeda dari masyarakat beriman. Karena hal ini merupakan jenis pengabdian tak langsung, maka masyarakat pada mulanya tidak mengembangkan program politik khusus untuk negara dan perbaikan dunia, tetapi berharap bahwa kekerasan yang terjadi di dunia ini segera berakhir (I Cor.7.31). Meski demikian, dengan pernyataan yang dibuatnya, maka tuntutan publik kemudian mengalami konflik dengan otoritas politik. Dalam krisis ini, banyak orang beriman menunjukkan bahwa, seperti Jesus, dalam keyakinannya kepada Tuhan, mereka siap

dan mau mengikuti jalan non-kekerasan untuk mencapai tujuan sebagai shahid/syuhada/martir.

Tuntutan publik/masyarakat juga membuat gereja secara bertahap mengadopsi tanggung jawab publiknya sendiri. Karena itu, pergeseran di bawah Constantine tidak melahirkan hasil yang dikehendaki, meskipun pergeseran itu banyak mengubah sifat-sifat Constantine. Karena para penganut Kristen dalam jabatan politik sekarang menggunakan kekerasan untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan karena perbedaan antara gereja dan negara selama ini tidak terlihat cukup jelas, meskipun perbedaan itu selalu dikedepankan, gagasan-gagasan baru dengan cepat bermunculan meskipun kenyataannya gagasan itu sudah lama. Sebuah teologi politik muncul dari teks Perjanjian Lama tentang keputusan dan kemarahan Tuhan, dari Perjanjian Baru perihal citra keputusan yang dipahami terlepas dari cara Yesus, dan dari kepentingan politik untuk menggunakan kekerasan. Dalam teologi ini, dinamika internal jalan Yesus sangat dilingkupi dan disembunyikan oleh konsepsi sakral lama. Sekali lagi, perbedaan etika dan politik antara kekerasan yang *legitimate* dan *illegitimate* berlangsung menjadi sangat signifikan; disini, kepentingan gereja sering membantu mendefinisikan apa yang *legitimate* dan apa yang tidak. Kiranya amat sulit menilai apakah menurut cara ini ada reduksi kekerasan yang nyata dalam sejarah umat Kristen atau apakah bauran kepentingan gereja dan negara tidak memiliki efek berlawanan; pertanyaan demikian tetap terbuka.

Penilaian kekerasan secara kritis dan modern menjadi sangat penting artinya melalui masalah apa yang

legitimate dan yang tidak *legitimate*. Peperangan di antara agama jelas menunjukkan bagaimana keputusan (*judgement*) ini umumnya bergantung pada prasangka seseorang, dan peperangan lain di antara negara-negara yang beragama Kristen juga bernuansa prasangka. Perkembangan persenjataan modern selanjutnya menghasilkan pengalaman baru, perihal betapa berbahaya dan merusaknya jika kita menggunakan kekuatan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah kekerasan yang destruktif dapat diatasi dengan memadai.

Dalam karyanya *On Eternal Peace* (1795), dalam memandang eskalasi kekerasan dalam Revolusi Perancis, Kant mengandalkan semangat dagang untuk mencapai perdamaian yang lebih baik antara individu perorangan dan orang-orang umumnya. Dalam melakukan hal ini, dia menggunakan sebuah gagasan yang banyak menarik moralist Skotlandia dan pendiri ekonomi politik (Adam Smith, dsb.). Pasar dunia kenyataannya berperan penting dalam soal kekerasan. Diilhami oleh teori Girard, P.Dumouchel dan J.-P. Dupuy mendemonstrasikan hubungan yang tegas antara penahanan kekerasan secara sakral di masyarakat pra-negara dan penahanan kekerasan melalui ekonomi pasar di dunia antar-negara modern. Seperti halnya sesuatu yang sakral berakar dari sesuatu kolektif dan berdiri berdasarkan kekuatan yang ada, demikian juga, harga timbul dari interaksi-interaksi di ekonomi pasar dan para mitra yang ada sedemikian rupa sehingga harga itu menentukan keputusan dan dapat mencegah konflik kekerasan. Walaupun dalam dunia jaman dulu, korban yang mula-mula profan disakralisasi, maka perekonomian pasar modern tidak bertanggung jawab atas

berbagai korban. Tetapi di kedua kasus ini, kita selalu punya sebuah sistem yang memakan korban dan pada saat yang bersamaan membatasi kekerasan: pasar mengekang kekerasan. Bahwa perbandingan antara perekonomian pasar modern dan dunia sakral yang lama menyentuh sebuah titik tertentu juga terbukti dari kecenderungan ke arah mitologikal dalam media modern, yang pada dasarnya milik dunia pasar. Dalam sebuah edisi McLuhan *Understanding Media*, L.Lapham menulis: "Imajinasi posmo modern merupakan produk dari media massa, tetapi sebagai sarana persepsi, imajinasi itu lebih tepat digambarkan sebagai *Pre-Christian* (sebelum ada Kristen).... Sebagaimana dikatakan 30 tahun lampau, percepatan teknologi elektronik membawa kita ke keadaan terbelakang, yaitu cahaya api yang berkelip-kelip di gua jaman neolitik lampau. Periklanan, yang semakin menjadi ciri ritual sakral, juga ada di dunia jaman modern dan jaman neolitik (jaman batu muda).

Apa yang sama-sama dimiliki oleh masyarakat pranegara dan dunia internasional modern, yaitu kedua tidak mengenal otoritas sentral yang dapat membentuk kehidupan publik berdasarkan keputusan musyawarah. Proses penataan diri (*self-organization*) yang melibatkan kekerasan menciptakan suatu ketertiban baik dengan cara menahan kekerasan maupun dengan menyamakan kegiatannya. Dalam dunia demikian, tidak ada tempat yang independen dan sistematis untuk etika politik. Diperlukan etika minimal untuk berfungsinya sistem secara keseluruhan. Setidaknya ada tempat untuk upaya etika yang berkesadaran guna mereduksi kekerasan di ceruk masyarakat tersebut yang tidak langsung terkena tekanan mekanisme internasional.

Situasi ini akan berbeda, dan keputusan etika untuk reduksi kekerasan secara menyeluruh sekali lagi mungkin saja, jika ada otoritas internasional yang dapat menetapkan keputusan baik yang bersangkutan dengan pasar dunia maupun dengan pihak-pihak regional yang berkonflik. Jadi, etika pereduksian kekerasan harus bekerja untuk otoritas dunia dengan monopoli kekerasan. Meski demikian, bukan hanya tradisi banyak budaya menentang hal ini tetapi juga ada ketakutan yang amat sangat dalam dunia kita yaitu kekerasan yang terbuka tetapi jauh lebih terstruktur dengan baik.

Konsekuensinya, etika pereduksian kekerasan menghadapi pertanyaan yang pasti apakah risiko demikian harus diambil. Jawaban atas pertanyaan ini lebih penting daripada etika dan sekali lagi mengarah ke wilayah penting agama. Keputusan yang berisiko mengenai ketertiban seluruh dunia dapat diambil hanya berdasarkan pandangan seluruh dunia. Dari sudut pandang agama Kristen, terdapat banyak alasan untuk memikirkan pengambilan risiko itu. Untuk keyakinan, jelas dunia kita tidak akan pernah sempurna, dan komunitas keyakinan/keimanan juga sudah cukup pasti ia mampu memberikan perlawanan pada tekanan terbuka atau tekanan halus dari ideologi totaliter bahkan dalam dunia yang politiknya lebih seragam, dan pola penyelesaian kekerasan dalam keyakinan akan selalu punya dampak pada masyarakat. Tetapi tidak ada kepastian dalam hal pertanyaan ini berkaitan dengan masa depan. Konsekuensinya, masalah kekerasan memberi kita gambaran yang sangat jelas bahwa kemanusiaan tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Kemanusiaan diserahkan kepada kekuasaan yang sebagian besar berasal dari kemanusiaan itu sendiri tetapi pada saat yang sama

kemanusiaan terlalu banyak ditanyakan. Hanya dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa sajalah, kita akan mampu melihat dengan jernih semua ancaman kekerasan.

Ahimsa :**Jangkauan dan Kekuasaan Nir-Kekerasan
Suatu Kutipan Tulisan Mahatma Gandhi^{*)}**

Pada jaman pemerintahan yang menggunakan kekuatan kekerasan, hampir tidak mungkin bagi manusia dapat menolak supremasi hukum berdasar atas kekuatan kekerasan. Demikian juga saat saya menerima surat tanpa nama, yang menasehati agar saya semestinya tidak ikut campur dengan semakin banyaknya ketidakberadaan kooperasi, meskipun kekerasan semakin marak. Beberapa orang datang dan mengatakan bahwa saya harus merencanakan kekerasan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena akan tiba saat yang tepat untuk mendeklarasikan kekerasan secara terbuka. Mereka meyakinkan saya bila bangsa Inggris tidak akan pernah berhenti melakukan kekerasan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan beberapa orang lainnya memberitahu bahwa mereka percaya bila saya adalah orang yang paling licik yang tinggal di India, karena saya tidak memberikan perhatian serius dan mereka merasa yakin bahwa saya meyakini kekerasan tak ubahnya kebanyakan orang.

Berpegang pada doktrin kekerasan yang dimiliki kebanyakan orang, dan keberhasilan ketidakberadaan

^{*)} Resitasi berdasar tulisan Mohandas K. Gandhi, *Excerpts from The Essential Writings of Mahatma Gandhi*, dalam Manfred B. Steger and Nancy S. Lind, *An Interdisciplinang Reader Violence and its Alternatives*, New York, St Martin's Press, 1999, p.p.293-301

kooperasi bergantung secara prinsip atas ketidakberadaan kekerasan selama masa ketergantungannya, maka pandangan saya dalam permasalahan ini mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Saya sangat berkeinginan menjelaskannya sejelas mungkin.

Saya sangat mempercayai dimana hanya terdapat pilihan antara ketakutan dan kekerasan, maka saya akan menganjurkan kekerasan. Saat putra sulungku bertanya, apa yang mesti dia lakukan pada saat saya diserang pada tahun 1908. Apakah dia seharusnya berlari dan melihat saya dibunuh ataukah dia harus menggunakan kekuatan fisiknya yang dia dapat dan ingin gunakan untuk membela saya. Saya katakan padanya bahwa itu adalah kewajibannya untuk membela saya meskipun dengan menggunakan kekerasan. Bahkan saat saya terlibat dalam *Boer War*, yang dikenal dengan pemberontakan Zulu dan Perang Akhir. Disini saya juga menganjurkan pelatihan persenjataan bagi mereka yang mempercayai metode kekerasan. Saya lebih senang India memiliki persenjataan untuk mempertahankan kehormatannya, bukannya bersikap pengecut menjadi saksi yang tidak berdaya menghadapi kehancuran kehormatannya.

Meskipun saya mempercayai bila aksi nirkekerasan (*non-violence*) jauh lebih baik dibandingkan aksi dengan kekerasan. Pemberian maaf jauh lebih manusiawi dibandingkan pemberian hukuman. *Kshama virasya bhushanam* artinya pemberian maaf akan menghiasi diri seorang prajurit. Meskipun ketidakberadaan pemberian maaf akan digantikan oleh kekuatan untuk menghukum; tindakan ini sia-sia saat diberikan pada makhluk yang tidak

berdaya. Seekor tikus akan sulit memaafkan seekor kucing yang telah mencabik-cabik tubuhnya. Demikian halnya, saya menghargai sentimen mereka yang menjerit untuk hukuman sepiantasnya bagi Jenderal Dyer dan sekutunya. Orang-orang itu akan mencabiknya jika mereka mampu melakukannya. Meskipun saya tidak percaya bahwa India telah demikian lemah. Saya tidak percaya bahwa diri saya sendiri adalah makhluk yang lemah. Saya hanya ingin menggunakan kekuatan India dan diri saya untuk tujuan yang lebih mulia.

Saya akan menjelaskannya. Kekuatan tidak berasal dari kapasitas fisik, melainkan dari kehendak yang kuat. Orang Zulu jauh lebih kuat fisiknya dibandingkan orang Inggris. Tetapi dia akan lari dari seorang bocah Inggris karena dia takut dengan senjata api bocah tersebut atau mereka yang akan menembaknya. Dia takut mati dan itu sangat berbeda dengan sosoknya yang tinggi besar. Orang India mestinya menyadari bahwa bangsa Inggris sebanyak seratus ribu tidak perlu membuat takut tiga ratus juta penduduk India. Suatu pemberian maaf akan berarti pengakuan pada kekuatan kita. Dengan pemberian maaf yang harus berasal dari kekuatan dalam diri kita, yang akan membuat seorang Dyer dan Frank Johnson tidak mungkin menginjak-injak kepala orang India yang terhormat. Menjadi sedikit persoalan bagi saya, bila saat ini saya tidak mengendalikan pemikiran saya kembali pada pokoknya. Kita merasa sangat tertekan bila tidak marah dan balas dendam. Meskipun saya tidak menahan diri untuk mengatakan bahwa India dapat memperoleh lebih banyak dengan tidak bersikukuh akan hak untuk memberi hukuman. Kita memiliki pekerjaan yang jauh lebih mulia untuk dilaksanakan, misi yang mulia untuk diberikan pada dunia.

Saya bukan seorang visioner. Saya adalah seorang idealis praktis. Kepercayaan akan kekuatan nirkekerasan tidak hanya berarti bagi para resi dan orang suci, melainkan juga bagi orang awam. Kekuatan nirkekerasan adalah hukum dari spesies manusia, tak ubahnya kekuatan dengan kekerasan adalah hukum bagi hewan. Semangat yang mendasari binatang dimana dia tidak mengetahui hukum melainkan hanya kekuatan fisik. Harga diri manusia memerlukan ketaatan pada suatu hukum paling tinggi, pada kekuatan jiwa.

Saya telah mengkaji India hingga sebelum adanya hukum kuno pengorbanan diri. Bagi *satyagraha* dan semacamnya, ketidakberadaan kooperasi dan pembelaan masyarakat, bukan hal baru bagi hukum penderitaan. Para resi yang menemukan hukum nirkekerasan pada pertengahan jaman kekerasan jauh lebih jenius dibandingkan dengan Newton. Mereka adalah pejuang yang lebih hebat dari Wellington. Mereka mengetahui cara menggunakan senjata, mereka menyadari kesia-siaannya dan mengajari dunia yang lelah bahwa satu-satunya jalan terletak pada kekuatan nirkekerasan bukannya kekerasan.

Kekuatan nirkekerasan dalam kondisi dinamisnya berarti penderitaan yang sadar. Bukan berarti submisi yang lemah terhadap kekuatan penjajah, melainkan meletakkan seluruh jiwa seseorang melawan kehendak tirani. Melaksanakan hukum ini pada keadaan kita, memungkinkan seorang individu untuk melawan seluruh kekuatan pemerintahan yang tidak adil untuk menyelamatkan kehormatan, agama, dan jiwanya serta meletakkan dasar bagi kehancuran pemerintahan tersebut dan regenerasinya.

Saya tidak minta India untuk mempraktekkan kekuatan nir kekerasan bila kekuatan ini lemah. Saya ingin India mempraktekkan kekuatan nirkekerasan dengan menyadari kekuatannya. Tidak diperlukan latihan persenjataan untuk merealisasikan kekuatannya. Kita tampaknya memerlukan hal ini karena kita berpikir bahwa kita tak lebih dari segumpal daging. Saya ingin India menyadari bahwa dia memiliki jiwa yang tidak dapat dihancurkan dan dapat melahirkan kemenangan di atas semua kelemahan fisik dan melawan kombinasi fisik di suatu dunia yang utuh. Apa yang dimaksudkan dalam diri Rama, hanyalah seorang manusia dengan pasukan keranya, mencoba melawan kekuatan dahsyat Rahwana berkepala sepuluh yang dikelilingi lautan berombak di semua bagian *Lanka* untuk keselamatan dirinya? Tidakkah ini berarti penaklukkan kekuatan fisik dengan kekuatan spriritual? Menjadi seorang manusia yang praktis, saya tidak akan diam hingga India menyadari kemampuan untuk mempraktekkan kehidupan spiritual dalam dunia politik. India menganggap dirinya tak memiliki kekuatan dan tak berdaya di hadapan senjata mesin, tank, dan pesawat terbang Inggris. Dan dia melaksanakan non-kooperasi diluar kelemahannya. Untuk tujuan yang sama telah membuat India melahirkan orang-orang yang tak ubahnya orang Inggris yang tidak memiliki keadilan.

Saya memisahkan non-kooperasi ini dari paham Sinn Fein, karena ini diyakini tidak mampu ditawarkan untuk menghadapi kekuatan kekerasan. Saya mengajak sekolah yang mengajarkan kekuatan kekerasan untuk memberikan non-kooperasi damai ini suatu kesempatan. Ini tidak akan gagal dilaksanakan melalui kelemahan yang dimilikinya. Mungkin

hanya dapat gagal karena kurang mendapat tanggapan, sehingga akan ada bahaya sesungguhnya. Orang-orang yang berjiwa besar yang tidak mampu menderita penghinaan nasional akan menunjukkan kemarahannya. Mereka akan menggunakan kekerasan. Sejauh yang saya ketahui, mereka harus ditaklukkan tanpa menyalahkan diri mereka atau negeri mereka. Jika India melaksanakan doktrin kekerasan (*doctrine of sword*), dia hanya akan memperoleh kemenangan sementara. India akan berhenti menjadi kebanggaan saya. Saya terikat dengan India karena saya berutang semuanya pada India. Saya sangat percaya bila India memiliki misi untuk dunia. Dia tidak harus meniru Eropa. Penerimaan India atas doktrin kekerasan akan menjadi proses peradilan saya. Saya tidak berharap demikian. Agama saya tidak mengenal batasan wilayah. Jika saya memiliki kepercayaan yang hidup didalamnya, kepercayaan itu akan mencakup cintaku pada India. Hidup saya dipersembahkan untuk melayani India melalui ajaran kekuatan nirkekerasan yang saya yakin menjadi akar agama Hindu.

Sementara saya mendorong mereka yang tidak mempercayai diriku untuk tidak mengganggu perjuangan yang baru saja dimulai terhadap kekerasan yang dalam kepercayaan saya ingin dilawan. Saya membenci kerahasiaan sebagai dosa. Mari kita beri mereka suatu kesempatan non-kooperasi nirkekerasan dan mereka akan mengetahui bahwa saya tidak memiliki mental seperti yang mereka kira.

"The Doctrine of the Sword"

Young India, 11 Agustus 1920

Kepada
The "World Tomorrow"
396 Broadway
New York U.S.A.

Pengamatan dan pengalaman mengenai kekuatan nirkekerasan telah membuktikan pada saya bahwa ini merupakan kekuatan paling besar di dunia. Merupakan metode terpercaya dan tercepat dalam menemukan kebenaran karena tidak ada metode lain. Bekerja tanpa suara, bahkan tak terduga meskipun menyakinkan. Merupakan salah satu proses Konstruktif Alam ditengah-tengah kehancuran yang sedang terjadi. Saya meyakini sebagai suatu takhayul untuk mempercayai bahwa ini hanya dapat dilaksanakan dalam kehidupan pribadi. Tidak ada departemen kehidupan masyarakat atau pribadi dimana kekuatan ini tidak dapat diaplikasikan. Meskipun kekuatan kekerasan ini tidak mungkin tanpa adanya persamaan diri yang utuh.

Pesan untuk *"world Tomorrow"*
Surat dari Mahadev Desai (MSS)

Kekuatan nirkekerasan merupakan kekuatan manusia yang terbesar yang telah memberikan keuntungan. Kebenaran hanyalah satu-satunya tujuan yang dia miliki. Bagi Tuhan tidak ada hal lain selain Kebenaran. Tetapi Kebenaran tidak dapat, tidak akan pernah, dicapai hanya selain melalui kekuatan nirkekerasan.

Hal inilah yang membedakan manusia dari hewan yaitu kemampuannya menjadi tidak puas. Dia mengisii tujuannya hanya pada tingkat dimana dia menjadi tidak puas. Dia meyakini semua karunia lainnya. Tetapi bila mereka tidak melaksanakan tujuan utama, mengembangkan jiwa yang tidak mengenal kekerasan dalam dirinya, akan menarik dirinya lebih rendah dibandingkan binatang, status dimana dia berada.

Teriakan perdamaian akan menjadi teriakan kegilaan, selama jiwa kekuatan nirkekerasan tidak dimiliki jutaan pria dan wanita.

Konflik persenjataan diantara bangsa-bangsa sangat menakutkan kita, meskipun perang ekonomi tidak jauh lebih baik dari konflik persenjataan. Perang ekonomi merupakan penindasan jangka lama dan kehancuran yang dibawanya sama buruknya dengan perang persenjataan yang ada selama ini. Kita tidak memikirkan perang lainnya, karena kita mendapatkan akibatnya yang fatal.

Kebanyakan dari orang di India merasa takut melihat tumpahan darah. Kebanyakan dari kita menolak penyembelihan sapi, meskipun kita tidak berpikir lainnya atas penindasan perlahan melalui orang-orang dan ternak yang disebabkan oleh ketamakan kita. Meskipun kita terbiasa dengan kematian secara perlahan, kita tidak berpikir lebih jauh mengenaiya.

Gerakan melawan perang dikumandangkan. Saya berdoa bagi keberhasilannya. Tetapi saya tidak dapat menahan ketakutan bila gerakan ini gagal, bila gerakan ini tidak menyentuh akan semua kejahatan-ketamakan manusia.

Akankah bangsa Amerika, Inggris, dan negara Eropa lainnya terus mengeksploitasi mereka yang dikenal lemah atau

ras tak berperabdan dan berharap meraih perdamaian dimana dunia ini sedang mencarinya? Ataukah bangsa Amerika akan tetap memangsa satu sama lain, memiliki pesaing komersial dan berharap memerintah perdamaian bagi dunia?

Bentuk ini tidak dapat diubah bila jiwanya tidak diubah. Bentuk tersebut hanyalah perwujudan jiwa didalamnya. Kita dapat saja berhasil mengubah bentuk meskipun perubahan tersebut hanyalah menjadi kepercayaan buatan jika jiwa yang berada didalamnya tetap tidak dapat diubah. Semacam pemakaman yang masih menyembunyikan didalamnya tulang dan daging yang membusuk.

Sangat jauh dari maksud saya untuk merendahkan atau meremehkan usaha besar yang dibuat negara Barat untuk membunuh semangat berperang. Milik saya hanyalah suatu kata peringatan dari seorang pencari teman yang telah melawan penindasannya sendiri pada hal yang serupa, mungkin dalam cara yang berbeda, pada skala yang jauh lebih kecil tepatnya. Tetapi bila eksperimen ini menunjukkan sukses pada bidang yang lebih kecil maka mereka yang melaksanakannya pada bidang yang lebih besar tidak akan mengejutkan aku, setidaknya ini akan membangun jalan setapak bagi pengalaman serupa pada bidang yang lebih luas.

Saya mengamati pada bidang yang terbatas dimana saya menemukan diriku yang setidaknya saya dapat memahami hati manusia, sesuatu yang tak mampu saya lakukan. Saya mengamati lebih jauh bahwa selama jiwa kebencian tetap bercokol; akan tidak mungkin untuk membangun perdamaian atau mendapatkan kemerdekaan kita melalui usaha damai. Kita tidak dapat mencintai satu sama lain, jika kita membenci

bangsa Inggris. Kita tidak dapat mencintai orang Jepang dan membenci orang Inggris. Kita harus membiarkan Hukum Cinta Kasih (*Law of Love*) memimpin kita melaluinya atau tidak sama sekali. Cinta kasih diantara kita berdasarkan kebencian pihak lain akan berhenti dibawah tekanan yang ringan. Kenyataan semacam itu bukanlah cinta kasih sesungguhnya. Tetapi gencatan senjata. Dan gerakan ini akan menjadi gerakan besar di negara Barat dalam melawan peperangan. Perang akan berhenti saat kesadaran manusia cukup untuk memilih menyadari supremasi Hukum Cinta Kasih dalam semua langkah kehidupan. Beberapa mengatakan hal ini tidak akan terjadi. Saya tetap mempercayai sampai akhir hayat saya bahwa hal ini akan terjadi.

"Non-Violence-The Greatest Force"
The Hindu, 8 November 1926.

Hukum Cinta Kasih

Akan memerlukan suatu pelatihan yang cukup besar untuk mendapatkan keadaan mental tanpa kekerasan. Dalam kehidupan sehari-hari ini harus menjadi latihan kedisiplinan meskipun kita tidak menyukainya, tak bedanya kehidupan seorang prajurit. Meskipun saya setuju setidaknya terdapat kerja sama yang sehati dari pikiran, bukan hanya apa yang dapat diamati diluar tak lebih suatu topeng, berbahaya bagi manusia itu sendiri dan lainnya. Keadaan yang sempurna dicapai hanya saat pikiran dan tubuh serta perkataan berada dalam koordinasi yang tepat. Meskipun ini merupakan masalah perjuangan mental yang terus menerus. Bukan berarti saya tidak mampu marah, melainkan saya berhasil dalam

semua kesempatan mengendalikan perasaan saya. Apapun akibatnya, selalu ada dalam diri saya suatu perjuangan secara sadar untuk mengikuti hukum kekuatan tanpa kekerasan secara tanpa henti. Suatu perjuangan yang akan membuat seseorang lebih kuat.

Kekuatan tanpa kekerasan adalah senjata bagi mereka yang kuat. Bagi mereka yang lemah kekuatan ini dapat dengan mudah menjadi kemunafikan. Rasa takut dan cinta kasih adalah istilah yang berbeda. Cinta kasih selalu siap memberi, tidak peduli dengan apapun balasannya. Cinta kasih bergulat dengan kehidupan itu sendiri dan akhirnya mampu memenangkan semua perasaan lainnya. Pengalaman saya sehari-hari, juga mereka yang bekerja denganku, adalah bahwa setiap permasalahan akan memberikan solusinya sendiri jika kita diharuskan untuk membuat hukum kebenaran dan kekuatan tanpa kekerasan sebagai hukum kehidupan. Bagi saya, kebenaran dan kekuatan tanpa kekerasan, adalah dua hal yang sama.

Apakah manusia akan dengan sadar mengikuti hukum cinta kasih saya tidak mengetahui. Tetapi kebutuhan itu tidak memaksa kita. Hukum cinta kasih akan bekerja, tak ubahnya hukum gravitasi tak peduli kita menerimanya atau tidak. Dan tak ubahnya ilmuwan yang mencoba beragam aplikasi hukum alam, demikian halnya seseorang yang mengaplikasikan hukum cinta kasih dengan sentuhan ilmiah dapat memberikan hasil yang luar biasa. Karena kekuatan tanpa kekerasan sangatlah luar biasa dan sulit dijabarkan dibandingkan kekuatan alam, seperti listrik contohnya. Seseorang yang menemukan hukum cinta kasih pada kita adalah ilmuwan terbesar dari ilmuwan dunia modern lainnya.

Penjelajahan kita telah jauh dan tidak memungkinkan bagi setiap orang untuk melihat semua hasilnya. Semacam, halunisasi, dimana saya bekerja. Semakin saya melaksanakan hukum ini semakin saya merasakan kegembiraan dalam kehidupan, kegembiraan dalam skema alam semesta. Ini memberiku perasaan damai dan arti misteri alam yang saya tidak mampu menjelaskannya.

"Dari S.S. Rajputana-III" (Surat dari M.D.)

Young India, 1 Oktober 1931.

Kekuatan Tanpa Kekerasan Sebagai Alat Dan Pemecahan Akhir

26

Yang Terhormat Asaf Ali,

Saya telah menerima surat anda dan saya berterima kasih karenanya. Saya sama sekali tidak keberatan bila anda mengirimkan surat itu pada *Press*. Anda berhak mengirimiku surat ini dan saya sangat menghargai keterbukaan pemikiran yang telah anda kemukakan.

Sayangnya, saya saat ini belum mampu mengatakan apapun karena saya masih sakit dan belum mampu membuat penelitian analisis mengenainya. Bagaimanapun, saya ingin anda dapat maklum dengan kesulitan yang saya hadapi yang juga berarti keterbatasanku. Kekuatan tanpa kekerasan bagi saya bukan hanya sekedar eksperimen. Merupakan bagian kehidupanku dan seluruh perintah dari *Satyagraha*, non-kooperasi, ketidak taatan masyarakat sipil, dan semacamnya yang merupakan deduksi dari proposisi mendasar bahwa kekuatan tanpa kekerasan adalah hukum kehidupan manusia.

Bagi saya hal itu merupakan suatu alat dan pemecahan akhir serta saya sangat yakin bila dalam situasi kompleks yang India hadapi saat ini, tidak ada jalan lain untuk memperoleh kemerdekaan sesungguhnya. Dalam melaksanakan pemikiran saya pada situasi dewasa ini, saya harus menguji segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan tanpa kekuatan.

M. Asaf Ali, Esp., bar-at-law
Kucha Chelan, Delhi
Surat kepada M. Asaf Ali
SN 19103

Kekuatan tanpa kekerasan adalah dasar dari setiap aktivitas saya dan juga merupakan tiga aktivitas kemasyarakatan dimana saya menghabiskan semua energiku. Adalah hal-hal yang tak mampu disentuh seperti, *khadi*, dan regenerasi daerah pedesaan secara umum. Kesatuan Hindu-Muslim adalah cinta keempat saya. Meskipun sejauh manifestasinya hingga saat ini, saya masih harus berbuat banyak mengenainya. Agar masyarakat tidak mengenal saya sebagai orang yang pasif. Jika tidak dalam kehidupan saya saat ini, saya tahu sesudah kematianku baik masyarakat Hindu dan Mussalman akan melihat bahwa saya tidak pernah akan berhenti meneriakkan perdamaian bersama.

Kekuatan tanpa kekerasan menjadi suatu perintah pada semua bagian. Saya tidak dapat menjadi tidak keras pada satu aktivitas dan menjadi keras pada aktivitas lainnya. Itu adalah kebijaksanaan, bukan kekuatan kehidupan. Karena hal inilah, saya bersikap sama terhadap perang dimana Italia sekarang lakukan pada Abisinia. Tetapi saya telah mencoba

melawan keinginan yang menekan saya untuk menyatakan pendapat dan memberikan bimbingan pada negara tersebut. Pengendalian diri seringkali penting dalam hal Kebenaran dan kekuatan tanpa kekerasan. Jika India sebagai suatu bangsa tak memperdulikan perintah aksi tanpa kekerasan, kerjasama atau nasional, saya tidak akan ragu-ragu untuk memberikan suatu arahan. Meskipun diluar pengaruh tertentu yang saya dapatkan dari berjuta-juta orang di India, saya tahu keterbatasan dari pengaruh tersebut. India memegang teguh ajaran aksi tanpa kekerasan sejak dahulu. Dari sejarah kuno India, sejauh yang saya tahu, India telah melakukan aksi tanpa kekerasan dalam menaklukkan semua wilayah. Oleh karena itu, saya sangat percaya bila takdir India adalah untuk menyampaikan aksi tanpa kekerasan pada manusia. Merupakan usaha yang membutuhkan waktu lama. Sejauh yang dapat saya nilai, tidak akan ada negara lain yang akan mendahuluinya dalam melaksanakan tugas tersebut.

Oleh sebab itu, sangatlah sesuai melihat implikasi kekuatan tanpa kekerasan. Tiga pertanyaan konkrit disini, yang ditanyakan oleh teman-teman tanpa sengaja suatu hari adalah :

1. Apa yang dapat armada Abisinia lakukan untuk melawan tentara Italia yang kuat, bila negara tersebut menggunakan aksi tanpa kekerasan?
2. Apa yang dapat Inggris lakukan, serta negara sekutu lainnya yang kuat dan besar melawan Italia, jika Inggris melakukan aksi tanpa kekerasan dalam pengertian anda?
3. Apa yang India dapat lakukan, jika negara tersebut melakukan aksi tanpa kekerasan dalam pengertian anda?

Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan meletakkan lima asas dasar aksi tanpa kekerasan yang saya ketahui :

1. Aksi tanpa kekerasan mengimplikasikan penyucian diri yang seutuh mungkin.
2. Manusia untuk manusia adalah kekuatan aksi tanpa kekerasan dalam proporsi yang tepat pada kemampuan, bukan pada kehendak, dari orang yang melakukannya untuk melawan kekerasan.
3. Aksi tanpa kekerasan jauh lebih baik dari kekerasan, sebagai contoh kekuatan yang diberikan orang yang melakukan aksi tanpa kekerasan selalu lebih besar dibandingkan bila dia melakukan kekerasan.
4. Tidak ada kesia-siaan pada aksi tanpa kekerasan. Hasil akhir dari kekerasan tak pelak adalah kesia-siaan.
5. Hasil akhir aksi tanpa kekerasan adalah kemenangan-istilah yang digunakan pada aksi tanpa kekerasan. Pada kenyataannya tidak ada istilah kesia-siaan juga kemenangan.

Pertanyaan tadi dapat dijawab sehubungan dengan asas-asas ini.

1. Jika Abinisia melakukan aksi tanpa kekerasan, negara tersebut tidak akan memiliki armada perang, dan tidak akan menginginkannya. Ia tidak akan memohon pada Sekutu atau kekuatan lainnya untuk intervensi persenjataan. Ia tidak akan pernah memberikan sebab-sebab untuk melakukan tuntutan. Dan Italia tidak akan dapat menaklukkannya jika Abinisia tidak menawarkan perlawanan senjata. atau memberikan kerja sama untuk

menerima atau melawannya. Pendudukan Italia pada hal ini hanyalah pendudukan atas wilayah bukan bangsa Abinisia. Meskipun ini bukanlah tujuan Italia sebenarnya. Abinisia berusaha mencari submisi dari bangsa suatu negara yang indah.

2. Jika bangsa Inggris sebagai suatu bangsa yang memiliki sikap tanpa kekerasan pada prinsipnya, mereka tidak akan melakukan imperialisme, mereka akan menghentikan penggunaan senjata. Kekuatan moral yang timbul dari tindakan penolakan semacam ini akan mendorong Italia menghentikan rencananya. Negara Inggris akan menjadi tempat asas yang telah saya dasari. Efek dari konversi semacam ini akan memberikan keajaiban besar sepanjang waktu. Meskipun aksi tanpa kekerasan bukanlah hanya suatu impian, keadaan seperti ini suatu saat akan timbul, Saya yakin akan hal itu.
3. Pertanyaan terakhir dapat dijawab demikian. Seperti telah saya katakan, India sebagai suatu bangsa bukanlah bangsa yang melakukan aksi tanpa kekerasan dalam arti sepenuhnya. Bukan karena India memiliki kapasitas untuk melakukan kekerasan-atau karena tidak memiliki armada perang. Kepemilikan fisik armada adalah hal yang terakhir dibutuhkan dari suatu keberanian. Aksi tanpa kekerasan hanyalah milik orang yang lemah. Sehingga India menutupi kelemahannya dalam setiap tindakan sehari-harinya. India muncul dihadapan dunia sebagai bangsa yang lemah. Saya maksud disini tidak hanya dalam pengertian politis melainkan yang paling penting dalam aksi tanpa kekerasan, pengertian moral. India kurang memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri secara

fisik. Ia tidak memiliki kesadaran atas kekuatannya. Ia hanya menyadari kelemahannya. Jika ia dapat menyadari hal ini, tidak akan pernah perselisihan dalam masyarakat demikian juga dengan perselisihan politik. Jika India melakukan aksi tanpa kekerasan dengan kesadaran akan kekuatannya, bangsa Inggris akan kehilangan pemerintahan imperialismenya. Kita dapat berbicara secara politis dengan bebas dan menyalahkan secara hukum penguasa Inggris. Tetapi jika kita, sebagai orang India, untuk saat ini dapat memvisualisasikan diri kita sebagai masyarakat yang kuat, berani melawan, kita akan berhenti merasa takut pada bangsa Inggris apakah mereka sebagai pedagang, tentara atau anggota pemerintahan dan mereka akan membenci kita. Tetapi jika kita melaksanakan aksi tanpa kekerasan sepenuhnya kita semestinya mengajak bangsa Inggris bersama kita dalam semua kekuatan yang kita miliki. Dengan kata lain, kita akan menjadi kekuatan moral yang besar di dunia, dan Italia akan mendengarkan nasehat kita.

Saya harap, pembaca dari sekarang menerima argumentasi saya bukan suatu usaha sia-sia untuk membuktikan asas-asas saya yang harus terbukti dengan sendirinya. Sampai mata saya mampu memahami dunia terbuka, benak saya sedang mengarungi, saat saya membaca dan membaca lagi dua belas asas *Euclid*. Setelah mata saya terbuka geometri tampak menjadi ilmu yang paling mudah untuk dipelajari, Jauh lebih sulit adalah aksi tanpa kekerasan. Merupakan masalah kepercayaan dan pengalaman, bukan argumentasi dibalik nilai pentingnya. Selama dunia menolak

untuk mempercayai, aksi tanpa kekerasan harus menunggu suatu keajaiban seperti demonstrasi yang kasat mata dari gerakan massa terhadap aksi tanpa kekerasan. Mereka mengatakan bila hal ini melawan sifat manusia-aksi tanpa kekerasan hanyalah bagi individu. Jika demikian, dimanakah perbedaan antara manusia dan binatang?

"Kekuatan Terbesar"

Harijan, Oktober 12, 1935

Seorang teman dari London menanyakan tujuh pertanyaan sehubungan pelaksanaan aksi tanpa kekerasan. Meskipun pertanyaan serupa telah disampaikan dalam *Young India* atau *Harijan*, tetapi akan lebih baik untuk menjawabnya dalam satu artikel, bila memungkinkan jawaban menjadi lebih membantu.

- T1. Apakah mungkin bagi negara modern (yang berdasarkan kekuatan pada intinya) menawarkan aksi tanpa kekerasan untuk menghadapi kekuatan yang mengganggu secara internal dan eksternal? Apakah perlu bagi bangsa yang ingin melaksanakan aksi tanpa kekerasan pertama-tama harus melepaskan semua otoritas Negara besar dan menempatkan diri secara bergantian dalam sisi berlainan dalam kapasitas pribadi?
- J. Tidak memungkinkan bagi suatu negara modern yang berdasarkan kekuatan untuk mempertahankan diri dari serangan, internal maupun eksternal. Seorang manusia tidak dapat melayani Tuhan dan Mammon, serta menjadi "pemarah" pada saat bersamaan. Demikian juga yang diharapkan pada suatu negara dapat berdasarkan

aksi tanpa kekerasan, seperti contoh ia dapat menawarkan pertahanan diri tanpa kekerasan terhadap persekutuan dunia yang berdasarkan kekuatan armada. Seperti negara Asoka yang dapat dibangun kembali. Tetapi ini tidak berarti membuatnya lemah bahkan seperti yang telah negara Asoka tunjukkan dengan berdasarkan aksi tanpa kekerasan. Hal ini dapat dipelajari pada keuntungan-keuntungannya.

- T2. Apakah anda berpikir hal ini memungkinkan bagi pemerintahan Kongres dalam menyelesaikan agresi bangsa lain atau kerusuhan dalam negeri dalam suatu sikap yang tanpa kekerasan sepenuhnya?
- J. Dapat saja pemerintahan Kongres dalam menyelesaikan "agresi bangsa lain atau kerusuhan dalam negeri" dengan suatu sikap tanpa kekerasan. Kongres tersebut mungkin tidak berpikir seperti apa yang saya percayai. Jika Kongres mengubah pelaksanaannya, perubahan tersebut membuktikan tidak adapun yang dapat diselamatkan karena tindakan tanpa kekerasan yang ditawarkan disini rapuh dan Kongres tidak memiliki keyakinan mengenai negara tanpa kekerasan.
- T3. Bukankah itu tidak menjadi masukan bila pihak penentang yang melaksanakan aksi tanpa kekerasan seringkali membesarkan hati musuhnya?
- J. Pihak musuh memiliki kesempatan saat dia harus berhadapan dengan aksi tanpa kekerasan dari mereka yang lemah. Aksi tanpa kekerasan dari mereka yang kuat dari hari ke hari semakin kuat dibandingkan apa yang

dimiliki oleh prajurit pemberani yang bersenjata penuh atau seluruh penduduk jajahan.

- T4. Kebijakan bagaimanakah yang akan anda anjurkan jika masyarakat India di satu wilayah berusaha menggunakan kekerasan untuk kepentingannya sendiri yang tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga tidak adil? Jika memungkinkan bagi organisasi informal melakukan tindakan tanpa kekerasan pada kasus semacam ini, apakah juga memungkinkan bagi pemerintahan sekarang untuk melakukannya?
- J. Pertanyaan ini mengasumsikan suatu kasus yang tidak akan pernah terjadi. Suatu negara yang tanpa kekerasan harus berdasarkan pada pemikiran orang-orang intelektual, yang mampu mengenali dengan baik pikirannya dan bertindak atasnya. Dalam negara semacam ini wilayah yang dimaksudkan dapat diabaikan. Ia tidak akan pernah dapat melawan kehendak mayoritas yang diwakili oleh negara. Pemerintah yang ada bukanlah tidak terdiri dari masyarakat. Pemerintahan tersebut merupakan kehendak mayoritas. Jika hal ini dinyatakan tanpa kekerasan, tindakan ini tidak dapat menjadi suatu mayoritas dari satu melainkan hampir sebesar 99 melawan 1 dalam seratus.
- T5. Apakah pertahanan tanpa kekerasan dari kekuatan militer yang kuat tidak lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan militer yang lemah?
- J. Ini merupakan istilah yang kontradiktif. Tidak akan ada aksi tanpa kekerasan yang ditawarkan oleh kekuatan

militer yang kuat. Seperti, Rusia untuk menyatakan tindakan tanpa kekerasan harus membuang semua kekuatannya untuk melakukan kekerasan. Apa yang benar dalam hal ini jika mereka, yang suatu saat kuat dalam kekuatan armadanya, berubah pikiran, mereka akan mampu menunjukkan tindakan tanpa kekerasannya dengan baik pada dunia dan juga pada musuhnya. Sedangkan mereka yang kuat dalam kekuatan tanpa kekerasannya tidak akan keberatan apakah mereka diserang oleh bangsa yang berarmada lemah atau yang kuat.

- T6. Apakah yang seharusnya menjadi pelatihan dan disiplin bagi armada yang tanpa kekerasan? Haruskah aspek-aspek tertentu dari bentuk pelatihan militer yang konvensional menjadi bagian dari silabus?
- J. Bagian yang terkecil dari pelatihan sebelumnya yang diterima oleh militer adalah hal yang sama dengan yang diberikan pada armada tanpa kekerasan. Yaitu disiplin, latihan, bernyanyi dalam koor, aba-aba bendera, pemberian tanda dan sebagainya. Hal ini sangat perlu meskipun dasarnya berbeda. Pelatihan yang dibutuhkan bagi armada yang menggunakan kekerasan adalah kepercayaan yang tidak dapat tergoyahkan pada Tuhan, keinginan dan ketaatan pada pimpinan dari armada tanpa kekerasan dan kerjasama yang baik luar dan dalam antara bagian-bagian armada.
- T7. Apakah tidak akan lebih baik berdasarkan keadaan sekarang bila negara-negara semacam India dan Inggris

semestinya mempertahankan efisiensi militer secara penuh saat membicarakan untuk memberikan pemecahan tanpa kekerasan suatu pengadilan yang semestinya sebelum melaksanakan suatu tindakan militer?

- J. Jawaban berikut ini akan membuatnya jelas bila berdasarkan keadaan sekarang India dan Inggris tidak akan bisa memberikan penyelesaian tanpa kekerasan disaat mereka berdua mempertahankan efisiensi militer secara penuh. Pada saat yang sama benar tampaknya bila semua kekuatan militer membawa semua negosiasi pada penyelesaian yang damai bagi perselisihan. Tetapi disini kita tidak sedang membicarakan perdamaian sebelumnya tanpa menunjuk pada arbitrase perang. Kita membicarakan langkah penyelesaian akhir lainnya dari konflik persenjataan yang disebut perang, dalam istilah kasarnya, pembunuhan massal.

Cinta Kasih, Hukum, dan Ketidaktaatan Masyarakat^{*)}

Meskipun ada cara lainnya, yaitu melakukan perlawanan dengan tanpa menggunakan kekerasan. Metode yang dipopulerkan pada generasi kita oleh pria kecil dari India, bernama Mohandas K. Gandhi. Beliau menggunakan metode ini dengan cara yang menakjubkan untuk membebaskan rakyatnya dari eksploitasi ekonomi dan dominasi politik yang dilakukan oleh kekuatan asing.

Metode ini telah digunakan oleh gerakan mahasiswa di bagian Selatan dan seluruh wilayah negara Amerika Serikat. Wajar bila kapanpun saya berbicara mengenai gerakan mahasiswa saya tidak dapat sepenuhnya obyektif. Saya menjadi demikian subyektif disebabkan kekaguman saya yang sangat besar atas apa yang para mahasiswa tersebut telah lakukan. Mereka telah mewujudkan keinginan terdalam kita akan kebebasan, dan menfilterisasi keinginan itu dalam jiwa mereka dan mengubahnya kedalam suatu protes kreatif yang dikenal sebagai suatu *epic* oleh seluruh bangsa kita. Hasil dari perjuangan mereka yang disiplin, tanpa menggunakan kekerasan meskipun demikian berani, telah memberikan kesuksesan di negara bagian Selatan, dan pada bangsa kita. Gerakan ini memiliki landasan filosofi, pemikiran tertentu

^{*)} Resitasi berdasar tulisan Martin Luther King, Jr., *Excerpts from Love, Law dan Civil Disobedience*, dalam Manfred B. Steger and Nancy S. Lind, *An Interdisciplinary Reader Violence and its Alternatives*, New York, St. Martin's Press, 1999, p.p. 302-307

yang melekat padanya, sekaligus aturan moral filosofis tertentu. Hal inilah yang ingin saya bicarakan kemudian.

Saya akan mengatakan bila nilai pertama atau prinsip pertama dalam gerakan tersebut adalah pemikiran bila caranya haruslah murni demikian juga hasil akhirnya. Gerakan ini berdasarkan pada filosofi dimana hasil yang ditimbulkannya dan cara harus berkoherensi. Selama ini hal tersebut menjadi salah satu usaha, keseluruhan pemikiran atas cara dan hasil akhirnya. Para filsuf terkenal telah berusaha mengatasinya, dan kadangkala mereka memunculkan pemikiran tersebut, mulai dari Machiavelli dimana hasil akhir berkesesuaian dengan caranya. Ada suatu sistem pemikiran yang luar biasa dalam dunia kita dewasa ini, yang dikenal dengan komunisme. Saya berpikir atas kelemahan dan tragedi komunisme, kita menemukan tragedinya yang paling besar disini, berlangsung menurut filosofi dimana hasil akhir yang sesuai dengan cara yang digunakan dalam proses tersebut. Sehingga kita dapat membaca atau mendengar Lenin mengatakan hal yang licik dan penuh kekerasan, hal-hal semacam ini yang menjadi hasil akhir dari masyarakat tak berkelas.

Untuk alasan inilah gerakan mahasiswa dan gerakan tanpa kekerasan yang sedang berlangsung di negara kita akan menghancurkan komunisme dan sistem lain sejenisnya dengan menginginkan hasil akhir berkesesuaian dengan caranya. Selama itu kita mesti harus melihat hasil akhir yang mewakili cara yang sedang berlangsung dan cara yang sesuai dalam pembuatannya. Dengan kata lain, kita tidak dapat mempercayai demikian saja bila hasil akhir akan sesuai dengan cara yang dilakukan karena hasil akhir telah dipikirkan jauh sebelum cara-caranya. Demikian halnya dengan pemikiran

mengenai perlawanan tanpa kekerasan, filosofi perlawanan tanpa kekerasan, adalah filosofi yang mengatakan bila cara-cara tersebut haruslah murni demikian juga dengan hasil akhir, dimana selama ini, cara-cara yang tak bermoral sekaligus desktruktif takkan dapat melahirkan hasil akhir yang bermoral dan konstruktif.

Terdapat hal lain mengenai filosofi ini, metode tanpa menggunakan kekerasan yang dianut oleh gerakan mahasiswa. Dikatakan bahwa siapapun yang menganut filosofi ini harus menganut prinsip konsisten tidak adanya korban. Mereka harus menolak untuk melukai satu sama lain. Kadangkala anda akan membaca wacana tentang gerakan mahasiswa dan melihat, disaat mereka bersiap untuk aksi mogok atau melakukan demonstrasi, mereka akan membaca sesuatu semacam ini : "Jika anda dipukul janganlah membalas, jika anda diolok-olok janganlah membalas mengolok-oloknya." Inilah adalah keseluruhan pemikiran, bahwa siapapun individu yang melakukan perjuangan tanpa kekerasan tidak harus melukai satu sama lain. Dewasa ini pemikiran tersebut memiliki aspek eksternal dan internal. Dari pandangan eksternal ini berarti bila para individu yang terlibat harus menghindari kekerasan fisik eksternal. Sehingga mereka tidak diperbolehkan menggunakan senjata, mereka tidak akan membalas dengan kekerasan fisik. Jika mereka dipukul selama melakukan protes, mereka menghindari kekerasan fisik eksternal pada setiap kesempatan. Ini juga berarti bila mereka menghindari semangat melakukan kekerasan dalam dirinya. Inilah mengapa etika cinta kasih berdiri demikian kokoh dalam gerakan mahasiswa. Kita akan berbicara panjang lebar mengenai cinta kasih dan perlawanan tanpa kekerasan.

Saat para mahasiswa tersebut berbicara mengenai cinta kasih, mereka tentu saja tidak berbicara mengenai ledakan emosional, atau hanya sekedar suatu luapan sentimental; melainkan sesuatu yang lebih mendalam, dan saya terpaksa harus berhenti dan mencoba untuk mendefinisikan pengertian cinta kasih dalam konteks ini. Bahasa latin akan membantu kita. Terdapat tiga kata dalam bahasa Latin mengenai cinta kasih, salah satunya adalah *eros*. Merupakan jenis cinta yang indah, yaitu suatu cinta yang demikian indah memabukkan. Plato membahasnya dalam bukunya *Dialogue*, pemujaan jiwa atas terwujudnya sesuatu yang indah. Dikenal oleh kita sebagai cinta romantika dan apa yang selama ini kita baca dan alami. Kita telah membacanya dalam karya sastra yang indah. Saya menduga apa yang dimaksudkan Edgar Allan Poe saat dia berbicara tentang *eros* adalah saat dia berbicara tentang kecantikan Annabelle Lee kekasihnya, dengan dikelilingi rasa cinta yang abadi. Apa yang dimaksud Shakespeare saat dia berbicara tentang *eros* adalah saat dia mengatakan "Bukanlah cinta jika dia mampu berubah, atau terikat dengan apa yang hendak menggubahnya; O, tidak! Cinta adalah sesuatu yang tidak akan berubah dalam badai sekalipun, cinta adalah bintang pada setiap kalimat yang menyakitkan". (Anda tahu mengapa saya mampu mengingatnya karena saya dulu mengutipnya untuk kekasih saya setiap kali kita berkenan; itulah *eros*). *Philia* dalam bahasa Latin adalah tahap lain dari cinta kasih. Merupakan suatu afeksi yang intim diantara persahabatan, suatu cinta yang saling membutuhkan. Pada tahap ini anda mencintai karena anda dicintai. Itulah persahabatan.

Selanjutnya apa yang disebut *agape* dalam bahasa Latin. *Agape* lebih dari sekedar cinta romantika, *agape* lebih dari sekedar persahabatan. *Agape* adalah keinginan yang mulia untuk memahami, membalas kebaikan semua manusia. Merupakan cinta kasih yang tidak menginginkan imbalan apapun. Teologis mengatakan bahwa cinta ini adalah cinta yang Tuhan berikan dalam hati semua manusia. Sehingga bila ada seorang manusia memiliki cinta kasih semacam ini, dia mencintai manusia lain bukan karena dia menyukai mereka, tidak juga karena mereka berbuat baik padanya, melainkan karena Tuhan mencintai dirinya. Dan dia akan mencintai orang yang melakukan perbuatan jahat meskipun dia membenci perbuatan tersebut. Saya pikir inilah apa yang Yesus katakan saat beliau mengatakan "cintailah musuh-musuhmu." Saya sangat senang karena beliau tidak mengatakan senang musuh-musuhmu, karena sedikit sulit untuk menyenangkan beberapa orang. Perasaan senang adalah sentimental, dan cukup sulit untuk menyenangkan seseorang yang telah mengebom rumah anda, seseorang yang mengancam anak-anak anda, anggota dewan yang berusaha menghancurkan hak-hak rakyat. Tetapi Yesus berkata cintailah mereka, dan cinta sangat jauh lebih besar dari menyenangkan. Cinta adalah pemahaman, keinginan mulia yang kreatif dan mau memberikannya pada semua manusia. Inilah pemikiran, etika cinta secara utuh yang menjadi landasan pemikiran gerakan mahasiswa.

Terdapat hal lainnya : dimana seseorang berusaha untuk melawan sistem yang tidak adil, yang tidak hanya sekedar orang-orang yang ditangkap dalam sistem tersebut.

Sesuatu yang dipercayai sebagai hal penting, untuk membebaskan diri dari sistem yang jahat, dan tidak menjadi orang yang salah arah, yang diajari sesuatu yang salah. Hal yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari sistem tersebut dan menciptakan keseimbangan moral dalam masyarakat.

Hal lain yang mendasari gerakan ini adalah penderitaan dapat menjadi suatu kekuatan masyarakat yang paling kreatif dan luar biasa. Penderitaan memiliki keterlibatan atribut moral tertentu, yang dapat menjadi kekuatan masyarakat yang kreatif dan luar biasa. Menarik untuk diperhatikan disini adalah baik perlawanan tanpa menggunakan kekerasan atau yang menggunakan kekerasan setuju bila penderitaan dapat menjadi kekuatan sosial yang luar biasa. Tetapi terdapat perbedaan disini : perlawanan yang menggunakan kekerasan mengatakan bila penderitaan dapat menjadi suatu kekuatan sosial yang besar dengan menindas pihak lain: ini apa yang kita lakukan dalam peperangan, apa yang kita lakukan pada semua gerakan yang menggunakan kekerasan. Gerakan ini mempercayai bila anda dapat meraih hasil akhir dengan membuat pihak lain menderita. Gerakan tanpa kekerasan (*non-violence*) mengatakan bahwa penderitaan akan menjadi kekuatan sosial yang luar biasa bila anda bersedia menerima kekerasan atas diri anda sendiri, sehingga penderitaan pribadi menjadi landasan gerakan tanpa kekerasan dan para individu yang terlibat mampu menderita dalam suatu sikap yang kreatif, perasaan yang tidak akan melakukan balas dendam atas penderitaan dan penderitaan yang dapat ditransformasikan dalam situasi sosial.

Pemikiran lainnya dari gerakan ini adalah bahwa terdapat dalam diri manusia suatu potensi untuk berbuat kebaikan. Dalam diri manusia yang mampu membalas kebaikan. Saya tahu seseorang akan mengatakan bila tindakan ini tidak realistis bila berdasarkan kepercayaan semua manusia adalah baik. Saya tidak mengatakan demikian. Saya pikir para mahasiswa tersebut cukup realistis untuk mempercayai bila terdapat dikotomi yang tidak umum dari dualisme bertolak arah dalam diri manusia. Banyak dari filsuf dan pemikir telah melihat hal ini. Ovid seorang penulis puisi Latin mengatakan, "Saya melihat dan mengakui hal yang baik-baik dalam kehidupan, meskipun saya melakukan hal-hal buruk." Bahkan Santa Augustine berkata "Tuhan, merubah saya menjadi suci, meskipun belum terjadi." Demikian juga dalam diri manusia. Plato, berabad-abad yang lalu mengatakan bila kepribadian manusia tak ubahnya seorang penunggang dua kuda yang masing-masing memiliki keinginan pada arah yang berlawanan, sehingga dalam kehidupan individual kita melihat konflik ini dan saat kita memasuki kehidupan kolektif manusia, kita melihat keburukan yang tak umum. Diluar itu, terdapat sesuatu dalam diri manusia untuk membalas kebaikan. Sehingga manusia itu dalam dirinya ada kecenderungan untuk berbuat baik juga buruk; dia memiliki potensi untuk melakukan keduanya. Dalam hal ini Carlyle benar saat dia mengatakan "keinginan paling akhir dalam diri manusia untuk memasuki neraka terendah dan keinginan besar untuk surga yang tertinggi, meskipun baik surga dan neraka bukanlah dia yang menciptakannya, keajaiban dan misteri abadi seperti halnya manusia itu sendiri?" Manusia

memiliki kapasitas menjadi orang baik sebagaimana dia memiliki kapasitas menjadi orang yang jahat.

Dan bagi mereka yang melakukan perlawanan tanpa kekerasan tidak pernah mengabaikan pemikiran ini, karena terdapat dalam diri manusia kemampuan merespon kebaikan. Demikian juga dengan Yesus dari Nazareth atau Mohandas Gandhi yang tunjukkan pada umat manusia dan memperlihatkan unsur kebaikan dalam dirinya, dan yang seorang Hitler tunjukkan mengenai unsur kejahatan dalam dirinya. Tetapi kita tidak boleh melupakan bila terdapat dalam diri manusia kemampuan untuk melakukan kebaikan, dalam istilah teologis, citra Tuhan dalam dirinya tidak pernah lenyap sepenuhnya. Bagi para individu yang memiliki kepercayaan dalam gerakan ini serta pada gerakan tanpa kekerasan dan perjuangan kita di wilayah negara bagian Selatan, akan mempercayai bila seorang *segrationist* (semacam rasis) dapat menjadi seorang *integrationist* (semacam anti-rasis). Kadangkala sulit untuk mempercayai dewasa ini bahwa apa yang dikatakan gerakan ini, dan yang sangat diyakininya mengenai sesuatu dalam diri manusia yang dapat diubah menjadi inti filosofi gerakan mahasiswa dan filosofi gerakan tanpa kekerasan.

Disamping itu gerakan ini berbicara hal lain. Dikatakan bila ada obligasi moral untuk menolak melakukan kejahatan sebagaimana ada obligasi moral untuk melakukan kebaikan. Sehingga gerakan mahasiswa ini berlandaskan atas pemikiran mengenai ketidak taatan masyarakat. Saya jadi berpikir bila bagian gerakan mahasiswa ini telah salah dimengerti. Suatu aspek yang sulit karena pada salah satu sisi para mahasiswa tersebut akan mengatakan dan demikian juga saya, serta semua masyarakat yang mempercayai hak-hak

rakyat, agar mematuhi keputusan Mahkamah Agung (*Supreme Court*) tahun 1954 dan oleh sebab itu kita tidak mematuhi hukum tertentu yang tercantum pada perundang-undangan negara bagian wilayah Selatan dewasa ini.

Ini akan membawa satu pertanyaan besar bagaimana anda secara logis dapat konsisten saat anda menyarankan untuk mematuhi beberapa hukum tetapi tidak mematuhi hukum lainnya. Saya pikir anda seharusnya melihat pengertian keseluruhan gerakan ini dengan melihat bahwa para mahasiswa tersebut menyadari terdapat dua jenis hukum. Ada hukum yang berkeadilan dan terdapat hukum yang tidak berkeadilan. Mereka akan mematuhi hukum yang pertama, mereka akan menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa para pria dan wanita memiliki obligasi moral atas hukum yang berkeadilan. Meskipun mereka tetap mengatakan bila kita harus melihat hukum yang tidak berkeadilan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara hukum-hukum itu, dan siapa yang menentukan perbedaan, apa perbedaan antara hukum yang berkeadilan dan hukum yang tidak berkeadilan?

Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang sesuai dengan hukum moral. Suatu hukum yang sesuai dengan apa yang benar, sehingga hukum yang menghargai martabat manusia adalah hukum yang berkeadilan. Sementara hukum yang tidak selaras dengan moral adalah hukum yang tidak sesuai dengan hukum moral alam semesta. Hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum Tuhan, sehingga bagi alasan tersebut hukum tersebut tidak adil dan semua hukum yang merendahkan martabat manusia adalah hukum yang tidak berkeadilan.

Baiklah, bila terdapat seseorang yang mengatakan bila hal itu tidak berarti apapun bagi saya; pertama, karena saya tidak mempercayai hal-hal abstrak yang disebut hukum moral dan karena saya bukan orang yang terlalu religius, sehingga saya tidak percaya dengan hukum Tuhan; anda harus memiliki sesuatu yang jauh lebih konkret dan praktis. Apa yang anda pikirkan saat anda mengatakan bahwa suatu hukum berkeadilan dan lainnya tidak? Baiklah, saya akan menjelaskan dalam istilah yang lebih konkret bahwa hukum yang tidak berkeadilan adalah suatu aturan dimana golongan mayoritas menekan golongan minoritas sehingga hukum tersebut tidak berlaku bagi golongan mayoritas. Sehingga menjadikan perbedaan menjadi sesuatu yang legal. Hal lainnya yang dapat kita katakan adalah bahwa suatu hukum yang tidak berkeadilan adalah suatu aturan dimana golongan mayoritas menekan golongan minoritas, dimana golongan minoritas tidak diikutkan dalam pelaksanaan dan pembuatannya, karena golongan minoritas tidak memiliki hak suara dalam berbagai hal, sehingga badan legislatif yang membuat hukum semacam itu dipilih secara tidak demokratis. Siapa yang hendak mengatakan bila badan legislatif Mississippi dipilih secara demokratis demikian juga dengan badan legislatif Alabama ataupun badan legislatif Georgia sementara terdapat masyarakat di Terrell County dan di beberapa county lainnya tidak memiliki hak suara karena warna kulitnya? Mereka melakukan konfrontasi dan mengancamnya, bahkan lebih, sehingga suatu hukum yang tidak berkeadilan adalah suatu hukum dimana individu tidak memiliki bagian dalam menciptakan atau melaksanakannya karena hak suara mereka telah ditolak.

Hukum yang berkeadilan memiliki bukti yang sebaliknya. Hukum berkeadilan membuat kebijakan menjadi sesuatu yang legal. Merupakan suatu peraturan dimana golongan mayoritas yang mempercayai aturan tersebut, mengharuskan golongan minoritas yang tidak mempercayainya untuk mengikutinya, karena mereka bersedia mematuhi dengan sadar, sehingga hukum tersebut adalah kebijakan legal. Selanjutnya para individu yang menyakini asas ketidak taatan masyarakat menyadari bahwa mereka mengikuti sesuatu yang mengatakan terdapat hukum yang berkeadilan dan hukum tidak berkeadilan. Mereka bukanlah anarkis. Mereka percaya bila terdapat hukum yang mestinya diikuti; mereka tidak berusaha menyingkirkan hukum, mereka tidak berusaha melenyapkan hukum. Bagi kebanyakan individu yang menganggap dirinya segregationist dan akan berusaha melakukan pemisahan pada berbagai hal berusaha untuk melenyapkan hukum dan proses yang mereka lakukan dapat memicu anarkis. Mereka dalam analisa akhirnya berusaha mengikuti suatu cara ketidak taatan non-sipil sebagaimana juga ketidak taatan sipil/masyarakat. Saya katakan disini bila individu yang tidak menaati hukum memiliki kesadaran bahwa hukum tersebut tidak adil dan bersedia untuk menerima hukuman penjara sampai hukum tersebut diubah, menyatakan kehormatan tertinggi atas hukum.

Inilah yang telah diikuti oleh para mahasiswa dalam gerakannya. Meskipun tentu saja tidak ada hal baru mengenai hal ini; mereka merasa berada dalam pihak yang benar. Kita hendaknya membaca kembali *Apology* dan *Crito*, anda akan melihat Sokrates mempraktekkan ketidak taatan sipil. Sehingga kebebasan akademis merupakan suatu kenyataan

yang ada dewasa ini dikarenakan Sokrates mempraktekkan ketidak taatan sipil. Orang-orang Kristen jaman dahulu melakukan ketidak taatan sipil dalam suatu sikap yang luar biasa, dimana sebagai hukumannya mereka dijadikan mangsa para singa. Mereka bersedia menghadapi segala jenis penderitaan untuk mempertahankan apa yang mereka yakini benar meskipun mereka tahu bila hal tersebut melanggar hukum Kekaisaran Roma.

Kita hidup pada jaman sekarang dan melihatnya masih ada. Kita tidak boleh melupakan bahwa segala sesuatu yang Hitler lakukan di negara Jerman adalah "legal". Suatu tindakan ilegal untuk membantu dan melindungi seorang Yahudi pada jaman pemerintahan Hitler di Jerman. Dan saya percaya bahwa saya akan memiliki sikap yang sama dimana saya akan memberanikan diri membantu saudara Yahudi saya di Jerman jika Hitler masih hidup sekarang meskipun hal itu adalah tindakan ilegal. Jika saya hidup di Afrika Selatan saat ini pada jaman supremasi hukum kulit putih, saya akan bergabung dengan Chief Luthuli dan lainnya yang bersumpah untuk menghancurkan hukum tak berkeadilan ini. Marilah sekarang kita menengok Amerika. Negara kita dalam hal yang sama dilanda tindakan massal ketidak taatan sipil yang dikenal dengan Boston Tea Party. Mereka yang berdiri untuk melawan hukum perbudakan, para pelaku abolisi melalui atau melakukan ketidak taatan sipil. Sehingga saya berpikir para mahasiswa ini berada pada pihak yang benar, dan mereka merasa dengan mempraktekkan ketidak taatan sipil mereka tak ubahnya para pria dan wanita dalam semua umur yang mempertahankan sesuatu yang secara moral benar.

Terdapat satu atau dua hal lainnya yang ingin saya katakan mengenai gerakan mahasiswa ini, diluar filosofi gerakan tanpa kekerasan, sesuatu mengenai perlawanan. Pada satu sisi ini merupakan suatu perlawanan terhadap kesepakatan negatif yang telah berlaku di negara bagian Selatan selama bertahun-tahun. Saya ingat saat saya berada di Montgomery, Alabama, seorang penduduk kulit putih datang padaku suatu hari dan Berkata - dan saya pikir dia sangat bersungguh-sungguh mengenai hal ini - bahwa di Montgomery selama ini kita telah hidup dalam suatu komunitas yang damai, kita demikian selaras dalam hubungan antar ras dan anda serta orang-orang semacam anda memulai dan memboikot, sehingga merusak hubungan antar ras dan kita tidak dapat mencintai orang Negro seperti dulu kita mencintainya, karena anda telah merusak keselarasan dan perdamaian yang dulu pernah kita miliki dalam hubungan antar ras. Dan saya katakan padanya, cara terbaik yang dapat saya katakan dan saya coba katakan dalam istilah tanpa kekerasan, kita tidak pernah memiliki perdamaian di Montgomery, Alabama, kita tidak memiliki perdamaian di negara-negara bagian Selatan. Kita memiliki perdamaian yang negatif dimana tidak terdapat ketegangan; kita memiliki perdamaian negatif dimana kaum Negro secara sabar menerima situasinya dan perjanjian, tetapi kita tidak pernah memiliki perdamaian sebenarnya, kita tidak pernah memiliki perdamaian yang positif; dan itu apa yang kita usahakan sekarang. Karena kita harus melihat bahwa perdamaian tidak hanya sekedar ketidak beradaan kekuatan negatif, melainkan keberadaan kekuatan positif. Perdamaian sejati tidak hanya ketidak beradaan ketegangan; melainkan adanya keadilan dan

persaudaraan. Saya pikir inilah apa yang Yesus maksudkan saat beliau berkata, "Saya tidak datang untuk membawa perdamaian melainkan saya datang membawa sebuah pedang." Yesus tidak bermaksud dia datang untuk memulai peperangan. perkelahian fisik, dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya, dan saya tidak datang untuk membawa perdamaian yang positif. Tetapi saya pikir apa yang Yesus ingin katakan adalah bahwa saya datang tidak untuk membawa perdamaian negatif yang lama, yang membawa sikap pasif dan kepuasan atas diri sendiri melainkan saya datang untuk membawa sesuatu yang baru, dan kapanpun saya datang akan ada pertentangan antara apa yang baru dan lama, perjuangan yang terjadi antara apa yang adil dan tidak, antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan. Saya datang tidak membawa perdamaian yang negatif, tetapi yang positif dimana terdapat persaudaraan, keadilan dan Kerajaan Tuhan.

Beloved Community (Masyarakat Tercinta) : Sebuah Dunia Tanpa Rasisme^{*)}

Rasanya sulit diterima bahwa rasisme masih menjadi kekuatan dominan yang kuat dalam semua sisi kehidupan kita. Ketika saya merenung bahwa bangsa kulit hitam dan kulit putih secara bersama-sama berjuang menentang dan mengubah supremasi kulit putih, ketika saya ingat orang-orang yang kegiatan hidupnya menjadi penyebab keadilan rasial, hati saya tersentak begitu dalam bahwa kita belum memiliki cita-cita untuk mengakhiri rasisme, atau menciptakan suatu budaya baru, sebuah tempat untuk *beloved community* (masyarakat tercinta). Dalam karyanya mengenai perjuangan rakyat sipil, jauh sebelum kesadarannya berubah menjadi radikal melawan militerisme dan imperialisme global dunia Barat, Martin Luther King membayangkan atau mencita-citakan sebuah *beloved community* yang di situ ras ditransendensi, dilupakan, tidak ada diskriminasi hanya karena perbedaan warna kulit. Cita-cita ini belum terwujud. Dari kelahirannya, cita-cita ini menjadi visi yang lemah. Akan tetapi, kelemahan ini bukan citra atau gambaran dari *beloved community*; sebuah masyarakat yang diidamkan ini akan ada hanya jika kita menghapus dan melupakan perbedaan rasial.

^{*)} Resitasi berdasar tulisan Bell Hooks, "*Beloved Community : A World without Racism*, dalam Manfred B. Steger and Nancy S. Lind, *An Interdisciplinary Reader Violence and its Alternatives*, New York, St. Martin's Press, 1999, p.p.308-312

Banyak warga negara Amerika Serikat masih merindukan untuk hidup di sebuah masyarakat yang disitu *beloved community* dapat dibentuk ~ dimana ikatan-ikatan kasih sayang berupa perhatian dan saling kenal menyatukan perbedaan kita. Kita tidak akan mampu menaklukkan kerinduan ini ~ jika kita tidak pernah punya keinginan untuk menyudahi rasisme. Sebagian besar rakyat di masyarakat ini menjadi sinis perihal pengakhiran rasisme tersebut, mereka yakin bahwa solidaritas atau kesetiakawanan di antara perbedaan-perbedaan rasial tidak pernah menjadi realitas, mereka tidak berusaha membangun sebuah masyarakat. Sebagian kita mungkin tidak sinis, yang masih menumbuhkan visi *beloved community*, mempertahankan pendirian kita bahwa kita memerlukan adanya ikatan-ikatan kasih sayang bukan karena kita menganut fantasi utopian tetapi karena kita berjuang sekuat mungkin untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan ini. Walaupun saya berkulit hitam, saya berjuang bersama saudara-saudara kulit putih saya di belahan Selatan yang tersegregasi. Perjuangan dengan mengerahkan semua pikiran dan hati kita, kita akan mampu menyingkirkan rasisme dan supremasi kulit putih jika kita punya keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Kita akan mampu meniadakan rasisme melalui komitmen dan keterlibatan kita dalam perjuangan antirasisme. Walaupun komitmen demikian baru saja terukir dalam pikiran dan hati kita, komitmen ini direalisasikan dengan tindakan nyata, melalui kehidupan dan keberadaan bersama yang antirasisme.

Selama bertahun-tahun, rasa cinta dan kekaguman saya kepada keberpihakan orang-orang kulit hitam dan kulit putih di negeri saya yang bekerja bahu-membahu dalam

merealisasikan keadilan rasial, bertambah mendalam, sebagaimana kasih sayang mereka kepada saya. Kita telah bebas dari masa segregasi legal untuk menciptakan kehidupan yang akrab untuk kita sendiri yang meliputi keterlibatan atau partisipasi kasih-sayang dengan semua ras dan etnis. Lingkaran kecil kasih sayang yang coba kita bangun dalam kehidupan individual kita menggambarkan ingatan realistik yang konkrit bahwa *beloved community* bukanlah impian, *beloved community* akan segera hadir di hadapan kita yang telah bekerja mendidik diri kita sendiri perihal kesadaran penting yang mengabaikan asumsi-asumsi dan nilai-nilai supremasi kulit putih. Proses dekolonisasi (belajar meninggalkan supremasi kulit putih dengan menyingkirkan prestise kulit putih jika kita adalah orang kulit putih atau meninggalkan sisa-sisa rasisme yang sudah mendarah-daging jika kita adalah orang kulit hitam) telah mentransformasi pikiran dan kebiasaan kita.

Di belahan Selatan yang tersegregasi, orang-orang kulit hitam dan kulit putih yang berjuang bersama meraih keadilan rasial (*racial justice*) (sebagian mereka mendasarkan tindakan mereka bukan pada politik rasial tetapi pada pendirian/kepercayaan agama mereka) diikat dengan perasaan/kepercayaan bersama dalam kekuatan kasih sayang yang transformatif. Pemahaman bahwa kasih sayang merupakan antitesis dari kehendak atau keinginan untuk mendominasi/menguasai dan menundukkan, berarti pula ada kerinduan untuk mengenal kasih sayang, untuk saling mencintai dan menyanyangi orang lain, untuk meradikalisasi kita secara politis. Kasih sayang bukanlah sentimental. Kasih sayang tidak membutuhkan kita pada realitas bahwa rasisme

telah disusun secara sangat sistematis, dan supremasi kulit putih tidak akan hilang begitu saja hanya dengan menyadari kasih sayang dalam tindakan politis konkrit yang mungkin melibatkan pengorbanan, bahkan penyerahan nyawa seseorang. Kita menyadari dan memahami manis dan indahnya *beloved community*.

Apa yang belum dipahami oleh sebagian kita dan generasi sebelum kita adalah bahwa *beloved community* dibentuk bukan dengan membasmi perbedaan tetapi dengan memperkuat perbedaan itu, yang masing-masing kita mengklaim warisan identitas dan budaya yang telah membentuk siapa kita dan bagaimana kita hidup dalam dunia. Untuk membentuk sebuah *beloved community*, kita tidak perlu merusak ikatan-ikatan yang sudah terjalin. Kita harus memperkuat ikatan-ikatan itu dengan cara merangkainya dengan perjuangan antirasisme yang selalu menjadi inti gerakan untuk merusak keterikatan kita dengan warisan budaya yang menuntut adanya gagasan kemurnian rasial, otentisitas, fundamentalisme nasionalis. Pendapat bahwa perbedaan warna kulit, latar belakang *class*, dan warisan budaya harus dihapus demi berlangsungnya keadilan dan kesejajaran merupakan tanda kesadaran palsu yang populer yang justru membantu pemikiran dan tindakan yang rasial. Sebagian besar rakyat merasa terancam oleh pendapat bahwa mereka harus menghentikan kesetiiaannya kepada warisan budaya spesifik agar bisa terbentuk suatu harmoni atau keselarasan. Dugaan atau kecurigaan demikian tidak sehat. Sayangnya, sepanjang masyarakat kita memegang visi demokrasi yang mengorbankan ikatan-ikatan dan jalinan yang

kuat pada warisan, maka menentang rasisme dan supremasi kulit putih akan berakibat terjadinya destabilisasi dan kerusakan.

Pendapat salah alamat bahwa kita harus memberikan kesetiaan kultural guna menciptakan keselarasan secara positif sebenarnya muncul dari para pejuang kebebasan beragama yang keimanannya mendesak mereka untuk melepaskan keterikatan mereka pada sesuatu di dunia ini (status, etnis, kesetiaan nasional) agar bisa menyatu dengan Tuhan. Parahnya, pendapat ini didukung oleh para musuh pejuang antirasisme untuk memperparah ketegangan di antara berbagai kelompok rasial yang berbeda, untuk menumbuhkan perasaan fundamentalis dan nasionalis dan mengupayakan dukungan bagi separatisme rasial. Karena ada pendapat bahwa kita semua seharusnya meninggalkan keterikatan pada ras dan/atau identitas budaya dan menjadi "manusia yang adil" (*just human*) di dalam kerangka supremasi kulit putih biasanya berarti kelompok-kelompok subordinat harus melepaskan identitas, kepercayaan, nilai-nilai dan asimilasinya dengan mengadopsi nilai-nilai dan kepercayaan *class* kulit putih yang berprestise, bukannya dengan cara meningkatkan keselarasan rasial, maka pemikiran demikian telah menciptakan proteksionisme kultural yang sangat kuat. Kekuatan konservatif yang berwujud asimilasi penolakan memperlihatkan perlunya nasionalisme kultural, perlunya kelompok *disenfranchised* untuk mendukung separatisme. Banyak orang kulit hitam merasa takut kalau *commodification* dan *appropriation* kulit hitam menjadi strategi neo-kolonial berupa pembasmian/penghapusan budaya yang mengancam

merusak warisan budaya kita. Ketakutan demikian bukan tidak berdasar. Akan tetapi, orang kulit hitam berpikiran sesat bahwa fundamentalisme nasionalis merupakan cara terbaik atau satu-satunya cara untuk melestarikan warisan kita atau untuk memberikan respon politik yang bermakna terhadap pengakhiran rasisme.

Dalam kenyataannya, perkembangan pemikiran separatis nasionalis di kalangan orang kulit hitam merupakan ungkapan ekstrim dari sinisme kolektif perihal pengakhiran supremasi kulit putih. Asumsi bahwa orang kulit putih tidak pernah berhenti untuk bersikap rasis merepresentasikan suatu penolakan terhadap sejarah orang kulit putih yang mau mengorbankan tenaganya untuk berjuang meraih keadilan rasial atas orang-orang kulit putih yang tetap saja berpikiran rasis-kadang tanpa mengetahui/menyadari kalau mereka menganut asumsi rasis. Karena sikap supremasi orang kulit putih dan nilai-nilai mereka menembus hampir semua aspek budaya, maka sebagian orang kulit putih tanpa sadar telah menyerap ideologi supremasi kulit putih. Karena mereka tidak menyadari berlangsungnya sosialisasi supremasi ini, maka sebagian mereka merasa bahwa dirinya bukanlah rasis. Ketika perasaan ini bermula dari penyangkalan, maka tahap pertama dari perjuangan anti-rasis harus memecahkan penolakan atau penyangkalan itu. Ini merupakan salah satu perbedaan pokok antara generasi orang kulit putih yang dibesarkan di tengah-tengah *apartheid* supremasi kulit putih, yang pertama kali menyaksikan pembunuhan brutal terhadap orang kulit hitam dan yang mengetahui bahwa 'rasisme' telah merambah/menembus budaya kita, dan generasi masa kini yang terlibat dalam amnesia historis atau tidak mengingatkannya.

Sebelum terjadi desegregasi, sebagian orang kulit putih berpendirian keras bahwa mereka bukanlah rasis seperti halnya kebanyakan orang kulit putih masa kini, sebagian mereka tidak pernah kontak dengan orang kulit hitam. Selama perjuangan hak-hak sipil (*civil rights*), ada pendapat umum bahwa orang-orang kulit putih yang berusaha hidup dalam dunia anti-rasis mengukur kemajuan dan komitmen mereka melalui interaksi mereka dengan orang kulit hitam. Bagaimana seorang kulit putih dapat berasumsi dia adalah rasis atau bukan rasis jika asumsi itu belum direalisasikan secara konkrit dalam interaksi? Sebagian pejuang kebebasan yang berusaha mencapai keadilan rasial berpendapat bahwa kebiasaan anti-rasis seseorang paling baik dikembangkan dalam situasi interaksi yang menjadi bagian terpenting dari visi masyarakat tanpa rasisme.

Pada saat yang sama, kebanyakan orang kulit putih Amerika Serikat percaya bahwa rasisme yang secara etis dan moral sangat tidak dibenarkan, memusatkan perjuangan anti-rasisnya pada upaya untuk mengadakan komunikasi atau berhubungan dengan orang-orang kulit hitam. Belakangan ini, banyak orang kulit putih yang memandang dirinya sebagai orang non-rasis justru merasa senang jika mereka tidak menjalin kontak dengan orang kulit hitam atau jika ketakutan merupakan respon pertama mereka ketika berjumpa dengan orang kulit hitam (karena orang kulit putih merasa takut jika berjumpa dengan orang kulit hitam). "Ketakutan" ini merupakan pertanda pertama dari internalisasi dalam diri jiwa orang kulit putih berkaitan dengan sentimen supremasi orang kulit putih. Hal ini dimaksudkan untuk menyembunyikan kekuatan dan prestise orang kulit putih. Di masa lampau,

penguatan supremasi kulit putih dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan lewat pernyataan-pernyataan kebencian dan/atau kekuatan (misalnya, subordinasi *public* dan *private* dan penghinaan orang kulit hitam—seorang istri kulit putih yang duduk di meja makan malam sedang menikmati makan siang lezatnya sementara pada saat yang sama pembantu makan sambil berdiri di dapur, majikan pria berkulit putih membayar rendah para pekerja kulit hitam dan memanggil mereka dengan sebutan yang buruk); pada masa kini, anggapan orang kulit putih perihal inferioritas orang kulit hitam paling sering diwujudkan dalam pernyataan kekuatan. Tetapi kekuatan ini seringkali dikaburkan oleh titik berat orang kulit putih pada ketakutan. Ketakutan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam berakar dalam asumsi rasis bahwa wajah yang lebih gelap (hitam) dari sananya sudah tercerabut secara sosial, berbahaya, dan ingin mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan sarana apa saja. Karena diasumsikan bahwa bilamana ketakutan terjadi, maka seseorang menjadi lebih lemah, sehingga mengupayakan ketakutan orang kulit putih terhadap kulit hitam menjadi strategi neo-kolonial yang berguna karena strategi ini mengaburkan realitas yang ada, yaitu sebenarnya orang kulit putih jauh lebih membahayakan daripada orang kulit hitam dan bukan sebaliknya. Strategi ini juga mendorong orang kulit putih untuk percaya bahwa dirinya tidak punya kekuasaan atas orang kulit hitam. Orang-orang kulit putih yang secara sadar menyangkal pemikiran rasis menyadari bahwa tidak ada realitas yang konkrit untuk menunjukkan mereka seharusnya lebih takut pada orang kulit hitam daripada kepada orang kulit lainnya, karena, orang kulit putih, seperti halnya orang kulit hitam, mungkin justru terancam

dari ras yang sama. Saya akan memberikan contohnya. Ketika saya bekerja sebagai asisten profesor di Ivy League university salah satu mahasiswi berkulit putih saya diperkosa oleh orang kulit hitam. Meskipun mahasiswi ini punya komitmen cukup tinggi terhadap karya anti-rasis sebelum diperkosa, namun selama masa penyembuhannya dia mendapati bahwa dia sebenarnya sangat takut kepada semua orang kulit hitam. Komitmen mahasiswi ini terhadap perjuangan anti-rasis menyebabkan dia menanyakan ketakutan itu, dan dia menyadari kalau dia sebenarnya telah diperkosa oleh orang kulit putih (bukan oleh orang kulit hitam sebagaimana dugaan awalnya), dia tidak merasa kalau orang kulit putih harus bertanggung jawab atas perkosaan itu dan merekalah yang seharusnya ditakuti. Dengan melihat ketakutan mahasiswi ini terhadap semua pria berkulit putih sebagai ungkapan regresif (kemunduran) dari rasisme kulit putih, dia membiarkannya. Kehendak untuk tetap waspada muncul dari komitmennya terhadap pengakhiran rasisme dan keinginannya untuk mencintai dan mengasihi komunitas berkulit hitam.

Yang belum pernah terjadi dalam sejarah kita, orang-orang kulit hitam Amerika mengalah pada asumsi rasis dan menginternalisasinya bahwa tidak ada ikatan-ikatan hubungan yang bermakna antara orang kulit hitam dan kulit putih. Sungguh mengejutkan mengetahui mengapa orang kulit hitam yang terjebak dalam situasi operasi rasial yang paling buruk - perbudakan - berpandangan bahwa adalah ketidakberdayaan yang besar bagi mereka jika mereka kehilangan kemampuan sebagaimana dimiliki orang kulit putih untuk mentransformasikan dirinya dan menyingkirkan supremasi kulit putih, walaupun dewasa ini banyak orang kulit hitam

yang menderita penindasan dan eksploitasi rasial yang sangat ekstrim berpendirian bahwa orang-orang kulit putih tidak akan mengakui rasisme. Orang-orang kulit hitam masa kini, seperti halnya orang kulit putih, telah menerima internalisasi asumsi supremasi kulit putih. Para *supremacists* kulit putih yang terorganisir selalu mengajarkan bahwa tidak akan ada kepercayaan dan keintiman antara rasisme kulit putih yang superior dan rasisme kulit hitam yang inferior. Ketika orang kulit hitam menginternalisasikan sentimen ini, tidak terjadi perlawanan terhadap supremasi kulit putih; sebaliknya kita menjadi terlibat intensif dalam menyebarkan gagasan-gagasan rasial. Tidak jadi soal banyak orang kulit hitam merasa orang kulit putih tidak pernah mengakui adanya rasisme karena mereka setiap hari dihina dengan berbagai penolakan orang kulit putih dan penolakan tanggung jawabnya. Kita tidak boleh membiarkan tindakan orang kulit putih yang semena-mena membenarkan rasisme untuk menentukan arah perlawanan kita. Seperti halnya sekutu orang kulit putih kita dalam perjuangan kita, kita harus konsisten menjaga keyakinan, dengan selalu berbagi kebenaran bahwa orang kulit putih bisa anti-rasial, bahwa rasisme bukanlah sifat yang tidak bisa dihapus.

Tentu saja banyak orang kulit putih merasa senang dengan retorika ras yang menunjukkan bahwa rasisme tidak bisa diubah, bahwa semua orang kulit putih "dari sananya sudah rasial" (*inherently racist*) semata karena mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam masyarakat yang rasial. Pemikiran menyesatkan demikian mensosialisasikan orang kulit putih untuk tetap mengabaikan bagaimana sikap *supremacist* kulit putih dipelajari dan menerima sikap ketidakberdayaan seolah-

olah mereka tidak memiliki agensi ~ tidak ada kemampuan untuk merasis pemikiran ini. Untungnya kita punya banyak otobiografi yang ditulis orang kulit putih yang berkomitmen pada perjuangan anti-rasis yang menyediakan kesaksian dokumenter bahwa sebagian individu ini tidak mengakui rasisme ketika mereka masih anak-anak (kenyataannya, ketika dewasa mereka bersikap rasis). Jauh dari menerima keadaan ini sebagai yang bersifat inherens, mereka secara naluriah merasakan sikap rasis tersebut adalah keliru. Sebagian mereka menyaksikan tindakan agresi racist kulit putih terhadap kawan kulit hitamnya dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan respon terhadap ketidakadilan situasi ini. Yang menyedihkan, di jaman kita ini, begitu banyak orang kulit putih dengan mudah diyakinkan oleh orang kulit putih dan kulit hitam yang rasis, yang telah menginternalisasi rasisme dan sehingga mereka tidak pernah bisa bebas dari rasisme.

Perasaan ini juga mengaburkan realitas *privilege* orang kulit putih. Sepanjang orang-orang kulit putih diajari untuk menerima rasisme sebagai sesuatu yang "wajar", maka mereka tidak akan menganggap dirinya sebagai orang yang telah dengan sengaja menciptakan sebuah masyarakat rasis melalui tindakan-tindakan mereka, melalui pilihan politiknya. Ini berarti pula mereka tidak mengetahui/menyadari bagaimana perbuatan rasis menjamin terpeliharanya *privilege* kulit putih. Memang, mengabaikan agensi mereka berarti membiarkan mereka percaya bahwa *privilege* kulit putih tidak ada bahkan ketika mereka menegakkan *privilege* itu. Ketika seorang wanita muda berkulit putih yang telah diperkosa memilih beranggapan bahwa semua orang kulit hitam harus

bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi (perkosaan), dia sebenarnya telah menegakkan *privilege* (karena dia beranggapan tidak mungkin orang kulit putih memperkosa dia) dan memperkuat struktur pemikiran rasis yang mengajarkan bahwa semua orang kulit hitam adalah sama. Sayangnya, begitu banyak orang kulit putih mempercayai kalau rasisme tidak dapat diubah karena mereka telah menginternalisasi bahwa asumsi demikian telah menjadi persoalan tanggung jawab (*accountability*). Menerima rasisme sebagai sebuah sistem dominasi yang bisa diubah berarti semua orang yang memandang dirinya sebagai yang memiliki visi kesejajaran sosial rasial harus memperlihatkan kebiasaan anti-rasis. Kita tahu dari sejarah masa lalu dan masa sekarang bahwa orang kulit putih (dan semua orang lainnya) yang punya komitmen tinggi untuk hidup menurut cara-cara anti-rasis perlu melakukan pengorbanan, bertekad melawan dan mengubah rasisme.

Orang berkulit putih, berkulit warna, dan berkulit hitam enggan memberikan kesanggupannya terhadap perjuangan anti-rasis yang terus berlangsung karena ada perasaan ketidakberdayaan tersebut ~ suatu pendirian bahwa rasisme tidak akan pernah berubah. Bagaimana sebagian kita tetap memegang keyakinan ini ketika kita meneliti sejarah rasisme di masyarakat ini dan menyaksikan betapa banyak perubahan yang terjadi tetapi perubahan itu tidak mengubah rasisme itu sendiri. Jelasnya kita belum melangkah jauh. Pada tahun akhir 1960-an, Martin Luther King mengajukan sebuah pertanyaan "Sudah kemanakah kita." Agar bisa hidup dalam sebuah masyarakat yang anti-rasis, maka kita secara kolektif harus memperbarui komitmen kita terhadap visi demokratis

berupa keadilan dan kesejajaran rasial. Dengan mewujudkan visi ini, berarti kita menciptakan sebuah budaya yang di dalamnya *beloved community* tumbuh subur dan terpelihara. Sebagian kita yang sudah merasakan indahnya berhubungan dengan semua orang, semua ras, yang punya kebiasaan hidup anti-rasis, perlu memberikan testimoni atau kesaksian kepada publik perihal pentingnya sikap anti-rasis. Kita tidak saja perlu berbagi rasa perihal apa yang telah kita alami tetapi juga berbagi rasa perihal keadaan perubahan yang memungkinkan terjadinya pengalaman itu. Lingkaran kasih sayang antar-rasial dapat terjadi karena masing-masing individu yang berada di dalam lingkaran itu punya komitmen untuk menikmati hidup yang anti-rasis dan punya komitmen untuk terus berusaha mengakhiri supremasi kulit putih. Keadaan ini akan terwujud dengan baik untuk semua orang jika sebagian kita yang telah menciptakan komunitas ini berbagai rasa perihal bagaimana *beloved community* muncul dalam kehidupan kita dan perihal strategi yang kita terapkan untuk melestarikannya. Komitmen kita untuk membangun beragam komunitas sangatlah penting. Komitmen terhadap kehidupan anti-rasis ini merupakan salah satu ekspresi siapa kita dan apa yang kita rasakan dengan orang lain tetapi juga membentuk fondasi untuk sharing tersebut. Seperti halnya semua *beloved community*, kita memperkuat perbedaan kita. Semangat penguatan perbedaan inilah yang memberi kita suatu dorongan yang kuat untuk saling berhadapan dengan yang lain, untuk bekerja melalui kesalahpahaman, khususnya kesalahpahaman yang berhubungan dengan ras dan rasisme. Dalam sebuah *beloved community*, solidaritas dan kepercayaan (*trust*) didasarkan pada

komitmen yang mendalam terhadap visi bersama (*shared vision*). Sebagian kita yang selalu merindukan dunia yang anti-rasis yang di dalamnya semua orang dapat membangun sebuah *beloved community* dimana batas-batas dapat dilintasi dan hibriditas budaya dihormati. Semua orang mampu membuat *beloved community* dengan berusaha sepenuh hati untuk hidup dalam dunia yang anti-rasis. Jika kerinduan ini menuntun visi dan tindakan kita, maka budaya baru akan terlahir dan komunitas anti-rasis akan bermunculan di mana-mana. Inilah masyarakat yang kita idamkan itu.

Bebas Dari Rasa Takut^{*)}

Bukan kekuatan yang melakukan manipulasi melainkan rasa takut. Rasa takut kehilangan kekuatan memanipulasi mereka yang memiliki dan mempergunakannya serta rasa takut akan menjadi korban kekuatan memanipulasi mereka yang menjadi subyeknya. Sebagian besar orang Birma mengetahui empat *a-gati*, empat macam manipulasi. *Chanda-gati*, manipulasi yang ditimbulkan oleh keinginan napsu, merupakan pembelokan dari jalur semestinya karena melakukan suap atau demi kepentingan dari seseorang. *Dosa-gati* adalah melakukan kesalahan karena memiliki keinginan yang buruk terhadap mereka yang melawan siapapun yang memiliki keinginan buruk, dan *moha-gati* adalah menghindari apa yang semestinya harus dilakukan dan hanya berdiam diri. Tetapi yang paling buruk dari keempatnya adalah *bhaya-gati*, karena tidak hanya *bhaya*, tetapi rasa takut, rasa terpaksa perlahan-lahan menghancurkan semua pengertian baik dan buruk, ini yang seringkali menjadi akar dari tiga manipulasi lainnya.

Chanda-gati jika tidak merupakan hasil ketamakan, dapat juga disebabkan oleh rasa takut akan perasaan ingin memiliki atau rasa takut kehilangan apa yang seseorang cintai, sehingga rasa takut itu ditekan, ditindas dalam beberapa cara

^{*)} Resitasi berdasar tulisan Aung San Suu Kyi, "*Freedom from Fear*", dalam Manfred B. Steger and Nancy S.Lind, *An Interdisciplinary Reader Violence and its Alternatives*, New York, St Martin's Press, 1999, p.p.313-316.

yang dapat menimbulkan lahirnya keinginan buruk. Sehingga akan sulit untuk mengusir rasa tidak peduli kecuali ada kebebasan untuk melakukan kebenaran terbebas dari rasa takut. Dengan dekatnya hubungan antara rasa takut dan manipulasi sungguh tidak mengejutkan bila pada kebanyakan masyarakat dimana rasa takut merupakan manipulasi yang banyak ditemui dalam semua bentuknya menjadi rahasia umum.

Ketidak puasan publik dengan keadaan perekonomian dilihat sebagai penyebab utama gerakan demokrasi di Burma, dicetuskan melalui demonstrasi mahasiswa di tahun 1988. Benar apabila masa kebijakan tanpa koherensi, tindakan resmi yang dilaksanakan secara tidak tepat, semakin naiknya inflasi dan penurunan pendapatan telah membuat negara ini tenggelam dalam kegoncangan perekonomian. Meskipun hal tersebut lebih dari sekedar kesukaran untuk menyediakan standar penghidupan dasar yang dapat diterima telah menyurutkan kesabaran masyarakat yang dahulunya baik-juga merupakan penghinaan suatu bentuk kehidupan yang disebarkan oleh manipulasi dan rasa takut. Para mahasiswa melakukan protes bukan hanya atas kematian rekan-rekannya tetapi juga atas penolakan hak-hak mereka atas kehidupan oleh rezim totaliter yang memberikan kehidupan masa sekarang tidak berarti dan tidak memberikan harapan di masa mendatang. Dan karena protes para mahasiswa diartikulasikan atas rasa frustrasi masyarakat kebanyakan, demonstrasi tersebut dengan cepat menyebar menjadi gerakan nasional. Beberapa diantara pendukungnya adalah para pelaku bisnis yang telah mengembangkan keterampilan dan hubungannya tidak hanya penting untuk

kelangsungan bisnisnya tetapi juga untuk sukses dalam sistem bisnis. Meskipun pengaruh yang mereka tawarkan bukanlah rasa untuk mendapatkan sekuritas atau pemenuhan semata-mata serta mereka hanya melihat diri mereka dan teman mereka sebagai sesama warga negara, bukan status ekonomi, untuk mencapai eksistensi yang lebih baik, suatu pemerintahan yang bertanggung jawab itulah yang dibutuhkan jika tidak bukan suatu kondisi yang berkecukupan. Masyarakat Birma telah lelah dengan keadaan tidak menentu dari keadaan pasif dimana mereka tak ubahnya "sebagai air dalam genggam tangan" dari kekuatan yang ada.

Kita mungkin telah menjadi zamrud

Tak ubahnya air dalam genggam tangan

Tetapi oh kita mungkin menjadi

Pecahan kaca

Dalam genggam tangan

Kepingan kaca, dengan bagian runcingnya, kekuatan berkilauan untuk mempertahankan diri terhadap tangan yang berusaha untuk meremukannya, dapat dipandang sebagai simbol dari meletusnya keberanian yaitu atribut penting bagi mereka yang akan membebaskan diri dari genggam penindas. Bogyoke Aung San menyebut dirinya seorang revolusioner dan mencari tanpa henti jawaban atas permasalahan yang melanda Birma selama ini. Dia menganjurkan masyarakat untuk menumbuhkan keberanian : "Jangan hanya bergantung pada keberanian orang lain. Masing-masing dari anda dan semuanya harus mau mengorbankan diri untuk menjadi pahlawan yang memiliki keberanian.

Sehingga kita semuanya dapat menikmati kebebasan yang sebenarnya."

Usaha tersebut penting untuk meninggalkan mereka yang tidak termanipulasi dalam suatu lingkungan dimana rasa takut telah menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari yang tidak tampak dengan cepat pada masyarakat yang cukup beruntung hidup di negara yang diatur oleh peraturan hukum. Hukum tidak hanya mencegah manipulasi tetapi juga memberikan hukuman setimpal bagi penindas. Hukum membantu menciptakan suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan intinya yang diperlukan demi kelestarian harga diri manusia tanpa diricuhkan dengan praktek-praktek manipulasi. Tanpa adanya hukum semacam ini, kewajiban pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dan moral akan menurun pada masyarakat. Merupakan akibat dari usaha dan kemunculannya yang ajeg akan mengubah suatu bangsa dimana pemikiran dan kesadaran dibungkus menjadi satu oleh rasa takut dimana aturan hukum yang ada mempromosikan keinginan manusia atas keselarasan dan keadilan sementara itu mengekang sebagian kecil sifat merusak yang ada dalam manusia itu sendiri.

Pada jaman dimana kemajuan teknologi yang pesat telah menciptakan senjata-senjata yang mematikan yang dapat dan digunakan oleh mereka yang kuat dan tidak memiliki tujuan untuk mendominasi mereka yang lemah dan tak berdaya, sehingga terdapat suatu kebutuhan yang mendesak bagi hubungan erat antara politik dan etnik baik pada tingkat nasional atau internasional. Deklarasi Semesta Hak-Hak Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dari Amerika Serikat memproklamkan bahwa "Setiap individu dan setiap

bagian masyarakat" harus berusaha untuk mewujudkan hak asasi dan kebebasan atas semua umat manusia tanpa memandang ras, bangsa atau agamanya. Tetapi selama ada pemerintahan yang memiliki otoritas yang dibangun diatas penindasan bukannya mandat rakyat dan kepentingan kelompok yang meletakkan keuntungan jangka pendek diatas perdamaian dan kemakmuran dalam jangka panjang, merancang tindakan internasional untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak manusia hanyalah akan terwujud sebagian saja. Akan terus ada medan pertempuran dimana para korban penindasan harus menarik sumber daya dalam dirinya untuk mempertahankan hak mereka sesungguhnya sebagai bagian dari umat manusia.

Revolusi hebat itu ditimbulkan oleh semangat yang lahir dari pemikiran atas perlunya perubahan dalam sikap dan nilai mental semacam itu yang membentuk bagian pertumbuhan suatu bangsa. Suatu revolusi yang hanya bertujuan mengubah kebijakan dan lembaga resmi dengan suatu pandangan atas perbaikan dalam kondisi materi akan memiliki tingkat keberhasilan yang kecil. Tanpa revolusi dari jiwa, kekuatan yang akan menghasilkan ketidakadilan pemerintahan sebelumnya berlanjut menjadi ancaman yang operatif dan konstan terhadap proses reformasi dan regenerasi. Tidak cukup untuk mewujudkan kebebasan, demokrasi dan hak-hak manusia. Harus terdapat suatu determinasi terpadu yang melekat pada perjuangan, pengorbanan atas nama kebenaran, bertahan dari pengaruh keinginan yang memanipulasi, keinginan buruk, ketidakpedulian dan rasa takut.

Orang suci, dikatakan sebagai pendosa yang berubah. Dan para manusia merdeka sebagai orang yang tertindas dan dalam proses untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakan kewajiban dan memegang disiplin yang dipertahankan masyarakat yang merdeka. Diantara kebebasan dasar yang mengilhami manusia adalah mereka dapat hidup sepenuhnya dan tidak terikat apapun, bebas dari rasa takut berarti sebagai alat dan tujuan akhir. Suatu bangsa yang akan membangun negara dimana institusi yang demokratis dan kuat dibentuk sebagai suatu jaminan terhadap kekuatan yang membahayakan negara pertama-tama harus belajar untuk membebaskan pikiran mereka dari apatis dan rasa takut.

Satu hal yang selalu dipraktikkan Aung San dalam menunjukkan rasa keberanian-bukan semacam kekuatan fisik melainkan adalah apa yang mendorongnya untuk berbicara kebenaran, menepati perkataannya, menerima kritikan, mengakui kesalahannya, berusaha mengkoreksi kesalahannya, menghormati pihak lawan, bertukar pendapat dengan pihak musuh dan memberikan kesempatan pada masyarakat menjadi penilai atas kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Inilah keberanian moral yang membuat dia selalu dicintai dan dihormati di Birma-bukan hanya sebagai pahlwan tetapi juga sebagai pemberi inspirasi dan kesadaran dari bangsa tersebut. Perkataan yang digunakan oleh Jawaharlal Nehru untuk menggambarkan Mahatma Gandhi dapat diaplikasikan dengan baik pada Aung San : "Esensi pengajarannya adalah tidak adanya rasa takut dan kebenaran, serta tindakan yang didasarnya, selalu menjaga kesejahteraan rakyat dalam segala hal."

Gandhi sebagai orang yang anti kekerasan (*non-violence*) dan Aung San sebagai pendiri kekuatan nasional Birma adalah orang yang berbeda meskipun terdapat kesamaan yaitu pertentangan dari pemerintahan otoriter dimanapun dan kapanpun, sehingga terdapat kesamaan dalam kualitas intrinsik mereka yang bangkit melawan pertentangan tersebut. Nehru, yang dianggap sebagai pencetus keberanian pada masyarakat India adalah salah satu dari keberhasilan Gandhi, sebagai seorang politikus modern, sebagaimana dia menyatakan kepentingan gerakan abad kedua puluh atas kemerdekaan, Nehru telah melihat kembali filosofi kuno bangsa India : "Karunia terbesar bagi seorang manusia atau bangsa adalah *abhaya*, bebas dari rasa takut, tidak hanya keberanian fisik tetapi juga tidak adanya rasa takut dari pikiran."

Bebas dari rasa takut dapat berupa suatu karunia meskipun akan jauh lebih berharga bila keberanian itu timbul melalui usaha, yang datang dari kebiasaan untuk menolak membiarkan rasa takut mendikte tindakan seseorang, keberanian yang dapat digambarkan sebagai "karunia dibawah tekanan"-karunia yang selalu diperbaharui dalam menghadapi tekanan yang keras dan terus menerus.

Dalam suatu sistem dimana penolakan eksistensi hak-hak asasi manusia, rasa takut cenderung menjadi perintah dalam kehidupan. Rasa takut dipenjara, rasa takut akan kematian, rasa takut kehilangan teman, keluarga, kekayaan atau kebutuhan hidup lainnya, rasa takut akan kemiskinan, rasa takut akan pengasingan, rasa takut akan kegagalan. Suatu bentuk rasa takut yang paling samar adalah apa yang menutupi

pemikiran wajar atau bahkan kebijakan, dinyatakan sebagai tindakan keberanian sehari-hari yang tidak wajar, tidak signifikan atau tak semestinya demi rasa menghormati diri sendiri dan harga diri manusia. Bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang terkondisi dengan pemerintahan tirani dapat membebaskan diri dari rasa takut. Meskipun dalam negara yang paling kacau keberanian akan terus bangkit, karena rasa takut bukanlah keadaan alamiah manusia beradab.

Tumbuhnya keberanian dan kelangsungan pertumbuhannya dalam menghadapi kekuatan yang menekan adalah suatu kepercayaan dalam kesucian prinsip-prinsip dari suku bangsa yang dikombinasikan dengan pemikiran historis diluar semua kondisi manusia yang diatur untuk tujuan akhir demi kemajuan kehidupan spritual dan material. Kemampuan diri untuk melakukan perbaikan diri dan membebaskan diri dari kekangan apapun yang membedakan manusia dengan hewan. Dasar dari kewajiban manusia adalah konsep kesempurnaan, dorongan untuk meraihnya, kemampuan berpikir untuk menemukan cara menuju kesempurnaan, dan kehendak untuk mengikuti cara tersebut jika tidak dapat sampai tuntas setidaknya jarak yang diperlukan untuk bangkit diatas keterbatasan manusia dan rintangan dari lingkungan. Visi manusia atas dunia yang baik bagi kemanusiaan yang beradab akan membimbingnya untuk berani dan menderita dalam membangun masyarakat yang terbebas dari rasa ingin dan rasa takut. Konsep semacam kebenaran, keadilan dan perasaan cinta sesama harus dipertahankan sebagai benteng pertahanan dari kekuatan yang semena-mena.

Dibalik Perang Berkeadilan Dan Paham Perdamaian : Perjuangan Tanpa Kekerasan Menuju Keadilan, Kebebasan Dan Perdamaian*)

Perjuangan Tanpa Kekerasan Sebagai Satu Pilihan Yang Realistis

Meskipun banyak kemajuan telah tercipta, dunia masih jauh dari terwujudnya keadilan, kebebasan dan perdamaian. Isu politik dan moral terbesar adalah bagaimana tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai. Pertama-tama artikel ini akan menjabarkan secara singkat peran penting perjuangan tanpa kekerasan dalam memajukan tujuan ini, kemudian survei atas pernyataan resmi oleh beberapa gereja Kristen dan badan-badan gereja terhadap sumbangan pentingnya dari tindakan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan ini. Secara bersama-sama, penjabaran ini dan pernyataan tersebut memiliki implikasi bagi suatu pertimbangan ulang relevansi yang ada dewasa ini dari perang yang berkeadilan dan para pencetus perdamaian dalam memperjuangkan posisi. Disamping itu juga memiliki implikasi bagi tindakan konstruktif untuk mengembangkan pertimbangan dan aplikasi perjuangan tanpa kekerasan.

*) Resitasi berdasar atas tulisan Gene Sharp, "*Beyond Just War dan Pacifism*", dalam Manfred B. Steger and Nancy S. Lind, *An Interdisciplinary Reader Violence and its Alternatives*, New York, St. Martin's Press, 1999, p.p. 317-333

Pembahasan ini berdasarkan pada asumsi berikut ini

:

- Sangat diharapkan para penganut keagamaan melaksanakan secara bertanggung jawab isu bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip mereka dalam menghadapi permasalahan masyarakat yang tinggal pada suatu dunia yang buruk dan menghadapi tekanan atas keadilan, kebebasan dan perdamaian.
- Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tersebut, menyingkirkan penindasannya serta mencegah dan mengalahkan kekerasan juga agresi yang ditujukan pada mereka.
- Sangat diperlukan dan diharapkan untuk bekerja dengan orang-orang dari agama lain yang memiliki komitmen sama terhadap keadilan, kebebasan dan perdamaian serta kesediaan untuk bertindak dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan menghormati harkat martabat manusia.

Kita menggunakan istilah "keadilan", "kebebasan", dan "perdamaian" dalam pengertian berikut :

Keadilan sosial adalah suatu kondisi dimana semua orang diperlakukan secara adil dan dengan hormat, tanpa adanya dominasi, eksploitasi atau penindasan. Terwujudnya keadilan sosial membutuhkan baik perangkat perjuangan untuk pemberdayaan rakyat dan perangkat untuk membangun suatu masyarakat yang lebih berkeadilan.

Kebebasan termasuk diantaranya partisipasi demokratis dalam pembuatan keputusan, kebebasan secara pribadi dan masyarakat serta menghormati pihak lain. Hal ini selalu sukar dicapai. Bahaya terkini bagi kebebasan dapat timbul dari sumber-sumber yang tidak diharapkan. Bahkan dalam demokrasi yang paling baik sekalipun, seringkali terdapat pelanggaran atas kebebasan sipil, pengendalian yang bersifat manipulatif yang dapat diaplikasikan serta ancaman terhadap bentuk-bentuk demokrasi yang dapat muncul dari kudeta dan rezim ekspansionis. Hal ini memerlukan alat penolak yang efektif. Kita juga membutuhkan program yang potensial mencegah munculnya kediktatoran baru dan melakukan disintegrasi dari bentuk diktator yang ada saat ini.

Perdamaian sebagaimana dijelaskan disini, adalah ketidak beradaan atau berakhirnya permusuhan militer antara negara-negara yang berselisih dan unit-unit lain yang berperang (semacam dalam perang sipil). Suatu masyarakat dalam keadaan berdamai akan menjadi baik dan seringkali mampu mengendalikan konflik internal ataupun usaha-usaha untuk meningkatkan masyarakat dalam melestarikan kualitas pusakanya.

Perdamaian tidak selalu datang pada mereka yang telah hidup damai. Perdamaian masih jauh dari yang diharapkan, meskipun perang dingin telah berakhir. Seringkali perdamaian diserang melalui agresi militer, kudeta, perang sipil, pertumpahan darah dan pembunuhan massal. Ancaman selanjutnya terhadap perdamaian ditunjukkan melalui pengumpulan dalam jumlah besar persenjataan militer dan penyebaran senjata nuklir, kimia dan biologi.

Pertahanan diri diperlukan untuk melawan serangan atas perdamaian. Pertanyaan pentingnya adalah : (1) Bagaimana pertahanan diri dapat dicapai tanpa ikut melakukan pembunuhan massal dan serangan atas larangan yang bersifat keagamaan dan berperikemanusiaan melawan kekerasan massal? dan (2) Bagaimana serangan dapat dicegah dan dikalahkan serta perdamaian tetap terjaga sesuai dengan keadilan dan kebebasan?

Tujuan dari keadilan, kebebasan dan perdamaian seringkali merupakan hal yang baik. Permasalahan yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mencapai dan menjaga ketiga hal tersebut. Bila orang-orang tidak menghadapi secara pasif penindasan dan serangan, mereka harus memiliki perangkat pengendali yang efektif. Seringkali diasumsikan bila perlawanan terhadap musuh yang besar membutuhkan pelaksanaan perjuangan militer, yang mungkin saja dibatasi pada perangkat yang digunakan (*jus in bello*).

Orang seringkali mempertimbangkan bila perangkat alternatif perjuangan yang efektif tanpa kekerasan adalah mustahil. Kekerasan dianggap sebagai alat usaha terakhir, diasumsikan sebagai alat perjuangan yang paling kuat yang dapat digunakan. Konflik secara pasti akan berlanjut di masa mendatang. Pada konflik yang telah menahun, jika orang-orang menganggap kekerasan sebagai pilihan yang paling efektif, mereka akan terus memilih kekerasan dalam melakukan perjuangannya. Pilihan semacam itu akan terus memiliki konsekuensi yang tragis.

Jadi, bila kita hanya melihat kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk melakukan perjuangan yang kuat, kita akan gagal memperhatikan tanda terbesar dari harapan akan

kemanusiaan : pertumbuhan dan signifikasi jenis konflik lainnya, "sanksi terakhir lainnya"-perjuangan tanpa kekerasan. Ini yang seringkali disebut sebagai kekuatan masyarakat, penolakan politis, tindakan tanpa kekerasan, non-kooperasi atau pertahanan sipil.

Kita semestinya mengingat dengan baik revolusi "kekuatan masyarakat (*people power revolution*)" di Philipina pada tahun 1986, perjuangan tanpa kekerasan selama sepuluh tahun di Polandia yang berakhir dengan tumbangny sistem komunis, revolusi Jerman Timur dan Revolusi Beludru (*Velvet Revolution*) di Czechoslovakia pada tahun 1989, kekalahan korps jalur keras di Uni Sovyet di tahun 1991. Perjuangan semacam ini dewasa ini merupakan bagian penting dunia; meskipun banyak orang yang telah melupakannya atau tak memperdulikannya.

Banyak kasus lain dari perjuangan tanpa kekerasan telah terjadi. Diantara yang paling banyak dikenal adalah perjuangan Gandhi demi kemerdekaan India pada tahun 1920an, 1930an dan 1940an serta perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1950an dan 1960an. Meskipun hal tersebut bukan tipikal dari jangkauan terbesar perjuangan tanpa kekerasan. Kasus penting lainnya diantaranya demonstrasi kaum wanita di Berlin pada tahun 1943 untuk menyelamatkan suami mereka yang keturunan Yahudi, perjuangan guru-guru di Norwegia pada tahun 1942 melawan usaha pemerintahan fasis untuk mengontrol sekolah-sekolah, penggulingan pemerintahan diktator di El Savador dan Guatemala pada tahun 1944, ancaman untuk melakukan boikot dan unjuk rasa di Afrika Selatan pada tahun 1980an

melawan ketidakadilan sistem *apartheid*. Gerakan pendahulunya diantaranya adalah perjuangan internasional kaum wanita untuk mendapatkan hak pilih dan organisasi serta unjuk rasa oleh kaum buruh di banyak negara atas hak untuk mengatur dan mendapatkan tunjangan yang layak serta kondisi kerja yang lebih baik. Tindakan tanpa kekerasan sementara ini telah terbukti lebih kuat dan efektif dibandingkan tindakan dengan kekerasan.

Kasus ini dan lainnya relevan dengan penemuan solusi yang lebih baik terhadap permasalahan moral dan politik yang kita hadapi dalam usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan, kebebasan dan perdamaian. Tidak menghadirkan suatu keinginan berlanjut bagi pembunuhan besar-besaran. Meskipun dibawah kondisi tertentu perangkat perjuangan tanpa kekerasan diaplikasikan pada konflik menahun telah menawarkan suatu jalan keluar dari lingkaran pembunuhan dari tindakan kekerasan serta merupakan suatu pilihan di masa mendatang.

Perjuangan tanpa kekerasan menggunakan kekuatan lain selain kekerasan. Tindakan tanpa kekerasan menawarkan suatu alternatif terhadap kekerasan demi tercapainya dan mempertahankan keadilan, kebebasan dan perdamaian-suatu pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen dan tanggung jawab masyarakat, suatu pendekatan yang memiliki keefektifitasan dengan sedikitnya konsekuensi tragis dan semakin memuaskannya hasil jangka panjang.

Sifar Perjuangan Tanpa Kekerasan

Aksi tanpa kekerasan merupakan suatu teknik memobilisasi dan mengaplikasikan potensi kekuatan

masyarakat dan kelompok untuk meraih tujuan dan kepentingan melalui "senjata" non-militer-psikologis, politis, sosial, ekonomi dan spiritual.

Aksi tanpa kekerasan diantaranya adalah protes, non-kooperasi dan intervensi tanpa kekerasan fisik. Orang yang menggunakan teknik ini menolak untuk melakukan sesuatu sebagaimana mereka diminta atau diperintahkan melakukannya, atau mereka bersikeras untuk tetap tidak melaksanakan sesuatu yang tidak biasanya mereka lakukan atau sesuatu yang dilarang untuk mereka lakukan. Kelas metode spesifik atau bentuk tindakan adalah : protes dan persuasi tanpa kekerasan (berisikan tindakan-tindakan simbolis, semacam berdoa bersama, melakukan march dan pengibaran bendera-bendera); non-kooperasi (termasuk diantaranya boikot sosial, boikot ekonomi, unjuk rasa kaum buruh dan beberapa jenis non-kooperasi politik); serta intervensi tanpa kekerasan (yaitu aksi duduk, mogok makan dan kekuatan untuk mengatur sejenisnya).

Dihadapkan dengan tantangan semacam ini terhadap sumber kekuatannya, pihak oponent diharapkan mengaplikasikan penekanan. Penekanan ini, seringkali tidak efektif dalam menghentikan perjuangan tanpa kekerasan dan dapat memutar balikkan arah berbagai kelompok, sehingga penekanan sebenarnya akan melemahkan pihak oponent dan menguatkan kelompok perjuangan tanpa kekerasan. Proses tersebut dikenal dengan "jiu-jitsu politis (*political jiu-jitsu*)": kekerasan yang dilakukan pihak oponent dapat menghimpit posisi mereka.

Jika perjuangan ini meraih sukses, dilakukan melalui satu atau kombinasi dari empat mekanisme : konversi

(*conversion*) (perubahan opini atau kepercayaan pihak oponen); akomodasi (*accommodation*) (melakukan kompromi untuk mencapai sebagian dari tujuan perjuangan tersebut); koersi tanpa kekerasan (*nonviolent coercion*) (memaksa pihak oponen untuk menjamin tuntutan); atau disintegrasi (*disintegration*) (menyebabkan sistem atau pemerintahan pihak oponen jatuh sepenuhnya).

Perjuangan tanpa kekerasan dioperasikan melalui memobilisasi potensi kekuatan rakyat dan institusi untuk mendorong mereka tidak hanya pemberdayaan kekuatannya tetapi juga untuk membatasi atau mengurangi sumber kekuatan oponen mereka (semacam otoritas atau legitimasi, sumber daya manusia, keterampilan dan pengetahuan, faktor-faktor tak berwujud yang memberikan dukungan atau kepatuhan, sumber materi dan sangsi).

Perjuangan jenis ini mendorong pilar pendukung ditarik keluar dari bawah bangunan penindasan. Marilah kita berfokus pada saat dimana penindasan yang dilakukan pemerintahan diktator atau pendudukan bangsa asing (menyadari bahwa penindasan di bidang sosial dan ekonomi juga perlu dibasmi hingga tuntas). Kekuatan tirani dan sistem yang opresif, dari para diktator dan pelaku agresi, bergantung pada dukungan yang mereka terima-penerimaan legitimasi pihak penindas secara luas dan kewajiban untuk mematuhi, pelaksanaan sistem ekonomi, menfungisikan secara berkelanjutan pegawai negeri dan birokrasi, kepatuhan pihak angkatan bersenjata, realibitas pihak kepolisian, persetujuan yang diberikan badan-badan keagamaan, kerjasama para pekerja dan manajer serta sejenisnya.

Jika pertama-tama anda melemahkan, kemudian mereduksi dan akhirnya menarik dukungan dari semua badan masyarakat tersebut, anda menghasilkan sesuatu semacam unjuk rasa sosial politik yang meluas dengan cepat yang akan membatasi atau melemahkan sumber kekuatan pihak oponen. Kita paham bagaimana mogok kerja para buruh dapat melumpuhkan suatu pabrik industri. Mempertimbangkan suatu masyarakat politik yang mengaplikasikan prinsip non-kooperasi serupa dalam melawan penindasan: pemimpin keagamaan dan moral memperingatkan rezim dengan meninggalkan tidak adanya kepatuhan dan berkhotbah mengenai kewajiban dari ketidak patuhan dan revolusi tanpa kekerasan dalam melawan rezim tersebut; para pegawai negeri dapat memilih mogok kerja atau beroperasi sebagaimana mereka inginkan, tak mengindahkan perintah-perintah rezim yang berkuasa; para angkatan bersenjata tidak patuh dan memberontak, atau bahkan bergabung dengan para demonstran; polisi menolak untuk menahan pembangkang patriotik; kaum kapitalis dan pengusaha menghentikan aktivitas ekonominya; para buruh mogok kerja; transportasi melakukan mogok kerja. Segala sesuatu lumpuh. Bayangkan seorang diktator dibawah kondisi semacam ini mengeluarkan perintah bagi revolusi yang harus dilaksanakan besok-dan perintah tersebut tidak dihiraukan semua orang.

Untuk memaksimalkan kekuatan perjuangan tanpa kekerasan, pengembangan dan pengaplikasian strategi yang tepat sangatlah penting. Meskipun sangat jarang mereka yang melaksanakan perjuangan semacam ini sepenuhnya menyadari sangat pentingnya persiapan suatu rencana strategi yang komprehensif sebelum mereka bertindak. Dikarenakan

bermacam alasan para unjuk rasa ini seringkali tidak berusaha untuk memikirkan dan merencanakan secara strategis bagaimana mewujudkan tujuannya. Sebagai hasilnya, kesempatan untuk berhasil berkurang bahkan hilang secara drastis. Tidak ada rencana yang membimbing penggunaan sumber yang mereka miliki secara efektif dalam mencapai tujuan konflik. Kekuatan mereka menjadi sia-sia. Tindakan mereka tidak efektif. Pengorbanan mereka menjadi sia-sia dan alasan mereka tidak diterima dengan baik.

Sebaliknya, perumusan dan penggunaan strategi meningkatkan kesempatan untuk sukses. Kekuatan dan aksi mereka difokuskan untuk mendukung tujuan utama secara lebih efektif. Kasualitas dapat dikurangi dan pengorbanan dapat membantu tujuan utama secara lebih efektif. Aksi yang terarah sehubungan dengan rencana strategi membantu kekuatan terkonsentrasi untuk menuju tujuan yang diinginkan.

Sangat signifikan bila teknik ini telah dan dapat digunakan oleh masyarakat yang menolak suatu kepercayaan tentang kebaikan "aksi tanpa kekerasan", yang tidak menerima larangan moral atas penggunaan kekerasan dan mendukung kemungkinan "perang berkeadilan" dibawah kriteria yang telah pakem. Dalam konflik tertentu berdasarkan dikeluarkannya pernyataan semacam kebebasan, keadilan dan pertahanan mungkin bagi massa yang tidak mempercayai "aksi tanpa kekerasan" yang kemudian menggunakan teknik tanpa kekerasan ini.

Berbeda dengan asumsi yang biasanya ada, sangat jarang dari banyaknya kasus di masa lampau perjuangan tanpa kekerasan yang menggunakan prinsip aksi tanpa kekerasan

sebagai suatu faktor signifikan dalam menggunakan dan mengimplementasikan teknik tersebut. Faktor-faktor pragmatis sangat penting bahkan dalam kepemimpinan baik oleh Gandhi dan Martin Luther King (keduanya merupakan tipikal dalam sejarah pemimpin perjuangan tanpa kekerasan). Dalam berbagai bahasan dimana faktor-faktor tersebut dilibatkan dalam konflik tanpa kekerasan yang serius-seperti dalam pendudukan West Bank, di Panama, Beijing, Lithuania, Latvia dan Estonia serta pada kebanyakan kasus lainnya-pertimbangan pragmatis yang selalu diungkapkan dalam menjawab pertanyaan mengenai motif-motif pemilihan cara-cara aksi tanpa kekerasan.

Perjuangan tanpa kekerasan dapat dipraktekkan oleh masyarakat dalam negara yang belum merdeka, yang mampu bertindak tanpa menggunakan kekerasan. Cara semacam ini tersedia bagi semua orang yang memiliki keinginan sama atas keadilan, kebebasan dan perdamaian. Sementara itu sebagian kecil individu yang mampu "mendapatkan perhatian pihak lain" dalam semangat cinta kasih dan pemberian maaf, akan makin banyak yang mampu memahami hal tersebut untuk tujuan tertentu mereka bahwa aksi tanpa kekerasan menawarkan kesempatan paling baik untuk sukses. Kekerasan kepala manusia bersama dengan penaksiran akan nilai harkat martabat manusia dan penggunaan cara-cara tanpa kekerasan telah menunjukkan wajahnya.

Saat aksi jenis ini dipahami sebagai teknik non-doktrin, dilaksanakan melalui proses yang mampu dipahami, mampu menghasilkan hasil kemanusiaan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan aksi dengan kekerasan, aksi ini

memiliki potensi yang digunakan secara meluas dalam situasi dimana masyarakat dan institusi dapat melaksanakannya.

Perkembangan Historis Aksi Tanpa Kekerasan

Perjuangan tanpa kekerasan memiliki sejarah berabad-abad lampau. Satu contoh dari era sebelum agama Kristen yang terjadi di Roma pada tahun 494 SM, saat golongan masyarakat kelas bawah dibuang dari kota menuju suatu bukit (yang kemudian dikenal dengan "Bukit Sakral (*Sacred Mount*)") demikian juga pembunuhan para penasihat yang berusaha membenahi kesalahan. Mereka tinggal di bukit tersebut selama beberapa hari, menolak memberikan kontribusi mereka pada kehidupan kota Roma. Suatu perjanjian akhirnya tercapai yang menyatakan perbaikan signifikan pada kehidupan dan status mereka.

Dengan memperkirakan kecenderungan historis dalam penggunaan aksi tanpa kekerasan adalah hal yang sulit, karena tidak adanya kepastian atas survei historis yang lengkap atas praktek-prakteknya. Meskipun beberapa cendekiawan yang memiliki informasi dengan baik menyarankan bila teknik ini dipraktekkan secara lebih luas pada akhir abad ke 20. Jelasnya menjadi suatu akselerasi pada peristiwa tersebut, skala dan pentingnya penggunaan perjuangan tanpa kekerasan disebagian besar dunia.

Hingga pada tahun 1980, sebagian orang yang memikirkan bila perjuangan tanpa kekerasan dalam satu dekade ini akan menjadi suatu kekuatan besar dalam membentuk pendidikan politik di seluruh dunia. Karena kita telah mengalami, ditambah lagi contoh-contoh dari "kekuatan rakyat" yang disebutkan diatas, kampanye penolakan rakyat

untuk pemerintahan sipil di Thailand pada tahun 1942, perjuangan kemerdekaan tanpa kekerasan dari negara Lithuania, Latvia dan Estonia, kebangkitan yang berani di Birma pada tahun 1988 dan demonstrasi di Cina pada tahun 1989-dua yang terakhir ini banyak jiwa yang melayang dan tanpa kesuksesan yang cepat, meskipun sekarang kedua aksi tersebut berlanjut menurut situasi yang baru.

Menoleh sedikit lebih jauh ke belakang dimana tahun 1970 aksi tanpa kekerasan yang signifikan telah terjadi setidaknya di negara-negara berikut ini : Australia, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, Sudan, Afrika Selatan, Moroko, wilayah Palestina yang diduduki Israel, Iran, Meksiko, Kaledonia Baru, Argentina, Chili, Brazil, Amerika Serikat, Jerman Barat, Norwegia, Perancis, Aljazair, Nigeria, Madagaskar, Armenia, Moldova, Ukraina, Georgia, Philipina, Panama, Yugoslavia, Bolivia, Haiti, Irlandia dan Nikaragua. Jelaslah, beberapa kasus yang ada dewasa ini belum berhasil sementara yang lainnya menghasilkan perubahan dramatis, terbentuknya pemerintahan yang kuat, semacam Shah Iran dan Marcos di Philipina. Haruslah diperhatikan bila tanpa perhatian yang seksama pada masa transisi menuju sistem demokratis atau yang lebih berkeadilan, pemerintahan diktator yang baru dapat timbul dari tergulingnya pemerintahan sebelumnya.

Kekejaman pemerintahan diktator-submissi-dapat dilumpuhkan melalui kekuatan yang berasal dari kemampuan masyarakat dan lembaga independennya untuk mengatur diluar larangan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan, sosial, ekonomi dan politiknya dan bila perlu menolak dan melawan para pelaku agresi, diktator dan

penindas. Perjuangan tanpa kekerasan tidaklah lemah, melainkan kuat. Bukanlah cara yang pengecut, melainkan berani. Aksi tanpa kekerasan adalah "perjuangan bersenjata" dimana rakyat bersenjatakan anti kekerasan yang diperbaiki dan dipersiapkan, dapat menjadi lebih kuat dibandingkan aksi kekerasan dalam menyebabkan keadilan, perdamaian dan kebebasan.

Konsekuensi Jangka Panjang Dari Perjuangan Tanpa Kekerasan

Dalam submisi yang pasif terhadap penindasan, atau keyakinan atas para reformer sosial dan revolusioner memberikan kontrol pada negara untuk mengubah sistem sosial yang opresif, cara lainnya dapat dilakukan. Melalui dua keterampilan penggunaan kekuatan yaitu dengan perjuangan tanpa kekerasan serta suatu program yang konstruktif dalam membangun institusi yang lebih berkeadilan dan terkontrol secara demokratis, kemampuan rakyat melaksanakan suatu orde sosial yang lebih berkeadilan menjadi semakin meningkat. Rakyat akan lebih mampu melakukan konfrontasi terhadap kekuatan dominasi dan menumbangkannya, sementara mereka melaksanakan usaha konstruktif dalam membangun dasar yang kurang tersentralisasi suatu masyarakat yang lebih merdeka dan berkeadilan.

Meluasnya penggunaan perjuangan tanpa kekerasan dewasa ini secara pasti memiliki konsekuensi yang mendalam dan berkelanjutan pada semua sistem politik. Mendalamnya hasil jangka panjang semacam ini akan beragam setingkat dengan teknik ini digunakan secara tepat dan strategis. Semua penduduk telah belajar menghadapi pemerintahan tirani,

rezim teroris dan sistem sosial yang opresif sehingga mereka tidak lemah. Rakyat dapat melihat bahwa mereka dapat bergerak secara aktif untuk membentuk masa depannya dan menyingkirkan atau menahan kekuatan dominasi. Sekali pengetahuan semacam ini diperoleh tidak dapat dihilangkan dengan mudah.

Apakah perjuangan tanpa kekerasan dapat dipercaya menjadi suatu faktor terbesar dalam memecahkan masalah politik dan etnis semacam ini pada tingkat besar tergantung pada kapasitas dan potensi di masa mendatang yang dimiliki perjuangan tersebut secara faktual dalam bentuk yang diperbaharui dan telah dikembangkan. Bila efektifitas perjuangan tanpa kekerasan dalam melawan rezim yang semena-mena dapat dibangun secara jelas, masa depan kita tidak akan memiliki kesulitan besar, dan juga dapat menjadi landasan awal bagi harapan atas terwujudnya perikemanusiaan. Kemungkinan ini akan membawa tanggung jawab sangat besar bagi semua orang yang menginginkan masyarakat yang lebih baik dan dunia yang damai, dimana tujuan keadilan, kebebasan dan perdamaian digabungkan bersama dengan strategi yang realitis untuk mencapai dan mempertahankan tiga hal tersebut.

Perjuangan Tanpa Kekerasan Untuk Pertahanan?

Sementara itu dalam mendapatkan berbagai ukuran secara terus menerus untuk menciptakan kebebasan politik sepenuhnya dan lebih berani disaat menghadapi kekuatan manipulasi, kontrol dan penindasan yang tersentralisasi program baru diperlukan. Program yang bertujuan untuk menahan kebangkitan pemerintahan diktator sebagaimana

mempertahankan negara dari kudeta, dan melakukan disintegrasi pemerintahan diktator yang ada. Bagi kedua tujuan tersebut penyebaran aplikasi non-kooperasi politis dan pertahanan rakyat akan menjadi sangat penting.

Perjuangan tanpa kekerasan juga dapat diaplikasikan untuk pertahanan nasional baik terhadap kudeta dan agresi negara asing. Pada landasan riset atau pelaksanaan studi, kontingensitas perencanaan, persiapan dan pelatihan penduduk dan kelompok kepemimpinan dimana kebijakan "pertahanan sipil (*civilian-based defence*)" akan berusaha melakukan hambatan melalui kepercayaan akan sikap membangkang sebagian besar rakyat dan meluasnya non-kooperasi. Tujuannya adalah untuk menolak para penyerang apa yang mereka inginkan dan membuat konsolidasi pemerintahan yang ada tidak ada. Sikap non-kooperasi dan membangkang ini dapat dikombinasikan dengan bentuk tindakan lainnya untuk menghancurkan loyalitas dan realibitas pasukan dan fungsionaris pihak penyerang.

Tulisan mengenai pertahanan sipil digunakan oleh para perencana pertahanan sipil selama krisis di Lithuania, Latvia dan Estonia pada tahun 1991 untuk melindungi diri dari serangan Sovyet. Negara-negara tersebut sekarang sedang dalam proses bekerja sama dengan beberapa komponen pertahanan sipil yang ada sering dengan kapasitas militernya yang terbatas. Swedia juga memiliki komponen pertahanan non-militer dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya. Beberapa negara Eropa lainnya telah melaksanakan beberapa investigasi atau penelitian mengenai potensi kebijakan semacam ini. Minat untuk menjalankan kebijakan ini juga

terjadi di Thailand yang memiliki potensi dari kemampuan anti kudeta.

Penggunaan resmi kebijakan pertahanan sipil seringkali dikenalkan dan dilaksanakan secara bertahap dari kapasitas sipil, dimana kebanyakan negara mempertahankan cara militer dan sipil sekaligus untuk masa depan yang dapat diramalkan. Bersama dengan penggunaan aksi tanpa kekerasan dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan rakyat, pembaharuan dan penggunaan pertahanan sipil akan memberikan sumbangan atas kelangsungan progresif kepercayaan akan kekerasan dengan penerapan bentuk perjuangan tanpa kekerasan yang telah dipersiapkan.

Tanggapan Dari Sudut Kristiani Terhadap Pilihan Ini

Perkembangan cara tanpa kekerasan yang praktis dan efektif dalam melakukan konflik terhadap ketidakadilan, pemerintahan diktator dan agresi menghasilkan suatu situasi baru bagi mereka yang mengaplikasikan prinsip-prinsip keagamaan dalam dunia nyata dan tidak sempurna ini di mana kita hidup. Satu masalah terbesar dalam etika politik dan teologi moral berdasarkan pada penggunaan kekerasan untuk tujuan politis.

Pengakuan, pembaharuan dan peningkatan efektifitas perjuangan tanpa kekerasan dapat memberikan penyelesaian yang lebih memuaskan dari masalah penting bagaimana melaksanakan kekuatan secara efektif dalam dunia nyata, sehingga mampu mempengaruhi serangkaian peristiwa aktual, meskipun tidak berada dalam siklus kekerasan yang kemudian dapat menghancurkan prinsip-prinsip dan tujuan etika, moral atau agama yang bernilai. Yang dimaksudkan

disini adalah cara-cara efektif perjuangan tersebut dapat berupa aksi tanpa kekerasan dan efektif baik secara moral dan prakteknya.

Satu kriteria dari "perang yang adil" (*jus ad bellum*) yaitu cara terakhir dimana semua pilihan "damai" telah dicoba dan gagal memberikan hasil yang diinginkan. Keyakinan atas kekerasan sebagai sangsi akhir yang berdasarkan perkiraan atau asumsi dimana cara yang paling kuat dan efektif yang ada adalah melakukan suatu serangan, sehingga cara yang lebih halus atau submisi tanpa pertahanan akan menyakinkan pihak musuh bila kekerasan akan berhasil dalam mencapai tujuannya. Kelemahan dan submisi semacam itu akan menimbulkan masalah, termasuk masalah moral.

Pandangan bila pelaksanaan kekerasan sebagai cara yang paling kuat dan efektif yang terdapat bukanlah penilaian yang berdasarkan pada etika, moralitas, norma atau ajaran agama. Tetapi suatu asumsi mengenai realitas sosial dan politik. Sehingga, perlu dipertanyakan apakah dalam kenyataannya pelaksanaan kekerasan adalah cara yang paling kuat dan efektif yang tersedia dalam melawan ketidakadilan, menghancurkan sistem opresif atau membalas suatu serangan yang kejam.

Pada kenyataannya "cara terakhir" yang paling kuat dewasa ini merupakan suatu pertanyaan empiris. Untuk menjawabnya diperlukan data, analisa dan evaluasi keefektifitasan relatif dari cara yang menggunakan

kekerasan melawan cara yang tanpa kekerasan dalam melaksanakan konflik. Hal ini membutuhkan penelitian dari dua cara utama pelaksanaan perjuangan (yang dibedakan dengan ukuran yang lebih halus semacam konsiliasi, negoisasi

dan semacamnya). Data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber-sumber sosial, politik dan sejarah.

Tidaklah benar bila tidak diragukan lagi kekerasan adalah cara yang paling efektif dan manjur dalam melaksanakan konflik terbuka yang menahun, terutama untuk tujuan keadilan, kebebasan dan perdamaian. Sebaliknya, perjuangan tanpa kekerasan sering telah terbukti lebih efektif dibandingkan perjuangan yang menggunakan kekerasan. Selanjutnya, perjuangan tanpa kekerasan telah diperbaharui pada berbagai peristiwa perjuangan bagi keadilan, kebebasan dan bahkan tujuan pertahanan nasional dibandingkan dengan peperangan.

Sedangkan perjuangan tanpa kekerasan bagi alasan pragmatis diterima untuk digunakan dalam situasi di mana kekerasan telah diaplikasikan, situasi moral yang berubah secara mendasar. Banyak ragam masalah sekunder moral atau etika yang dapat diramalkan akan muncul atau berlanjut dalam penerapan pilihan tanpa kekerasan. Sebagai contoh, di bawah kondisi bagaimanakah tekanan psikologis ekstrim dijustifikasikan? Kapan semestinya sanksi ekonomi internasional diterapkan? Permasalahan moral atau etika yang serius di masa lampau telah bertambah banyak karena telah diasosiasikan dengan penggunaan kekerasan dalam konflik menahun. Setidaknya sehubungan dengan permasalahan ini bahwa teori perang berkeadilan dikembangkan baik *jus ad bellum* (menurut kondisi apakah perang dijustifikasikan?) dan *jus in bello* (jika perang dijustifikasikan, dalam batasan apakah perang semestinya dilaksanakan?)

Bagaimanapun juga, peningkatan efektifitas perjuangan tanpa kekerasan dan penggunaan kebijakan yang halus dalam berhubungan dengan konflik menaruh memberikan situasi baru, di mana satu kondisi terbesarnya bagi "perang berkeadilan" (*jus ad bellum*)-yaitu tidak terdapatnya pilihan efektif bagi kekerasan-telah berakhir.

Perkembangan perjuangan tanpa kekerasan yang pragmatis sebagai praktek ketiga pada saat bersamaan lebih dari sekedar pilihan moral tetapi merupakan suatu kemungkinan yang tidak tercantum dalam argumentasi berabad-abad lamanya antara eksponen paham perdamaian dan eksponen "perang yang adil". Pilihan ini berarti bahwa apa yang dibutuhkan secara moral dan religius serta apa yang perlu dipraktikkan menjadi sama-sama penting. Perbedaan antara apa yang ideal dan nyata dapat disingkirkan. Perkembangan pilihan ini akan mengikuti garis-garis pandangan lainnya, di mana perkembangan perjuangan tanpa kekerasan sebagai pilihan pragmatis memungkinkan hal tersebut bagi suatu masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan pada prinsip-prinsip perjuangan tanpa kekerasan untuk menerima kebijakan dan serangkaian tindakan tanpa kekerasan.

Perdebatan lama antara pengikut paham perdamaian dan eksponen perang yang adil akan terlewat. Melainkan, perhatian, sumber dan pemikiran yang ada sekarang dapat dipusatkan pada pengembangan, penelitian seksama dan implementasi perjuangan semacam ini yang muncul menjadi sintesa tertinggi dari komponen yang terbaik yang ada di masa lalu. Sintesa ini akan menjadi suatu sintesa yang dapat memungkinkan terciptanya integrasi baru antara etika dan politik, dengan memberikan suatu cara untuk menghadapi

krisis dengan tingkah laku yang selaras dengan aturan agama bukannya dengan membunuh dan tanggung jawab politis karena kapasitasnya dalam menahan kekuatan kekerasan dengan baik sementara berusaha untuk memaksa atau mempertahankan ketidakadilan, pemerintahan diktator atau perang.

Pendapat-Pendapat Kaum Kristiani Yang Bukan Penganut Paham Perdamaian

Menyadari bila perjuangan tanpa kekerasan menimbulkan isu kebijakan dan teologi yang penting yang agak terpisah dari argumentasi mengenai dan melawan paham perdamaian, beberapa pernyataan dari kaum Kristiani telah dikeluarkan untuk menyelidiki potensi perjuangan tanpa kekerasan pada konflik internal dan internasional yang menahun. Pernyataan tersebut dikeluarkan baik oleh kaum Katolik dan Protestan dimulai setidaknya tahun 1930an.

Teolog agama Protestan Reinhold Niebuhr, dalam bukunya terkenal *Moral Man and Immoral Society*, menyadari banyaknya konflik dalam masyarakat dan perlunya koersi (atau kepatuhan). Jika koersi tersebut tidak dibuat dengan kekerasan, dia berpendapat, suatu masyarakat "memilih jenis koersi yang paling sesuai dengan dan paling aman terhadap kekuatan rasional dan moral masyarakat." Koersi dan pertahanan tanpa kekerasan adalah jenis koersi yang menawarkan kesempatan terbesar untuk hubungan selaras dengan faktor-faktor moral dan rasional dalam kehidupan masyarakat." Kelebihan metode tanpa kekerasan sangatlah banyak, dia berpendapat, tetapi metode tersebut "haruslah dipikirkan secara pragmatis sehubungan dengan kondisi dan

situasi". Dia memahami bila teknik ini belumlah cukup dikembangkan dan menyimpulkan bahwa "tidak ada masalah pada kehidupan politik dimana imajinasi religius dapat menciptakan sumbangan terbesar dibandingkan dengan masalah pengembangan pertahanan tanpa kekerasan ini."

Suatu pernyataan dari golongan Katolik yang singkat namun penting muncul pada tahun 1986 dari Pertemuan untuk Doktrin Kepercayaan (*Congregation for the Doctrine of the Faith*), dalam "Instruksi mengenai Kebebasan dan Kemerdekaan Kristiani"nya. Dalam konteks suatu diskusi atas perlunya "suatu analisis yang mendalam dari situasi" dimana "perjuangan bersenjata" dipertimbangkan "sebagai usaha terakhir untuk mengakhiri tirani yang tampak dengan jelas dan berkepanjangan," menyatakan :

Bahkan, dikarenakan perkembangan berkelanjutan dari teknologi kekerasan dan bertambah parahnya bahaya yang diimplikasikan dalam pelaksanaannya, apa yang diistilahkan dewasa ini sebagai "pertahanan pasif" memperlihatkan suatu cara yang lebih layak terhadap prinsip-prinsip moral dan kurang memiliki prospek untuk berhasil.

Pada dokumen inti yang dilampirkan bersama surat pastoral di tahun 1986 "Dalam Penciptaan Pertahanan : Perang Nuklir dan suatu Perang Berkeadilan (*In Defense of Creation: The Nuclear Crisis and a Just Peace*)", Dewan Keuskupan dari *United Methodist Church* menyarankan "penelitian khusus pertahanan dan pembuatan perdamaian tanpa kekerasan," menyatakan "sejarah besar-meskipun terabaikan" mengenai sikap penolakan tanpa kekerasan terhadap "penakluk asing, tiran domestik, sistem opresif,

penyelewengan kekuasaan internal dan penguasaan perekonomian."

Diantara contoh modem yang dapat diamati dengan jelas adalah *satyagraha* (kekuatan jiwa) dari Gandhi di India. Penolakan Norwegia selama pendudukan Nazi untuk menjaga sekolah-sekolah bebas dari kontrol fasis, pergerakan hak-hak masyarakat sipil Martin Luther King Jr. dan Solidaritas di Polandia. Setiap prospek dimana pembentukan militer atau gerakan revolusi dapat digantikan secara efektif dengan kekuatan bersenjata dengan metode tanpa kekerasan yang layak mendapatkan dukungan kaum Kristiani.

Pada laporan Keuskupan Episcopal di Washington pada tahun 1987 mengenai senjata nuklir mencatat topik penolakan tanpa kekerasan untuk pertahanan, meskipun memperlakukan topik tersebut dengan pertimbangan skeptis :

Kita juga menyadari agar melegitimasi perspektif penolakan tanpa kekerasan dan menerimanya sebagai suatu pilihan personal dan sebagai pendekatan kolektif yang memungkinkan terhadap resolusi konflik..Sejujurnya kita sulit menghadapi pertentangan bila penolakan tanpa kekerasan dapat menjadi efektif dalam menyelesaikan konflik antara bangsa-bangsa. Kebanyakan dari kita memiliki kesulitan dalam melihat bagaimana penolakan tanpa kekerasan ini memenuhi tanggung jawab untuk melindungi kaum yang tak bersalah dari banyaknya penindasan, atau untuk mencegah penderitaan meskipun kita memahaminya sebagai cara yang dapat diberlakukan dalam melawan penindasan dan ketidakadilan dari dalam. Penolakan tanpa kekerasan bahkan digunakan secara sukses sebagai suatu cara untuk mencapai hak-hak asasi

manusia dan masyarakat sipil di Amerika Serikat selama tahun 1960an.

Pertemuan umum *Presbyterian Church* di Amerika Serikat juga menyampaikan kebijakan pertahanan sipil sebagai suatu pilihan terhadap pemilikan senjata nuklir secara rahasia pada pernyataan kebijakannya di tahun 1988 mengenai tanggung jawab Kristiani di abad nuklir ini :

Suatu strategi pertahanan sipil, yang dilandasi pada penolakan tanpa kekerasan dewasa ini merupakan suatu masalah dari penelitian di beberapa universitas besar. Pertahanan sipil yang melibatkan mogok kerja, unjuk rasa, gerak lambat, boikot, demonstrasi, pelumpuhan komponen kunci infrastruktur dan cara-cara tanpa kekerasan lainnya sebagai cara penolakan untuk diperintah oleh kekuatan penjajah. Adanya resiko kegagalan dalam alternatif semacam ini sebagaimana yang selalu terdapat dalam pertahanan konvensional militer. Karena pertahanan sipil memiliki suatu kesempatan untuk berhasil akan membutuhkan konsensus, disiplin dan kepatuhan tingkat nasional yang kita tidak percaya ada di negara ini saat ini. Kita sangat yakin bila gereja perlu memberikan penelitian secara seksama demi banyaknya penulisan di bidang ini.

Taksiran/Penafsiran Pendapat Oleh Dewan Gereja Dunia

Selama bertahun-tahun sejak pendiriannya setelah perang dunia kedua, beragam organ-organ Dewan Gereja Dunia telah membahas relevansi potensial aksi tanpa kekerasan dalam menghadapi baik konflik ataupun perjuangan internasional demi keadilan sosial. Pernyataan-pernyataan ini memiliki beragam terminologi dan klarifikasi

atas referensinya mengenai aksi tanpa kekerasan sebagai suatu teknik yang digunakan oleh kelompok yang berlainan, terhadap tidak adanya kekerasan moral atau keagamaan, atau juga beragam cara damai untuk resolusi konflik. Beberapa pernyataan tersebut membahas secara tepat aksi tanpa kekerasan sebagai suatu teknik tindakan yang kadangkala diterapkan oleh kelompok-kelompok dari agama yang berlainan selain aksi tanpa kekerasan yang menjadi fokus dari pusat kepentingan disini.

"Resolusi Martin Luther King Jr" yang diangkat pada pertemuan keempat Dewan Gereja Dunia (Uppsala 1968) mengarahkan para anggota komite pusat "untuk menyelidiki cara-cara dimana Dewan Gereja Dunia dapat mempromosikan penelitian atas metode-metode tanpa kekerasan dalam mewujudkan perubahan masyarakat." Pada tahun 1971 anggota komite pusat mengadakan rapat di Addis Ababa, meminta pada sub-unit Gereja dan Masyarakat (*Church and Society*) "untuk melaksanakan penelitian selama dua tahun atas permasalahan dan potensi-potensi kekerasan serta tanpa kekerasan dalam memperjuangkan keadilan sosial." Para anggota komite telah menerima laporan dari staf kelompok ad hoc yang berbicara mengenai "semakin banyaknya ketidakseediaan untuk memperlihatkan isu sebagaimana 'kekerasan' melawan 'tanpa kekerasan'," lebih menyenangkan "suatu pencarian kriteria Kristiani yang lebih terkait untuk mengevaluasi strategi alternatif yang koersif."

Di tahun 1972 Gereja dan Masyarakat mengatur suatu konsultasi pada "Kekerasan dan Tanpa Kekerasan pada Perubahan Sosial" di Cardiff, Wales dan laporannya dibagikan pada gereja-gereja lainnya oleh anggota komite pusat pada

bulan Agustus 1973 untuk diteliti, diberikan komentar dan ditindak lanjuti. Laporan tersebut berkaitan dengan bagaimana kaum Kristiani dapat secara efektif menekan kekuatan suatu masyarakat yang opresif, dan berisikan wacana signifikan mengenai relevansi tindakan tanpa kekerasan. Sebagaimana tercantum di bawah ini:

Dunia dan Gereja telah diilhami dan tertantang dewasa ini oleh contoh-contoh gerakan tanpa kekerasan yang baru dan mendunia demi keadilan dan perdamaian. Beberapa diantaranya-sebagai misal gerakan Gandhi-yang merupakan gerakan non-Kristiani. Sedang lainnya-semacam gerakan Martin Luther King-merupakan gerakan Kristiani. Secara bersama-sama mereka telah membawa gereja-gereja di dunia untuk mengamati suatu cara yang baru dari keterlibatannya dalam perjuangan demi keadilan dan perdamaian dunia.

Dan, selanjutnya :

Kita sangat yakin bila sejauh ini sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh gereja dan oleh gerakan penolakan terhadap metode dan teknik tanpa kekerasan dalam memperjuangkan suatu masyarakat yang adil. Ada banyak kemungkinan untuk mencegah kekerasan dan pertumpahan darah serta menghentikan konflik kekerasan yang masih berlanjut saat ini, melalui penggunaan sistematis bentuk perjuangan yang bertujuan pada konversi bukannya pada penghancuran pihak oponent serta penggunaan cara yang tidak menutup kemungkinan untuk suatu hubungan positif dengan pihak oponent. Aksi tanpa kekerasan mewakili wilayah yang lepas dari pengamatan : inisiatif yang diambil oleh kelompok dan individu yang berlainan untuk membantu

pengamatan ini berlangsung agar mendapatkan dukungan yang kuat dari Dewan Gereja Dunia dan gereja-gereja.

Laporan tersebut selanjutnya menunjukkan beberapa kompleksitas dalam pengaplikasian bentuk perjuangan tanpa kekerasan :

Kita menolak beberapa asumsi yang salah mengenai perjuangan tanpa kekerasan yang hadir dalam perdebatan dewasa ini. Tindakan tanpa kekerasan sangatlah politis sifatnya. Mungkin dapat sangat kontraversional. Tidak juga terlepas dari kompromi dan ambiguitas yang mengiringi semua usaha untuk melaksanakan etika yang berdasarkan cinta kasih di suatu dunia kekuatan dan yang menggunakan kekuatan serta selalu menggunakan pertumpahan darah. Lebih jauh, kebanyakan perjuangan demi kebebasandan sebagian besar aksi pemerintah-pada kenyataannya, merupakan perpaduan antara aksi kekerasan dan tanpa kekerasan. Ini semua bagi kaum Kristiani memberikan pilihan sulit. Semakin banyak pilihan ini didorong oleh semangat dan pengetahuan yang bertanggung jawab terhadap pilihan tanpa kekerasan yang konstruktif semakin kreatif pilihan ini.

Laporan tersebut juga berusaha menyingkirkan beberapa anggapan yang meremehkan berkaitan dengan cara-cara kekerasan dan tanpa kekerasan: "Kekerasan tidak semestinya disamakan dengan radikalisme dan revolusi, demikian juga tanpa kekerasan dengan gradualisme atau reformasi, ataupun sebaliknya." Hal ini menyimpulkan serangkaian permasalahan dimana eksponen dari agama yang berlainan mesti menanyakan pada diri mereka sendiri mengenai penggunaan cara-cara kekerasan dan tanpa kekerasan.

Dalam menyikapi pernyataan Cardiff, anggota komite pusat memberikan perhatian pada topik tertentu:

Kita menyambut baik klarifikasi pernyataan mengenai sifat tindakan tanpa kekerasan. Aksi tanpa kekerasan tidak semestinya disamakan dengan keadaan pasif atau tidak adanya tindakan dalam menghadapi ketidakadilan. Sebaliknya, memahami ajaran Gandhi, King dan Luthuli, sebagai tindakan yang aktif, sangat politis, bahkan kadangkala kontraversional dan berbahaya dalam konflik sosial.

Selanjutnya laporan tersebut merekomendasikan :

bahwa unit-unit dan sub-unit Dewan Gereja Dunia diharapkan untuk mengembangkan inisiatif baru yang sesuai dengan program-programnya, untuk menstimulasi dan membantu gereja dan kaum Kristiani di seluruh dunia terhadap penelitian yang lebih seksama ataupun pelaksanaan yang lebih berani dari aksi tanpa kekerasan dalam mendukung pihak yang tertindas.

Pertemuan kelima Dewan Gereja Dunia (Nairobi 1975) mengangkat garis petunjuk kebijakan mengenai "perlunya. untuk menyelidiki lebih jauh signifikansi aksi tanpa kekerasan demi perubahan sosial dan perjuangan melawan militerisme."

Pada tahun 1979 anggota komite pusat menyarankan "Penelitian lebih jauh dan kelanjutan implementasi laporan mengenai 'Kekerasan, Tanpa Kekerasan dan Perjuangan bagi Keadilan Sosial', memberikan perhatian serius terhadap hak-hak asasi yang disadari manusia dan perlunya untuk mempromosikan resolusi damai dari konflik." Pada tahun yang sama Komisi Gereja Urusan Internasional (*Commission of the Churches on International Affairs/CCIA*) mengadakan suatu

pertemuan kecil di Chambesy, Switzerland, mengenai resolusi damai dari konflik dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari *Historic Peace Churches*, para cendekiawan dan aktivis yang mencari alternatif dari sistem dominasi militer pada pertahanan nasional.

Pada tahun 1980, para anggota eksekutif dan komite pusat mengundang para anggota Dewan Gereja Dunia "untuk mengupayakan dan mendorong cara-cara inovatif demi resolusi damai konflik." Pemikiran gerejani tersebut dilaporkan "telah bergerak semakin jauh searah perlunya keadilan sebagai suatu cara untuk menghindari dan menyelesaikan konflik, menghilangkan penyebab dasar dari perang yang ditemukan dalam ketidakadilan di perekonomian, penindasan dan eksploitasi serta pembatasan pada hak-hak manusia," sebagaimana anggota komite nyatakan pada pertemuan di Dresden di tahun 1981.

Pada persiapan pertemuan keenam di Vancouver 1983, suatu pertemuan internasional yang bersifat informal mengenai "Kekerasan, Tanpa Kekerasan dan Konflik Sipil" yang dilaksanakan di Irlandia Utara diselenggarakan oleh *Corrymeela Community* dan Dewan Gereja Dunia pada bulan Maret. Laporan yang diserahkan pada sekretaris umum Dewan Gereja Dunia menyatakan bahwa "tahap perdebatan yang ada dewasa ini mengenai kekerasan dan tanpa kekerasan pada konflik sipil tidak sesuai dengan kompleksitas situasi internasional saat ini dan pengalaman aktual masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan sebagai keputusan akhir politis. Kompleksitas ini membuat hal ini menjadi lebih sulit saat sekarang untuk menarik petunjuk umum bagi respon kaum Kristiani dalam situasi kekerasan tertentu."

"Pertanyaan yang ada selama ini harus diungkap kembali," lanjut laporan tersebut, termasuk kriteria atas legitimasi kekuatan pemerintahan dan hak individu untuk menolak (termasuk dengan kekerasan) melawan terhadap "bentuk-bentuk ketidakadilan". Ini juga mengaplikasikan peran kekerasan dan tanpa kekerasan dalam perubahan sosial. Pertanyaan yang ditimbulkan apakah kriteria teori perang yang adil dari kaum Kristiani dapat diaplikasikan secara mudah pada konflik sipil :

Laporan tahun 1973 menggunakan baik paham perdamaian dan teori perang yang berkeadilan. Karenanya, kedua posisi yang lama ada tersebut menjadi tidak berkecukupan dalam debat mengenai militerisme, cara modern yang duniawi dari penghancuran penduduk dan konflik revolusi. Waktu yang tampaknya mematangkan usaha baru tersebut dalam menjembatani kedua hal itu.

Laporan tersebut menekankan penguatan institusi internasional dalam membantu memecahkan baik konflik lokal atau internasional, meskipun tidak berisikan rekomendasi khusus bagi penelitian atas potensi aksi tanpa kekerasan dalam konflik sosial dan internasional. Pertemuan ke tujuh Dewan Gereja Dunia di Canberra tahun 1991 memikirkan terutama konflik yang mengikuti tumbangannya sistem komunis di Eropa Timur dan Tengah dimana ini mengartikan "serangkaian isu yang terkait dengan kompleks" muncul "sekaligus di semua belahan dunia."

Tidak mengherankan bila tidak terdapat definisi yang jelas baik untuk masalah ataupun solusi yang memungkinkan, jika pegangan yang kita miliki dari kategori

yang dapat diaplikasikan secara moral, etika dan teologi tidak mencukupi.

Pertemuan anggota komite di bulan Agustus 1992 menyetujui "bahwa tindakan tanpa kekerasan yang aktif diafirmasikan sebagai inti dari program dan proyek yang berhubungan dengan resolusi konflik." sekretaris umum Dewan Gereja Dunia Emilio Castro menyatakan bahwa dua isu yang saling berkaitan : suatu perkiraan menyeluruh mengenai potensi perjuangan tanpa kekerasan yang aktif di dunia dewasa ini; dan penanganan aktual situasi konflik yang masih harus dibicarakan lebih mendetil. Kita tidak mengatakan-dan demikian halnya dengan Dewan-bahwa perang tidak diijinkan. Kita mengatakan bahwa pelajaran yang dapat dipelajari pada pendekatan tanpa kekerasan akan membantu kita dalam situasi semacam itu.

Pada pertemuan di Johannesburg di tahun 1994, Afrika Selatan, anggota komite Dewan Gereja Dunia merekomendasikan pembentukan suatu Program untuk Mengatasi Tindak Kekerasan yang bertujuan untuk menentang dan mengubah budaya kekerasan yang telah mendunia menjadi budaya damai yang adil. Sehubungan dengan hal tersebut suatu pertemuan diadakan di Corrymeela pada bulan Juni 1994 mengenai "Pembangunan suatu Budaya Perdamaian : Kontribusi Gereja". Sekretaris umum Dewan Gereja Dunia Konrad Raiser menyatakan dalam pidato pembukanya bahwa "jika seseorang memikirkan sumber daya dan energi yang diinvestasikan dalam pendidikan dan persiapan generasi muda untuk pelatihan perang, selanjutnya akan menjadi jelas bila kemampuan masyarakat dalam

penyelesaian konflik tanpa kekerasan tidak berkembang sama sekali."

Pertemuan Corrymeela tidak membuat himbauan tertentu terhadap pertimbangan, perkembangan dan promosi tindakan tanpa kekerasan serta cara-cara perjuangan tanpa kekerasan dalam konflik sosial dan bagi pertahanan. Satu bulan kemudian, dewan dari Komisi Gereja-gereja mengenai Masalah Internasional (CCIA) mengadakan pertemuan di Kitwe, Zambia, membicarakan tentang "pembangunan dan membangun kembali komunitas pertahanan perdamaian, keadilan dan ekologis." Pertemuan ini menerima konflik sebagai "suatu aspek normal kehidupan dalam komunitas manusia" dan menegaskan bila konflik "tidak harus memicu pada kekerasan dan perang". Programnya berusaha mencari diantara tujuan lain yang beragam "dukungan untuk tidak memberikan legitimasi atas peperangan dan kekerasan serta menyebar luaskan perdamaian yang berkeadilan." Keterlibatan perantara disebutkan sebagai rekomendasi khusus. Tidak hal yang lebih spesifik berkaitan dengan perkembangan aksi tanpa kekerasan ataupun penggunaannya sebagai pengganti kekerasan yang dianjurkan.

Pernyataan Uskup-Uskup Katolik

Para uskup Katolik Roma di Amerika Serikat dalam surat pastoralnya di tahun 1983 Tantangan Perdamaian : Janji Tuhan dan Tanggapan Kita (*The Challenge of Peace: God's Promise and Our Response*) menekankan pentingnya perhatian terhadap perjuangan tanpa kekerasan, terutama yang diaplikasikan demi tujuan pertahanan nasional. Mereka mengindikasikan potensi pendekatan ini bagi terwujudnya

dukungan baik dari penganut teori perang yang berkeadilan (*just war theory*) dan penganut paham perdamaian (*pacifism*). "Kita percaya dengan bekerja untuk mengembangkan cara-cara tanpa kekerasan dari penghentian agresi dan pemecahan konflik yang terbaik yang merefleksikan himbauan Yesus demi cinta kasih dan keadilan." Para uskup melanjutkan : "Cara penolakan tanpa kekerasan terhadap kejahatan selayaknya dipelajari dan dipertimbangkan lebih jauh dibandingkan apa yang selama ini mereka telah dapatkan. Telah terdapat contoh-contoh signifikan dimana rakyat berhasil menolak penindasan tanpa pelaksanaan dari angkatan bersenjata." Sehubungan dengan ini mereka mengutip contoh penolakan tanpa kekerasan oleh bangsa Denmark dan Norwegia selama perang dunia kedua, dan mencatat bahwa perjuangan tanpa kekerasan dapat dilaksanakan dalam banyak bentuk, bergantung pada situasi, termasuk untuk pertahanan nasional :

Sebagai contoh yang ada, pertahanan rakyat yang terorganisir dilembagakan oleh pemerintah sebagai bagian dari rencana kontingenitasnya. Penduduk dilatih dalam teknik-teknik penolakan dan non-kooperasi yang damai sebagai suatu cara penolakan kekuatan penjajah atau pemerintah nondemokratis dari memaksakan kehendaknya.

Dibutuhkannya aksi tanpa kekerasan yang efektif, mereka menyimpulkan bahwa meskipun aksi tidak selamanya sukses, "sebelum kemungkinan tersebut hilang karena adanya hal-hal yang tidak praktis atau realistik, kita menyarankan agar tindakan tersebut diukur terhadap efek-efek tertentu dari suatu perang yang besar." Kemudian, dalam suatu hasil signifikan dari posisi standar teologi sehubungan dengan

perang yang adil dan paham perdamaian, mereka menyatakan :

Penolakan tanpa kekerasan menawarkan suatu landasan umum dari kesepakatan bagi para individu tersebut yang memilih pilihan paham perdamaian Kristiani dan mereka yang memilih pilihan kekuatan yang mematikan yang diijinkan oleh teologi perang yang adil. Penolakan tanpa kekerasan membuatnya jelas bahwa kedua hal diatas mampu disepakati untuk tujuan yang sama-mempertahankan negara mereka.

Kesimpulannya, dibandingkan dengan ancaman dari keberadaan kebijakan militer, "alasan praktis sekaligus kepercayaan spiritual" membutuhkan bila pertahanan rakyat tanpa kekerasan diberikan "pertimbangan yang serius sebagai suatu alternatif serangkaian tindakan."

Refleksi para uskup Katolik pada Menuai Keadilan yang Ditanamkan pada Perdamaian (*The Harvest of Justices is Sown in Peace*) di kesempatan perayaan kesepuluh surat pastoral tahun 1983 yang dipublikasikan pada bulan November 1993. Diantara tahun-tahun penting penerapan baru perjuangan tanpa kekerasan yang telah terjadi, dilaksanakan hampir oleh sebagian besar rakyat yang tidak menyakini paham perdamaian.

Pada tahun 1993 para uskup Katolik menghasilkan kembali dua ajaran mengenai "tindakan tanpa kekerasan dan perang berkeadilan" dan juga "keberhasilan metode tanpa kekerasan dalam sejarah saat ini" serta tekanan setelah perang dingin bagi pembatasan pelaksanaan militer dan bagi intervensi berperikemanusiaan. Pernyataan tersebut ditujukan pada beragamnya pandangan dalam Gereja Katolik atas

validitas penggunaan "kekuatan" (yang berarti kekerasan), menyatakan bahwa :

1. Dalam situasi konflik, komitmen tetap kita semestinya sejauh hal ini memungkinkan, adalah mengupayakan keadilan melalui cara-cara tanpa kekerasan.
2. Namun apabila usaha aksi tanpa kekerasan gagal untuk melindungi kaum yang tidak berdosa melawan ketidakadilan yang fundamental, sehingga otoritas politik yang terlegitimasi diijinkan sebagai usaha terakhir dengan menggunakan kekuatan terbatas dalam menyelamatkan kaum yang tak berdosa dan membangun keadilan.

Pernyataan baru para uskup tersebut dalam menyatakan "pentingnya" "tindakan tanpa kekerasan" semestinya "tidak dibingungkan dengan pernyataan rakyat yang tidak melakukan penolakan berdasarkan paham perdamaian." "Tindakan tanpa kekerasan" ini bukanlah "semata-mata suatu pilihan pribadi dan sebagaimana sejarah dewasa ini sarankan pada beberapa kondisi dimana tindakan tersebut dapat menjadi pelaksanaan oleh publik secara efektif."

Para uskup kemudian mengutip apa yang Paus John Paul II pernah tuliskan tentang revolusi Eropa Timur pada Centesimus Annus (1993) dalam peringatan ke 100 *Rerum Novarum*:

Tampaknya orde Eropa yang dihasilkan dari perang dunia Kedua hanya mampu diakhiri oleh perang lainnya. Terkecuali, bila orde tersebut dihasilkan melalui komitmen tanpa kekerasan dari rakyat yang, sementara itu mereka menolak untuk menggunakan kekuatan, berhasil sepanjang

waktu dalam menemukan cara-cara efektif mendapatkan saksi terhadap kebenaran.

Para uskup melanjutkan untuk menyatakan:

Revolusi tanpa kekerasan ini menantang kita untuk menemukan cara yang perlu dipertimbangkan secara mendalam mengenai kekuatan tanpa kekerasan yang terorganisir dan aktif. Apa yang menjadi kekuatan potensial strategi dan taktik tanpa kekerasan yang serius sesungguhnya dan keterbatasannya? Persyaratan etika apakah saat aksi tanpa kekerasan yang terorganisir gagal menyelesaikan kejahatan dan saat kekuatan totalitarian memaksakan ketidakadilan masal pada semua lapisan masyarakat? Apakah tanggung jawab dan keterbatasan komunitas internasional?

Seseorang harus bertanya, sehubungan dengan sejarah dewasa ini, apakah aksi tanpa kekerasan semestinya dibatasi pada komitmen pribadi atau apakah semestinya ditempatkan dalam perintah publik dengan ajaran atas perang yang berkeadilan dan terbatas. Para pemimpin bangsa melahirkan suatu kewajiban moral untuk melihat bahwa pilihan atas tindakan tanpa kekerasan dipertimbangkan secara serius dalam berhubungan dengan konflik. Gaya baru dari diplomasi preventatif dan pemecahan konflik seharusnya dipelajari, dicoba, diperbaharui dan didukung. Bangsa-bangsa semestinya menyebar luaskan riset, pendidikan dan pelatihan dalam cara-cara tanpa kekerasan untuk menolak kejahatan. Strategi tanpa kekerasan memerlukan perhatian besar pada masalah internasional.

Kewajiban semacam itu tidak dipisahkan dari perjuangan dan kewajiban suatu negara untuk mempertahankan terhadap agresi sebagai suatu usaha akhir.

Kewajiban tersebut dapat menimbulkan dimulainya pencarian bantuan dari kekuatan (kekerasan) melalui pembentukan institusi yang menyebar luaskan solusi tanpa kekerasan dari perselisihan dan menumbuhkan komitmen politik terhadap usaha semacam itu. Pada konflik di masa mendatang, unjuk rasa dan kekuatan rakyat akan menjadi lebih efektif dibandingkan senjata dan peluru.

Pernyataan tersebut mengulang kembali kriteria perang yang berkeadilan dari "usaha akhir": bahwa kekerasan "dapat digunakan hanya setelah semua pilihan damai yang telah dicoba dan dilaksanakan secara serius." Bagian mengenai ajaran perang yang berkeadilan diakhiri dengan rekomendasi bahwa "pekerjaan penting yang perlu dilakukan dalam memperbaiki, mengklarifikasikan dan mengaplikasikan ajaran perang yang adil terhadap pilihan yang dihadapi para pembuat keputusan kita dalam dunia yang masih menggunakan kekerasan dan berbahaya ini."

Para uskup juga menganjurkan integrasi : pengajaran Katolik mengenai keadilan, tanpa kekerasan dan perdamaian kedalam kurikulum dan kehidupan yang lebih luas dari usaha pengajaran kita," mengamati bila "kita tidak akan mengikuti kebijakan baru sampau kita membuang pemikiran lama." Mereka menyimpulkan :

Perubahan yang dapat kita bayangkan sepuluh tahun yang lalu telah terjadi didepan mata kita. Tanpa kekerasan, harapan, keteguhan dan kekuatan dari masyarakat biasa yang telah menumbangkan dinding, kebebasan yang terkekang, pemerintahan dan mengubah dunia.

Pada bulan April 1994 uskup Katolik Meksiko menyampaikan isu yang sama dalam konteks kondisi domestik

di negaranya, termasuk kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, perlakuan semena-mena terhadap kelompok etnis dan ketidakpercayaan institusi. Diluar usaha untuk melakukan kekerasan terhadap ketidakpuasan semacam ini, para uskup menolak "kekerasan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah, untuk kekerasan yang dihadapi dengan banyak kekerasan." "Kita harus menolak sepenuhnya semua kekerasan, baik secara verbal atau fisik." Dikatakan oleh mereka, mengutip pernyataan tahun 1986 dari Pertemuan Doktrin Kepercayaan menyatakan sebelumnya "bahwa apa yang dewasa ini diistilahkan penolakan pasif memperlihatkan suatu cara yang lebih sesuai dengan prinsip moral dan memiliki banyak kesempatan untuk berhasil."

Pertemuan Gerejani Di Basel Dan Seoul

Pada akhir tahun 1980an, dua pertemuan gerejani internasional yang besar mengenai keadilan, perdamaian dan lingkungan diadakan, satu di Eropa yaitu di Basel, sedangkan lainnya di Seoul, Korea. Dokumentasi yang dihasilkan oleh pertemuan tersebut membuat referensi yang jelas terhadap tindakan tanpa kekerasan dan dokumen dari Seoul menyebutkan aplikasi tindakan tanpa kekerasan terhadap pertahanan nasional.

Pertemuan Gerejani Eropa (*European Ecumenical Assembly*) mengenai Perdamaian dan Keadilan diadakan di Basel pada bulan Mei 1989 oleh keuskupan Katolik Roma di Eropa dan Konferensi Gereja Eropa dan bekerja sama dengan *Russian Orthodox Metropolitan Alexy of Leningrad* (sekarang

patriarki Moskow) dan *Catholic archbishop* dari Milan, Cardinal C.M. Martini.

Dokumen akhir yang dibahas dan disetujui oleh mayoritas terbanyak 500 lebih delegasi yang hadir termasuk beberapa wacana yang relevan dengan tema kita, diantaranya adalah komitmen terhadap "solusi tanpa kekerasan dari konflik yang ada di bumi." Pada Bagian VI, "Landasan Afirmasi, Komitmen, Rekomendasi dan Perspektif di Masa Mendatang", menyatakan :

Pada semua tingkat gereja dan dalam masyarakat, semestinya terdapat pendidikan perdamaian yang dikembangkan berorientasi pada resolusi damai konflik. Pada setiap situasi, pilihan untuk tindakan tanpa kekerasan semestinya memiliki prioritas dalam penyelesaian konflik. Tanpa kekerasan semestinya dilihat sebagai dinamika aktif dan kekuatan konstruktif yang berdasarkan pada penghormatan mutlak bagi manusia.

Kurang dari satu tahun kemudian, pada bulan Maret 1990, Dewan Gereja Dunia menyelenggarakan pertemuan dunia mengenai Keadilan, Perdamaian dan Integritas Penciptaan di Seoul. Meskipun keterlibatan Gereja Katolik sangat kecil dibandingkan dengan Basel dan partisipasi Ortodoks sangat terbatas, pertemuan dari 400 delegasi dan sebagian besar pengamat dan tamu adalah suatu langkah signifikan dalam keterlibatan gereja pada tingkat dunia atas tema ini.

Satu pernyataan yang dihasilkan di Seoul : "Kita terpenggil untuk mengupayakan setiap cara yang memungkinkan bagi pembentukan keadilan, perwujudan perdamaian dan penyelesaian konflik melalui tanpa kekerasan

yang aktif." Keamanan bangsa dan rakyat merupakan fokus dari satu kesepakatan yang mengembangkan komitmen dengan pengulangan referensi atas penyebar luasan "bentuk pertahanan tanpa kekerasan" dan pada "budaya tanpa kekerasan yang aktif." Satu dari wacana ini merekomendasikan "pengembangan dan pengkoordinasian utusan keadilan dan perdamaian termasuk pelayanan tanpa kekerasan yang mendunia dimana dapat memajukan perjuangan akan hak manusia dan perdamaian serta melayani dalam situasi konflik, krisis dan kekerasan." Bagian selanjutnya pada "penghapusan militerisasi hubungan internasional dan penyebar luasan bentuk-bentuk pertahanan tanpa kekerasan" merekomendasikan bila tujuan tersebut dapat dimajukan "melalui sikap yang defensif, tidak mengancam dan tidak ofensif demikian juga dengan alat keamanan serta pengembangan pertahanan sipil." Meskipun bagian lain dari dokumen diberi tajuk : "Demi suatu budaya tanpa kekerasan yang aktif dimana kehidupan diangkat dan bukannya dari situasi yang menggunakan kekerasan dan penindasan melainkan suatu cara untuk kepentingan keadilan dan kemerdekaan."

Perlunya Pertimbangan Politis Dan Teologis Yang Baru

Jelaslah bila sejumlah pemimpin Kristiani yang berlainan, denominasi, gereja, pertemuan gerejani dan badan-badan berwenang lainnya pada tingkat yang berlainan, menunjukkan bahwa perjuangan tanpa kekerasan dan pertahanan sipil merupakan sumber penelitian dan praktek pada konflik yang menahun dimana kekerasan telah digunakan. Para pemikir dan kelompok tersebut melakukan

hal ini setelah mempertimbangkan baik moralitas dan nilai efektifitasnya.

Pernyataan ini menambahkan bobot yang signifikan terhadap himbauan sebelumnya pada artikel ini untuk pertimbangan yang seksama dari potensi pelaksanaan perjuangan tanpa kekerasan bagi kemerdekaan dan pertahanan, serta juga bagi penelitian teologis mengenai kemungkinan bergerak dibalik argumentasi atau posisi lama dari penganut paham perdamaian dan perang yang berkeadilan. Menyuarakan posisi teologis dan politis baru yang sekarang memungkinkan.

Tampaknya sekarang tinggal melihat tingkat dan bagaimana kaum Kristiani-serta para pemimpin agama dan sekuler yang menghargai pemikiran Kristiani-akan bertindak atas nasihat penting yang ditawarkan dalam tantangan penting semacam ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Appleby, R. Scott, 2000, *The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence, and Reconciliation*, Lanham - Boulder - New York - Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Barkun, Michael (), 1998, "Millenialism and Violence", dalam *The Journal of Conflict Studies*, Journal of the Centre for Conflict Studies University of New Brunswick, Fall.
- Baumann, Gerd, 1999, *The Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities*, New York and London, Routledge.
- Beuken, Wim and Kuschel, Karl-Josef (Ed), 1997, *Religion as a Source of Violence*, London, SCM Press.
- Bourdieu, Pierre, 1991, *Language and Symbolic Power*, Oxford, Polity Press.
- Bradley, Harriet, 1996, *Fractured Identities. Changing Patterns of Inequality*, Cambridge, Polity Press.
- Brass, Paul R., 1997, *Theft of an Idol. Text and Context in the Representation of Collective Violence*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- Elias, Norbert, 1993, "Violence and Civilization" dalam John Keane (Ed), *Civil Society and the State. New European Perspectives*, London - New York, Verso.
- Farrel, Daniel M., 1990. "The Justification of Deterrent Violence", *Ethics*, The University of Chicago.

- Giddens, Anthony, 1985, *The Nation - State and Violence*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
- Gilligan, James, 1996, *Violence. Reflections on a National Epidemic.*, New York, Vintage Books.
- Graziano, Frank, 1992, *Divine Violence. Spectacle, Psychosexuality, & Radical Christianity in The Argentine "Dirty War"*, Colorado, Westview Press.
- Gurr, Ted Robert, 1970, *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton University Press.
- Gurr, Ted Robert, 1995, *Minorities at Risk A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, Washington DC, United States Institute of Peace Press.
- Held, David et.al., 1990, *States and Societies*, Oxford, Basic Blackwell.
- Janke, Peter (Ed), 1994, *Ethnic and Religious Conflicts. Europe and Asia*, Aldershot, Dartmouth.
- Johnson, James Turner, 2002, *Perang Suci Atas Nama Tuhan Dalam Tradisi Barat dan Islam*, Bandung, Pustaka Hidayah, terjemahan buku *The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions*.
- Juergensmeyer, Mark, 2000, *Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence*, Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press.
- Kakar, Sudhir, 1996, *The Colors of Violence. Cultural Identities, Religion, and Conflict*, Chicago & London, The University of Chicago Press.

- Laitin, David D., 1986, *Hegemony and Culture. Politics and Religious Change among the Yoruba*, Chicago & London, The University of Chicago Press.
- Mamdani, Mahmood, 1996, *Citizen and Subject. Contemporary Africa and The Legacy of Late Colonialism*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- Manimala, Varghese, 1990, "Structural Violence, Human Rights and the Right to Protest", Jeevadhara, Jeevad.
- Ross, Jeffrey Ian, 1997, "Controlling State Crime. An Introduction", dalam *The Journal of Conflict Studies*, Journal of The Centre for Conflict Studies University of New Brunswick, Spring.
- Salert, Barbara, 1976, *Four Theories Revolutions and Revolutionaries*, New York - Oxford - Amsterdam, Elsevier.
- Schmitt, David E., 1997, "Ethnic Structure, Conflict Processes and The Potential for Violence and Accommodation in Canada", dalam *The Journal of Conflict Studies*, Journal of The Centre for Conflict Studies University of New Brunswick, Fall.
- Scott, James C., 1990, *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*, New Haven and London, Yale University Press.
- Siegel, James T., 1999, "Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta", SEAP Indonesia, number 66, Cornell University.
- Skocpol, Theda, 1993, "The State as a Janus-faced Structure",

- dalam Charles Lemert (Ed), *Social Theory. The Multicultural & Classic Readings*, Boulder - San Francisco - Oxford, West view Press.
- Skocpol, Theda, 1998, "Revolusi Sosial di Dunia Modern dan Mobilisasi Rakyat Secara Militer", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Unisia*, No. 37/XX/1/1998.
- Smith, James K., 1998, *Determined Violence : "Derrida's Structural Religion"*, *The Journal of Religion*, Volume 78, Number 1, Januari.
- Steger, Manfred B. & Lind, Nancy S., 1999, *Violence and Its alternatives : An Interdisciplinary Reader*, New York, St. Martin's Press.
- Tilly. Louise a. & Tilly, Charles (Ed), 1981, *Class Conflict and Collective Action*, London, Sage Publications.
- Turpin, Jennifer and Kurtz, Lester R., 1997, *The Web of Violence. From Interpersonal to Global, Urbana and Chicago*, University of Illinois Press
- Vries, Hent de and Weber, Samuel (Ed), 1997, *Violence, Identity, and Self - Determination*, Stanford, Stanford University Press
- Wilson, Bryan R., 1973, *Magic and The Millenium : A Sociological Study of Religious Movements of Protest Among Tribal and Third - World Peoples*, New York, Harper & Row, Publishers.
- Wolfgang, Marvin E. & Ferracuti, Franco, 1967, *The Subculture of Violence. Towards an Integrated Theory in Criminology*, London, Tavistock Publications.

RIWAYAT HIDUP

Thomas Santoso, lahir di Bandung, 6 September 1959. Lulus dari Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1984. Pada tahun 1994 lulus *Cum Laude* dari Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Terpilih sebagai wisudawan terbaik Universitas Airlangga tahun 1994. Lulus Doktor Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 2002. Saat ini menjadi dosen (Guru Besar) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Kristen Petra. Beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain, *Ilmu Budaya Besar* (Penerbit UK Petra, 1985); *Ilmu Sosial Dasar* (Penerbit UK Petra, 1985); *Beginikah Kemerdekaan Kita?* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., Penerbit FKKS-FKKI, 1997); *The Church and Human Rights in Indonesia* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., SCCF-ICCF, 1997); *Ilmu Budaya Dasar* (bersama Dr. L. Dyson, M.A, Penerbit Citra Media, 1997); *Panggilan Dan Tanggungjawab Menghadapi Masa Depan Bersama* (Anggota Tim Penyusun Buku Putih PGI, 1997); *Jangan Menjual Kebenaran* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., Penerbit FKKI, 1998); *Sosiologi dan Politik* (Penerbit UK Petra, 1998); *Supplement The Church and Human Rights in Indonesia* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., SCCF-ICCF, 2001); *Indonesia Di Persimpangan Kekuasaan. Dominasi Kekerasan Atas Dialog Publik.* (Editor bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T. dan Drs. Frans Parera, The Go-East Institute, 2001); *Etnometodologi dan Beberapa Kasus Penelitian Sosial* (dalam Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian*

Kualitatif, Rajawali Pers, 2001); *Teori-Teori Kekerasan* (Penerbit Ghalia, 2002); *Kekerasan Agama Tanpa Agama* (Penerbit Pustaka Utan Kayu, 2002); *Orang Madura dan Orang Peranakan Tionghoa* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2002); *Juragan dan Bandol* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2002); *Mobilisasi Massa* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2003); *Peristiwa Sepuluh-Sepuluh* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2003); *Kebebasan Beragama : Bunga Rampai Kehidupan Berbangsa* (Pusat Studi Etika dan Sosio Religiositas UK Petras, 2015). *Meneropong Kekerasan Politik Agama di Indonesia* (Pustaka Saga, 2016).